



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH



RIPJPID
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Dasar Hukum.....	6
1.3. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Spesifikasi Kegiatan.....	7
1.3.1. Maksud dan Tujuan	7
1.3.2. Sasaran.....	8
1.3.3. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO	10
2.1 Gambaran Umum Daerah	10
2.1.1 Aspek Geografi.....	10
2.1.2 Aspek Kependudukan	12
2.1.3 Aspek Pendidikan	16
2.1.4 Aspek Kesehatan	19
2.1.5 Aspek Ketenagakerjaan.....	23
2.1.6 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah	33
2.2 Gambaran Umum Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi.....	37
2.2.1 Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah	37
2.2.2 Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	48
2.2.3 Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi.....	52
2.2.4 Budaya Riset dan Inovasi	54
2.2.5 Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	57
2.2.6 Penyelarasan dengan Perkembangan Global	59

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

2.3	Tema Prioritas Riset dan Inovasi.....	61
-----	---------------------------------------	----

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO 82

3.1	Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah	82
-----	--	----

3.2	Tantangan dan Peluang dalam Penanganan Permasalahan Daerah (PPD)	84
-----	--	----

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO 88

4.1	Analisis Kesenjangan Produk Unggulan Daerah.....	88
-----	--	----

4.2	Analisis Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	95
-----	---	----

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO 133

5.1	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah	134
-----	---	-----

5.2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi	136
-----	---	-----

5.3	Kemitraan riset dan inovasi	137
-----	-----------------------------------	-----

5.4	Budaya riset dan inovasi.....	138
-----	-------------------------------	-----

5.5	Keterpaduan riset dan inovasi di daerah	140
-----	---	-----

5.6	Penyelarasan dengan perkembangan global	140
-----	---	-----

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO 142

6.1	Peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi Produk Unggulan Daerah	142
-----	--	-----

6.2	Peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi Permasalahan Prioritas Daerah.....	143
-----	--	-----

BAB VII PROGRAM INDIKATIF TEMATIK RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO 145

7.1	Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah	145
-----	--	-----

7.2	Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Prioritas Daerah	156
-----	---	-----

7.3	Program indikatif Produk Unggulan Daerah dan Permasalahan Prioritas Daerah	162
-----	--	-----

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

7.4 Program indikatif penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah 165

BAB VIII PENUTUP..... 170

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini, peran penelitian dan pengembangan adalah untuk peningkatan daya saing daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dijelaskan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dalam ketentuan Pasal 2 juga menjelaskan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan bahwa BRIDA melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Litbangjirab (penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan), serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Penyusunan dokumen RIPJPID mengacu pada Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa RIPJPID disusun dalam bentuk Peraturan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada penyusunan RIPJPID diperlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan

Pemangku Kepentingan dengan keluaran produk berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah Provinsi. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Kabupaten Mojokerto merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kabupaten Mojokerto, dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang kaya, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Iptek dalam mempercepat pembangunan daerah. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, dibutuhkan sebuah strategi yang terencana dan sistematis, yang dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dengan adanya rencana induk dan peta jalan yang jelas, diharapkan Kabupaten Mojokerto dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mengembangkan kapasitas inovasi yang akan memperkuat daya saing daerah dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan pendidikan. Selain itu, penyusunan rencana induk dan peta jalan ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem Iptek yang terintegrasi di Kabupaten Mojokerto. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur teknologi, serta mendorong kolaborasi antar lembaga penelitian, universitas, dan industri. Dengan memanfaatkan Iptek secara optimal, Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat menciptakan solusi inovatif yang menjawab berbagai tantangan sosial-ekonomi yang ada, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas pertanian, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Peta jalan ini juga akan menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan, serta mengarahkan arah pembangunan Iptek yang lebih terfokus dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RIPJ-PID Kota RIPJ-PID adalah sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur BRIDA;
- 7) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032.

1.3. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Spesifikasi Kegiatan

1.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta jalan Pemajuan Iptek di Daerah Kabupaten Mojokerto 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman dokumen strategis pelaksanaan riset dan inovasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Tujuan dari Penyusunan Dokumen RIPJ-PID Kabupaten Mojokerto adalah sebagai materi teknis dari Peraturan Kepala Daerah yang memuat:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis kondisi eksisting kebijakan berbasis bukti terkait:
 - ekosistem riset dan inovasi daerah yang dielaborasi dengan Produk Unggulan Daerah (PUD);
 - ekosistem riset dan inovasi daerah yang dielaborasi permasalahan utama daerah;

- b. Melakukan identifikasi dan analisis kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah yang diharapkan;
- c. Analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah eksisting dengan yang diharapkan;
- d. Melakukan penentuan strategi pemenuhan kesenjangan;
- e. Melakukan penyusunan peta jalan; dan
- f. Melakukan penyusunan program indikatif tematik/ cross cutting program.

1.3.2. Sasaran

Tersusunnya RIPJ-PID Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

1.3.3. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Berisi mengenai uraian gambaran umum daerah, gambaran umum kondisi riset dan dan inovasi, tema prioritas riset dan inovasi.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Berisi mengenai tantangan dalam pengembangan produk unggulan daerah dan tantangan dan peluang dalam penanganan permasalahan prioritas daerah.

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Berisi analisis kesenjangan dpkesenjangan dalam penanganan permasalahan prioritas daerah

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Berisi mengenai strategi pengembangan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, pengembangan kemitraan riset dan inovasi, pengembangan budaya riset dan inovasi, keterpaduan riset dan inovasi di daerah, penyelerasan dengan perkembangan global.

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Berisi tentang peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi produk unggulan daerah dan peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi permasalahan prioritas daerah.

BAB VII PROGRAM INDIKATIF TEMATIK RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Berisi mengenai ekosistem riset dan inovasi produk unggulan daerah, ekosistem riset dan inovasi permasalahan prioritas daerah, program indikatif produk unggulan daerah dan permasalahan prioritas daerah, dan program indikatif penyelesaian permasalahan prioritas daerah

BAB VII Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia yaitu Gerbangkertosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang) sehingga Kabupaten Mojokerto memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya dari aktivitas perkotaan yang berpusat di Kota Surabaya. Kabupaten Mojokerto terletak 64 km di sebelah barat daya Kota Surabaya sebagai wilayah yang ditunjang oleh Kapanen Mojokerto. Secara geografis, Kabupaten Mojokerto berada di wilayah daratan yang dikelilingi oleh sungai dan tidak memiliki pantai. Secara astronomis Kabupaten Mojokerto terletak antara $111^{\circ}20'13''$ sampai dengan $111^{\circ}40'47''$ bujur timur dan antara $7^{\circ}18'35''$ sampai dengan $7^{\circ}47'0''$ lintang selatan Wilayah Kabupaten Mojokerto yang dikelilingi oleh daratan berbatasan dengan wilayah administrasi lain, yakni:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
Sebelah Barat	:	Kabupaten Jombang
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Malang
Sebelah Timur	:	Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Mojokerto memiliki luas sebesar 969,36 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 299 desa, 5 kelurahan, 1175 dusun, 1647 RW, dan 4620 RT. Adapun 18 kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko,

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Dawarblandong. Berdasarkan proporsi luas daerah menurut kecamatan, Kecamatan Pacet adalah kecamatan dengan luas terbesar yakni sebesar 107,98 km² dan Kecamatan Sooko adalah kecamatan dengan luas terkecil yakni sebesar 19,30 km².

Tabel 2.1 Proporsi Luas Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Luas Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Proporsi Luas (%)
Jatirejo	19	Jatirejo	107,62	11,1
Gondang	18	Gondang	98,62	10,17
Pacet	20	Pacet	107,98	11,14
Trawas	13	Trawas	58,00	5,98
Ngoro	19	Ngoro	70,50	7,27
Pungging	19	Pungging	45,00	4,64
Kutorejo	17	Kutorejo	43,50	4,49
Mojosari	19	Mojosari	28,85	2,98
Bangsals	17	Bangsals	25,84	2,67
Mojoanyar	12	Mojoanyar	23,37	2,41
Dlanggu	16	Dlanggu	35,82	3,7
Puri	16	Puri	34,65	3,57
Trowulan	16	Trowulan	45,93	4,74
Sooko	15	Sooko	19,30	1,99
Gedek	14	Gedek	26,18	2,70
Kemlagi	20	Kemlagi	42,35	4,37
Jetis	16	Jetis	53,05	5,47
Dawar Blandong	18	Dawar Blandong	102,80	10,60

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2024

Kabupaten Mojokerto tertetak pada ketinggian rata-rata 107 meter di atas permukaan laut sehingga tergolong dalam dataran rendah namun terdapat juga pegunungan yang dilalui aliran Sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara dengan suhu yang berkisar di antara 23o C derajat celcius hingga 31o C. Kecamatan Trawas merupakan kecamatan dengan rata-rata ketinggian tertinggi di Kabupaten Mojokerto yaitu terletak 600 meter di atas permukaan laut Secara hidrologis, hujan terjadi hampir di sepanjang tahun 2023 dengan rata-rata curah hujan tertinggi pada Bulan Mei yang mencapai 454,1 mm dan terendah terdapat di Bulan Agustus yang mencapai 10,6 mm. Selain itu, Kabupaten Mojokerto dilalui 61 sungai yang tersebar di beberapa kecamatan dengan Sungai Jurangcetot sebagai sungai terpanjang yang melewati Kecamatan Jatirejo yaitu sepanjang 33,63 km dan Sungai Gembolo sepanjang 31,63 km yang melintasi Kecamatan Trawas, Pacet, Pungging, dan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kutorejo. Pada tahun 2023, suhu tertinggi rata-rata terjadi di Bulan September dengan rata-rata 28,7o C dan tertinggi mencapai 36,8o C sedangkan suhu terendah rata-rata terjadi di Bulan Februari dengan rata-rata 27,2o C dan suhu terendah dicatat di Bulan Juli mencapai 21o C .

Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan

Bulan	Suhu			Kelembaban			Jumlah Curah Hujan (mm)
	Minimu m	Rata - Rata	Maksimu m	Minimu m	Rata - Rata	Maksimu m	
Januari	23,4	27,4	34,2	43	84	98	404,9
Februari	24	27,2	34,3	55	84	98	183,6
Maret	23	27,8	34,6	53	84,7	99	414,2
April	23,9	28,3	34,8	52	81,5	98	226,7
Mei	23,2	28,4	33,6	55	83,8	99	454,1
Juni	22,9	28	33,8	50	81,5	98	189,7
Juli	21	27,8	33,8	50	77,8	98	153,4
Agustus	23	28	33,7	50	77,1	98	10,6
Septembe r	22,9	28,7	36,8	46	75,7	100	151,5
Oktober	23,2	27,8	34,4	51	82,6	99	261,3
Novembe r	22,7	27,6	34,4	59	85,6	100	215,9
Desember	22,1	27,9	35,2	52	82,8	98	191,5

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2024

2.1.2 Aspek Kependudukan

A. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sejumlah 1.147.435 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2021-2023 sebesar 1,22 %. Pada tahun 2023, terdapat pertumbuhan penduduk sejumlah 13.851 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto tentunya memiliki dampak positif ataupun negative yang memengaruhi aspek multisektoral. Berikut di bawah ini merupakan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Jatirejo	22.578	21.434	44.012	105

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Gondang	21.525	21.311	42.836	101
Pacet	29.384	29.136	58.520	101
Trawas	15.458	15.384	30.842	100
Ngoro	42.225	42.884	85.109	98
Pungging	39.560	39.228	78.788	101
Kutorejo	33.552	32.705	66.257	103
Mojosari	39.064	38.993	77.997	100
Bangsals	25.580	25.244	50.824	101
Mojoanyar	25.490	25.051	50.541	102
Dlanggu	27.855	27.497	55.352	101
Puri	39.312	38.676	77.988	102
Trowulan	37.615	36.794	74.409	102
Soko	37.656	37.218	74.874	101
Gedek	28.328	28.162	56.490	101
Kemlagi	28.837	28.751	57.588	100
Jetis	43.843	42.394	86.237	103
Dawar Blandung	25.085	25.460	50.545	99
Kabupaten Mojokerto	562.947	556.262	1.119.209	101

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2021-2023, jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Mojokerto berada di Kecamatan Jetis. Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mojokerto tercatat sebanyak 101 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan sehingga mendekati angka ideal rasio perbandingan antar kelamin yakni 1:1 atau 100:100. Data terkait rasio jenis kelamin digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan yang inklusif khususnya pada aspek yang berfokus pada keseimbangan kesempatan individu dalam pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara adil.

B. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Komposisi penduduk menurut usia di Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan dengan usia produktif yakni usia 15-64 tahun sebanyak 806.321 jiwa atau sebesar 70,27 % dan usia tidak produktif yakni 0-14 tahun atau di atas 65 tahun sebanyak 341.114 jiwa atau sebesar 29,73 %. Lebih besarnya penduduk dengan usia produktif dibandingkan penduduk dengan usia tidak produktif memberikan Kabupaten Mojokerto bonus demografi sehingga dapat menunjang tercapainya visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	38.808	36.206	75.014

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

5-9	42.496	39.532	82.028
10-14	45.663	43.583	89.246
15-19	42.631	40.545	83.176
20-24	45.128	43.037	88.165
25-29	43.604	40.899	84.503
30-34	41.939	40.439	82.378
35-39	42.560	40.622	83.182
40-44	45.011	44.496	89.507
45-49	40.451	40.241	80.292
50-54	41.983	43.138	85.121
55-59	35.167	36.791	71.958
60-64	28.372	29.667	58.039
65-69	19.808	19.961	39.769
70-74	11.852	12.497	24.349
75+	12.599	18.109	30.708
Kabupaten Mojokerto	577.672	569.763	1.147.435

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2024

Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa dampak positif yakni potensi produktivitas yang meningkat sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat pula melalui peningkatan daya beli finansial, mendorong terbukanya kesempatan kerja baru, meningkatnya tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Di sisi lain, terdapat tantangan dari bonus demografi yang harus dikendalikan yakni meningkatnya potensi pengangguran apabila SDM yang dihasilkan tidak memenuhi standarisasi yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan, kriminalitas dan kemiskinan yang dimulai karena pengangguran sebelumnya, dan dapat menjadi beban sosial untuk pembangunan apabila tidak pengelolaan bonus demografi dilakukan dengan kurang tepat.

Bonus Demografi perlu diiringi dengan kebijakan yang mengontrol kualitas sumber daya manusia populasi dengan usia produktif seperti penciptaan kebutuhan lapangan kerja yang dapat menampung jumlah besar dengan berbagai kapasitas yang dimiliki penduduk usia produktif, kualitas pendidikan dan kesehatan yang menunjang kebutuhan sumber daya manusia penduduk usia produktif, pelayanan umum yang baik dan merata, serta jaminan sosial untuk menjamin kesetaraan peluang yang dimiliki tiap individu. Dengan adanya kebijakan yang mengontrol kualitas sumber daya manusia tersebut, pertumbuhan perekonomian dapat tercapai dengan lebih mudah karena kesempatan yang tinggi bagi tiap individu.

C. Laju Pertumbuhan Penduduk

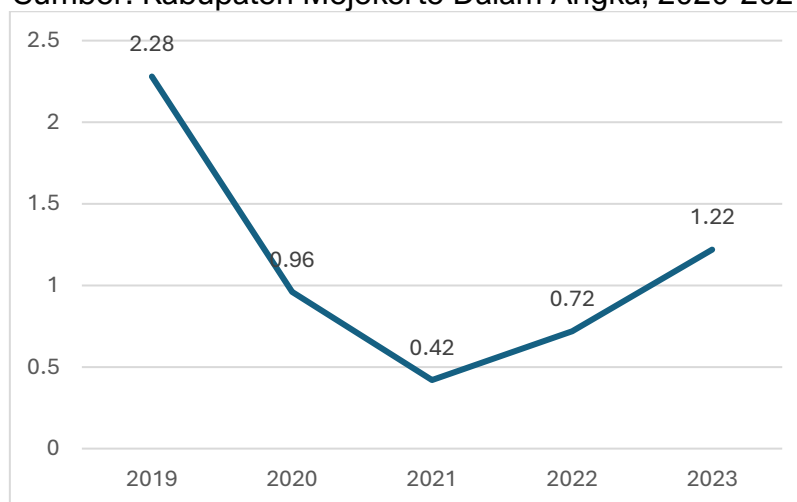
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada kurun 2019-2023, penduduk Kabupaten Mojokerto selalu meningkat tiap tahunnya tetapi laju pertumbuhannya menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan meningkat kembali hingga tahun 2023

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Jatirejo	2,52	1,35	0,53	0,86	1,07
Gondang	2,20	1,08	0,50	0,81	2,03
Pacet	2,28	1,15	0,50	0,82	1,97
Trawas	2,17	0,69	0,41	0,70	1,41
Ngoro	2,73	1,26	0,28	0,53	-0,37
Pungging	2,12	1,09	0,45	0,75	1,13
Kutorejo	2,52	1,07	0,81	1,24	0,22
Mojosari	2,25	0,94	0,17	0,38	2,51
Bangsar	2,23	1,10	0,41	0,70	2,55
Mojoanyar	2,28	0,65	0,40	0,68	-2,17
Dlanggu	2,61	1,14	0,52	0,84	3,02
Puri	2,70	1,43	0,52	0,85	0,80
Trowulan	2,36	0,90	0,42	0,72	2,38
Sooko	2,63	0,88	0,40	0,69	-1,39
Gedek	1,41	0,43	0,29	0,54	2,28
Kemlagi	1,96	0,58	0,56	0,89	2,63
Jetis	2,16	0,76	0,33	0,60	0,87
Dawar Blandong	1,44	0,56	0,21	0,43	2,59
Kabupaten Mojokerto	2,28	0,96	0,42	0,72	1,22

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2020-2024



Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2020-2024

D. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di dalam suatu daerah yang dibagi sesuai dengan batas administrasi tanpa pertimbangan peruntukan lahan di suatu daerah. Berikut di bawah ini merupakan data kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Jatirejo	1386,51	1335	1344	415	420
Gondang	1148,17	1095	1103	441	450
Pacet	1349,42	1296	1305	550	561
Trawas	1064,33	1033	1039	538	546
Ngoro	1489,06	1481	1486	1218	1214
Pungging	1686,48	1637	1646	1774	1794
Kutorejo	1582,98	1547	1564	1559	1562
Mojosari	3069,64	2927	2933	2720	2788
Bangsalsari	2225,10	2112	2124	1992	2042
Mojoanyar	2233,23	2196	2207	2189	2141
Dlanggu	1649,86	1563	1573	1569	1616
Puri	2229,65	2188	2203	2286	2304
Trowulan	1986,76	1898	1909	1641	1680
Sooko	3206,39	3192	3209	3927	3873
Gedek	2633,16	2458	2468	2178	2227
Kemlagi	1227,25	1151	1159	1382	1418
Jetis	1549,69	1508	1515	1643	1657
Dawar	905,38	858	860	495	508
Blandong					
Kabupaten Mojokerto	1675,35	1617	1626	1169	1184

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Sooko merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yakni sebesar 3873 jiwa/km² dan Kecamatan Jatirejo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah yakni sebesar 420 jiwa/km². Kecamatan Sooko memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dikarenakan luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan luas wilayah kecamatan yang lain dan Kecamatan Jatirejo memiliki kepadatan penduduk paling rendah dikarenakan luas wilayahnya merupakan luas wilayah terbesar kedua di Kabupaten Mojokerto.

2.1.3 Aspek Pendidikan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat diukur dengan angka partisipasi sekolah yang menggambarkan proporsi penduduk usia Pendidikan yang sedang bersekolah dalam pelaksanaan program wajib belajar. Standar program wajib belajar berhasil dengan nilai APS umur 7-12 tahun berada di atas 95% dan Aps umur 13-15 tahun berada di atas 70%. Berikut di bawah ini merupakan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mojokerto

Angka Partisipasi Sekolah	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
APS 7-12	99,15	98,26	99,62	100,00	98,89	100,00	99,57	98,57	99,82
APS 13-15	100,00	99,62	98,69	96,81	100,00	100,00	98,61	99,78	99,33
APS 16-18	80,43	84,45	78,22	84,50	88,69	86,66	82,34	86,76	81,91

Sumber: <https://mojokertokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA1Izl=/angka-partisipasi-sekolah-aps-.html>

Pada tahun 2023, APS penduduk berusia 7-12 tahun mencapai 99,82 %,sehingga hanya 0,18% penduduk 7-12 tahun belum bersekolah atau sudah tidak sekolah lagi. Dari usia 7-12 tahun, terdapat yang masih bersekolah di jenjang Sd dan ada yang sudah di jenjang SMP. APS penduduk berusia 13-15 tahun mencapai 99,33 % sehingga hanya 0,67 % penduduk 13-15 tahun masih belum bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Angka 99,33% ini aktif bersekolah pada berbagai jenjang yakni SD, SMP, atau ada yang sudah mencapai SMA.

Berdasarkan uraian di atas, capaian APS usia 7-12 tahun sudah memenuhi target karena mencapai 99,82 % dari target yang ditentukan sebesar 95%, capaian APS usia 13-15 tahun pun juga sudah memenuhi target karena mencapai 99,33% dari target yang ditentukan sebesar di atas 70%. Jika dikaji berdasarkan gender, perempuan cenderung memiliki APS yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2023, untuk kategori usia 7-12 tahun, APS laki-laki mencapai 99,62% sementara perempuan mencapai 100%; untuk kategori usia 13-15 tahun, laki-laki mencapai 98,69%

sementara perempuan mencapai 100%; untuk kategori usia 16-18 tahun, laki-laki mencapai 78,22% sementara perempuan mencapai 86,66%.

Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan APS tahun 2021 hingga 2023, APS usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun mengalami penurunan dan hanya APS 7-12 tahun yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, diperlukan evaluasi mendalam bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengkaji kembali strategi program wajib belajar yang diterapkan dikarenakan terdapat penurunan APS di 2 kategori tersebut. Selain APS terdapat pula rata-rata lama sekolah yang berguna untuk menentukan jenjang kelulusan pendidikan penduduk di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya waktu Pendidikan yang ditempuh individu. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun sehingga rata-rata lama sekolah harus mencapai 9 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan tiap tahunnya dan pada tahun 2023 sudah mencapai angka 9,11 sehingga di tahun 2023, target pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun baru tercapai di Kabupaten Mojokerto. Berikut di bawah ini merupakan data rata-rata lama sekolah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah			Harapan Lama Sekolah		
	2021	2022	2023	2022	2023	2024
Kabupaten Mojokerto	8,64	8,97	9,11	12,96	12,97	12,99
Jawa Timur	7,88	8,03	8,11	13,36	13,37	13,38
Indonesia	8,54	8,69	8,77	13,08	13,10	13,15

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4lzl=/harapan-lama-sekolah--tahun-.html>

Kesuksesan paling minimum dari kualitas pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. Kemampuan ini dianggap sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Angka buta huruf baik tinggi maupun rendah mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pendidikan di suatu daerah. Pada tahun 2022, angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto telah mencapai di atas 90% untuk kelompok umur dari 15-19% tetapi untuk kelompok umur di atas 70 berada di angka 63,45% atau setara

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

dengan buta huruf sebesar 36,55%. Tingginya angka buta huruf pada kelompok umur di atas 70 terjadi karena terbatasnya akses terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama, rendahnya tingkat partisipasi sekolah di masa lalu, paradigma sosial tentang pendidikan.

Tabel 2.9 Persentase Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto	Kelompok Umur						
	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+
Angka Melek Huruf	100,00	100,00	99,80	99,51	98,38	90,70	63,45
Angka Buta Huruf	0,00	0,00	0,20	0,49	1,62	10,30	36,55

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwMCMx/angka-melek-huruf-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur--2023--persen-.html>

2.1.4 Aspek Kesehatan

A. Sarana Kesehatan

1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Puskesmas di Kabupaten Mojokerto berjumlah 26 yang tersebar di 17 kecamatan dan didukung dengan 52 Puskesmas Pembantu yang tersebar di 18 kecamatan. Akan tetapi, belum semuanya memiliki status akreditasi karena pada Oktober 2023, hanya 2 Puskesmas memiliki akreditasi utama dan 5 Puskesmas memiliki akreditasi paripurna.

Tabel 2.10 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	2020	2021	2022
Jatirejo	1	1	1
Gondang	1	1	1
Pacet	2	2	3
Trawas	1	1	1
Ngoro	2	2	2
Pungging	2	2	2
Kutorejo	2	2	2
Mojosari	2	2	2
Bangsar	1	1	1
Mojoanyar	1	1	1
Dlanggu	1	1	1
Puri	1	1	1
Trowulan	2	2	2
Sooko	1	1	1

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Gedek	2	2	2
Kemlagi	2	2	-
Jetis	2	2	2
Dawar Blandung	1	1	1
Kabupaten Mojokerto	27	27	26

Berdasarkan Tabel 2.10 mengenai jumlah Puskesmas di Kabupaten Mojokerto, secara umum dapat disimpulkan bahwa ketersediaan layanan kesehatan di tingkat kecamatan relatif stabil selama periode 2020 hingga 2022. Sebagian besar kecamatan mempertahankan jumlah Puskesmas yang sama dalam kurun waktu tersebut. Satu-satunya kecamatan yang menunjukkan peningkatan jumlah Puskesmas adalah Kecamatan Pacet, yang bertambah dari dua menjadi tiga unit pada tahun 2022. Hal ini dapat mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan layanan kesehatan atau pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Sementara itu, data untuk Kecamatan Kemlagi pada tahun 2022 tidak tersedia, sehingga tidak diketahui apakah terjadi perubahan jumlah Puskesmas di daerah tersebut. Akibat dari kekosongan data ini, total jumlah Puskesmas di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 tercatat menurun menjadi 26 unit, dari sebelumnya 27 unit pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan ini kemungkinan bukan karena pengurangan fasilitas, melainkan karena tidak tercatatnya data dari Kecamatan Kemlagi yang sebelumnya memiliki dua Puskesmas.

Tabel 2.11 Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	2020	2021	2022
Jatirejo	4	4	4
Gondang	4	4	4
Pacet	3	3	3
Trawas	2	2	2
Ngoro	4	4	4
Pungging	3	3	3
Kutorejo	3	3	3
Mojosari	2	2	2
Bangsar	2	2	2
Mojoanyar	3	3	3
Dlanggu	3	3	3
Puri	3	3	3
Trowulan	2	2	2
Sooko	3	3	3
Gedek	3	3	3
Kemlagi	3	3	2
Jetis	3	3	3

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Dawar Blandung	3	3	3
Kabupaten Mojokerto	53	53	52

Berdasarkan data jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan layanan pendukung kesehatan di tingkat kecamatan cenderung stabil. Sebagian besar kecamatan mempertahankan jumlah Puskesmas Pembantu yang sama selama tiga tahun berturut-turut. Jumlah total Puskesmas Pembantu di seluruh Kabupaten Mojokerto tercatat sebanyak 53 unit pada tahun 2020 dan 2021, namun sedikit menurun menjadi 52 unit pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya satu Puskesmas Pembantu di Kecamatan Kemlagi, dari tiga unit pada tahun 2020 dan 2021 menjadi dua unit pada tahun 2022. Meskipun demikian, tidak terdapat perubahan signifikan di kecamatan lainnya, yang menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah telah menjaga konsistensi dalam penyediaan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama di wilayah ini.

2) Rumah Sakit

Tabel 2.12 Jumlah Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Kecamatan	Rumah Sakit Khusus	Klinik bersalin	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
Jatirejo	-	-	1	-
Gondang	-	-	1	-
Pacet	1	-	1	1
Trawas	-	-	1	-
Ngoro	2	-	1	1
Pungging	-	1	1	1
Kutorejo	-	1	1	1
Mojosari	3	1	-	2
Bangsar	1	-	1	-
Mojoanyar	-	-	1	-
Dlanggu	-	-	1	-
Puri	-	1	1	-
Trowulan	-	-	1	1
Sooko	2	-	1	-
Gedek	2	-	-	2
Kemlagi	-	1	1	1
Jetis	-	1	2	-

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Dawar Blandung	-	1	1	-
Kabupaten Mojokerto	11	7	17	10

Berdasarkan Tabel 2.12 mengenai jumlah Rumah Sakit Khusus, Klinik Bersalin, serta Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Mojokerto, terlihat adanya distribusi fasilitas kesehatan yang bervariasi di setiap kecamatan. Jumlah total fasilitas yang tercatat adalah 11 Rumah Sakit Khusus, 7 Klinik Bersalin, 17 Puskesmas Rawat Inap, dan 10 Puskesmas Non Rawat Inap. Kecamatan Mojosari memiliki jumlah Rumah Sakit Khusus terbanyak, yaitu sebanyak tiga unit, disusul oleh Kecamatan Ngoro, Gedek, dan Sooko yang masing-masing memiliki dua unit. Klinik bersalin tersebar di tujuh kecamatan, dengan beberapa kecamatan seperti Pungging, Kutorejo, Puri, Kemlagi, Jetis, dan Dawar Blandung memiliki satu unit masing-masing. Puskesmas Rawat Inap tersedia di hampir seluruh kecamatan, menunjukkan penyebaran layanan kesehatan dasar yang cukup merata, dengan Jetis sebagai satu-satunya kecamatan yang memiliki dua unit. Sementara itu, Puskesmas Non Rawat Inap lebih terbatas penyebarannya, hanya terdapat di 10 kecamatan. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kecamatan lebih difokuskan pada penyediaan layanan rawat inap di Puskesmas, sementara keberadaan Rumah Sakit Khusus dan Klinik Bersalin masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, kemungkinan yang lebih padat penduduk atau lebih strategis secara geografis.

B. Jumlah Tenaga Kesehatan

Tabel 2.13 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan masyarakat
Jatirejo	1	10	17	3
Gondang	1	6	16	1
Pacet	3	12	19	2
Trawas	-	5	14	-
Ngoro	1	12	26	5
Pungging	2	12	25	5
Kutorejo	3	11	19	6
Mojosari	1	22	23	4
Bangsar	1	2	19	2
Mojoanyar	1	4	9	4
Dlanggu	1	16	17	2
Puri	-	8	17	2

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Trowulan	3	12	17	5
Sooko	1	7	13	1
Gedek	1	7	15	2
Kemlagi	-	9	19	3
Jetis	1	14	17	4
Dawar Blandung	1	7	16	2
Kabupaten Mojokerto	22	176	319	53

Berdasarkan Tabel 2.13, terkait jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa distribusi tenaga kesehatan masih menunjukkan ketimpangan antar kecamatan. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 22 tenaga keperawatan, 176 tenaga kebidanan, 319 tenaga kefarmasian, dan 53 tenaga kesehatan masyarakat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Tenaga kefarmasian merupakan kelompok tenaga kesehatan terbanyak, sementara tenaga keperawatan jumlahnya paling sedikit. Kecamatan Mojosari memiliki tenaga kebidanan terbanyak dengan 22 orang, sedangkan Kecamatan Dlanggu menonjol dalam jumlah tenaga kebidanan yakni sejumlah 16 dan kefarmasian yakni sejumlah 17. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Trawas, Puri, dan Kemlagi tercatat tidak memiliki tenaga keperawatan, dan Trawas juga tidak memiliki tenaga kesehatan masyarakat. Ini menunjukkan masih adanya kekosongan jenis tenaga kesehatan tertentu di sejumlah wilayah. Kecamatan Ngoro dan Pungging terlihat cukup lengkap dan seimbang dalam jumlah tenaga kesehatan di semua kategori. Data ini menggambarkan perlunya upaya pemerataan distribusi tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto dapat berlangsung secara lebih optimal dan merata di seluruh kecamatan.

2.1.5 Aspek Ketenagakerjaan

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja merupakan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat karena

dengan produktifnya angkatan kerja, diharapkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat dan berputarnya roda perekonomian nasional yang akan kembali pada peningkatan taraf kehidupan individual. Oleh sebab itu, semakin tinggi TPAK suatu wilayah, semakin tinggi pula pasokan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan/atau jasa dalam sisten perekonomian di suatu wilayah. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Mojokerto dicatat pada angka 73,94% yang tercatat mengalami kenaikan dengan konsisten sejak tahun 2019. Berikut di bawah ini merupakan data TPAK Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	87,39%	86,11%	85,50%	85,57%	87,24%	-
Perempuan	51,72%	53,64%	55,60%	57,27%	57,77%	-
Kabupaten Mojokerto	69,46%	69,79%	70,47%	71,34%	72,51%	73,94%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Jika dikaji berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki berstatus fluktuatif karena mengalami penurunan di tahun 2020 hingga 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 dan 2023 walaupun masih 0,15% lebih rendah daripada angka di tahun 2019 . Di sisi lain, TPAK perempuan konsisten mengalami peningkatan sebanyak 6,05% sejak tahun 2019. Perbedaan angka partisipasi kerja antar jenis kelamin dipengaruhi oleh stigma di masa lalu bahwa laki-laki diutamakan dalam mencari nafkah sementara perempuan berfokus pada urusan rumah tangga. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki ketergantungan dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Kabupaten Mojokerto juga mayoritas dipenuhi oleh daerah perdesaan sehingga memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan daerah perkotaan dan hal ini berpengaruh pada stigma peran perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perekonomian.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT mengindikasikan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap dalam pasar. TPT Kabupaten Mojokerto tahun 2024 berada di 3,87% yang berarti terdapat penurunan dari tahun 2022. Dengan hal ini, dapat diinterpretasikan

bahwa dalam 10.000 angkatan kerja, terdapat 387 orang yang menganggur. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya pada tahun 2019, TPT tahun 2024 meningkat 0,26 % dari 3,61 %. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi pada perekonomian internasional sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat, pengurangan produktivitas perekonomian, meningkatnya jumlah pengangguran akibat kontraksi perekonomian tersebut. Berikut di bawah ini merupakan data TPT Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mojokerto Terhadap Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Wilayah	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mojokerto	3,61	5,75	5,54	4,83	4,67	3,87
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

TPT Kabupaten Mojokerto cenderung lebih rendah daripada TPT provinsi dan nasional dalam kurun waktu 2019-2024. Mayoritas kelompok yang tergolong dalam pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto adalah lulusan SMA sederajat yakni sebanyak 6,76% , lulusan SMP sederajat sebanyak 3,76%, lulusan perguruan tinggi sebanyak 1,79%, dan lulusan SD sebanyak 0,93%. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas pendidikan agar terdapat jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak dan penciptaan lapangan kerja yang mengakomodir berbagai keterampilan dari berbagai jenjang pendidikan sehingga secara jangka panjang dapat menurunkan angka pengangguran terbuka dengan signifikan.

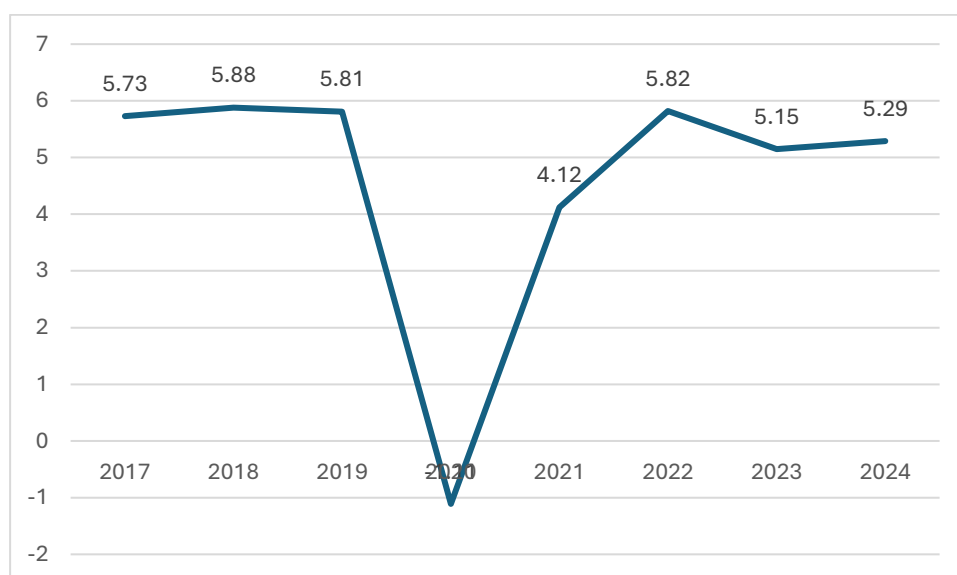
2.1.6 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Struktur perekonomian di Jawa Timur pada tahun 2023 didominasi oleh Kota Surabaya dengan orientasi PDRB nya terhadap Jawa Timur yakni sebesar 24,34% , Kabupaten Sidoarjo yakni sebesar 9,35%, Kabupaten Gresik Sebesar 5,94% , Kota Kediri sebesar 5,32%, dan Kabupaten Malang sebesar 4,36 %. Kontribusi PDRB Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur dicatat sebesar 3,56% pada tahun 2023.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 meningkat 0,14% dari tahun 2023 yakni dari 5,15% menjadi 5,29%. Perekonomian yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 113.127,71 miliar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai 70.527,65 miliar. Dalam segi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi di lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 12,17% dan dalam segi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 14,48%. Komposisi perekonomian Kabupaten Mojokerto menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak berubah secara signifikan karena tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang meningkat sebesar 1,76% dari 10,41% di tahun 2023 menjadi 12,17% di tahun 2024.



Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.16 PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

PDRB Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha			PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.219,80	7.905,49	8.160,98	3.978,81	4.152,33	4.157,61
(B) Pertambangan dan Penggalian	875,17	929,08	922,38	527,89	543,01	544,77
(C) Industri Pengolahan	54.143,77	59.668,59	65.534,97	36.102,77	38.190,85	40.441,64
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	58,44	62,86	65,67	43,46	46,42	48,66
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	58,45	61,72	65,53	44,89	46,43	48,56
(F) Konstruksi	7.702,25	7.919,04	8.317,45	5.084,02	5.190,94	5.356,67
(G) Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.894,80	10.867,64	11.707,26	6.535,69	6.916,35	7.257,60
(H) Transportasi dan Pergudangan	1.348,38	1.597,17	1.809,18	841,78	929,44	1.042,57
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.924,09	2.125,94	2.293,97	1.155,07	1.225,94	1.282,50
(J) Informasi dan Komunikasi	5.271,38	5.551,57	5.984,66	4.629,18	4.821,64	5.135,71
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	1.410,06	1.501,85	1.581,22	856,14	898,06	939,72
(L) Real Estate	1.371,19	1.396,59	1.477,76	958,38	965,02	995,67
(M,N) Jasa Perusahaan	147,24	164,74	181,44	90,96	99,42	107,29
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,	2.060,97	2.090,15	2.301,47	1.246,02	1.245,15	1.341,28

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

dan Jaminan Sosial Wajib						
(P) Jasa Pendidikan	1.119,88	1.205,11	1,289,83	775,42	824,28	873,20
(Q)Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401,21	441,90	467,34	272,02	292,09	305,66
(R,S,T,U) Jasa Lainnya	791,03	874,79	968,71	557,34	595,30	648,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	95.798,11	104.364,24	113.129,71	63.699,84	66.982,67	70.527,65

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.17 Distribusi PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

PDRB Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha		
	2022	2023	2024
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,54	7,57	7,21
(B) Pertambangan dan Penggalian	0,91	0,89	0,82
(C) Industri Pengolahan	56,52	57,17	57,93
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,04	7,59	7,35
(F) Konstruksi	8,04	7,59	7,35
(G) Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,33	10,41	10,35
(H) Transportasi dan Pergudangan	1,41	1,53	1,60
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,01	2,04	2,03
(J) Informasi dan Komunikasi	5,50	5,32	5,29

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	1,44	1,40
(L) Real Estate	1,43	1,34	1,31
(M,N) Jasa Perusahaan	0,15	0,16	0,16
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,15	2,00	2,03
(P) Jasa Pendidikan	1,17	1,15	1,14
(Q)Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,42	0,41
(R,S,T,U) Jasa Lainnya	0,83	0,84	0,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Dalam pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terdapat di Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 55,92% atau setara dengan 58.356,89 miliar rupiah pada tahun 2023. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga terus mendominasi sejak tahun 2019 hingga 2023. Setelah itu, pengeluaran tertinggi diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yakni sebesar 27,38% atau setara dengan 28.572,87 miliar rupiah pada tahun 2023, komponen net ekspor barang dan jasa yakni sebesar 12,36% atau setara dengan 12.900,14 miliar rupiah. Berikut di bawah ini merupakan tabel distribusi PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.18 Persentase Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,72%	56,65%	55,15%	55,30%	55,92%
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,19%	1,23%	1,20%	1,18%	1,21%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,83%	2,60%	2,56%	2,23%	2,15%

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,41%	28,40%	27,19%	27,66%	27,38%
Perubahan Inventori	1,64%	0,60%	1,14%	1,08%	0,98%
Net Ekspor barang dan Jasa	9,21%	10,52%	12,77%	12,54%	12,36%

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan PDRB Pengeluaran 2019-2023

C. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, Pendidikan, dan standar kehidupan. Pembangunan manusia merupakan pemberdayaan aktor utama dalam menentukan cepat atau lambatnya pembangunan nasional dalam mencapai tujuan. IPM dapat menilai kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh pada suatu daerah sehingga dengan itu pembangunan nasional dapat dinilai dengan tinggi rendahnya angka IPM. Berikut di bawah ini merupakan IPM Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan nasional.

Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mojokerto	73,53	73,83	74,15	74,89	76,23	76,69
Jawa Timur	71,50	71,71	72,14	72,75	74,65	75,35
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto terus meningkat dalam kurun 6 tahun terakhir. Dalam rentang 2020-2024, rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 0,70% tiap tahunnya. Peningkatan IPM terjadi di seluruh dimensi yakni umur panjang, kehidupan yang sehat, pengetahuan tinggi, dan standar kehidupan layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga 74,95 tahun. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dari 12,97 menjadi 12,99 tahun dan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun dari 9,11 menjadi 9,13 di tahun 2024. Dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang meningkat sebesar

3,24% dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Mojokerto dicatat selalu lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Timur dan nasional sehingga strategi pengelolaan IPM dapat dikatakan cukup baik di Kabupaten Mojokerto dan dibutuhkan keberlanjutan dari peningkatan kualitas IPM dengan program-program yang menyeluruh dari pemangku kebijakan.

D. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu daerah terhadap produktivitas perekonomian daerah tersebut. Ketimpangan ini diukur dengan koefisien gini yang mengukur derajat ketidakmerataan distribusi keuangan penduduk yang ditampilkan dengan kurva lorens. Rentang nilai berada di antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna dan semakin mendekati 1 maka menunjukkan jumlah ketimpangan yang lebih tinggi. Adapun kriteria pengelompokan koefisien gini berada di bawah ini:

1. $GR < 0,4$ menunjukkan ketimpangan yang rendah
2. $GR 0,4-0,5$ menunjukkan ketimpangan moderat
3. $GR > 0,5$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Koefisien gini Kabupaten Mojokerto menunjukkan ketimpangan yang rendah selama 5 tahun terakhir dan berada di bawah angka provinsi Jawa Timur dan nasional. Akan tetapi, di sisi lain terdapat peningkatan signifikan sebesar 0,067 dari tahun 2019 yakni sebesar 0,270 menjadi 0,337 di tahun 2024. Ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan karena dampak pandemic COVID-19 dalam sektor perekonomian yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran sehingga dibutuhkan pendekatan kebijakan pengentasan pengangguran dan kemiskinan agar terdapat kembali pemerataan penghasilan di Kabupaten Mojokerto. Berikut di bawah ini merupakan capaian koefisien gini Kabupaten Mojokerto terhadap Provinsi Jawa Timur, dan nasional.

Tabel 2.20 Koefisien Gini Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Wilayah	Koefisien Gini					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mojokerto	0,270	0,325	0,294	0,327	0,338	0,337
Jawa Timur	0,370	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
Nasional	0,382	0,385	0,381	0,384	0,388	0,379

E. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis ini digunakan sebagai alat ukur persentase rakyat yang terhitung mengalami kemiskinan dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan. Garis ini merupakan hasil penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Berikut di bawah ini merupakan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.21 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
2016	330.940	115,38	10,61
2017	345.487	111,79	10,19
2018	370.610	111,55	10,08
2019	394.003	108,81	9,75
2020	406.043	118,80	10,57
2021	417.784	120,54	10,62
2022	445.608	111,03	9,71
2023	486.520	112,86	9,80

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2024

Kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sehingga semakin tinggi nilai kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut di bawah ini merupakan data angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.22 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Mojokerto

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya kemiskinan
2016	1,53	0,35
2017	1,7	0,46
2018	1,81	0,48
2019	1,29	0,27
2020	1,95	0,51
2021	1,59	0,37
2022	1,37	0,29

2023	1,73	0,40
------	------	------

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto, dalam kurun 2016-2023 terdapat peningkatan indeks kedalaman kemiskinan sebanyak 0,20 dan dalam rentang waktu tersebut indeks kedalaman kemiskinan bersifat fluktuatif karena mencapai angka 1,29 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 1,95 di tahun 2020. Adapun indeks keparahan kemiskinan dalam kurun 2016-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,05% dan dalam rentang waktu tersebut, indeks keparahan kemiskinan bersifat fluktuatif karena mengalami peningkatan hingga tahun 2018 dan menurun di tahun 2019 yaitu sebesar 0,27% tetapi meningkat kembali di tahun 2020 dan di tahun 2023. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan linear dengan peningkatan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di tahun 2019 sebesar 9,75% dan di tahun 2023 sebesar 9,80%. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan angka pengangguran meningkat sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi penghasilan dalam suatu keluarga.

2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat yang penting untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam bersaing baik secara ekonomi maupun sosial. IDSD menggambarkan sejauh mana suatu daerah dapat memanfaatkan potensi ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta lingkungan bisnis untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Evaluasi ini mencakup berbagai faktor, mulai dari kualitas infrastruktur seperti transportasi dan teknologi informasi, hingga kualitas sumber daya manusia dan daya tarik investasi. Dengan memperhatikan IDSD, daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya serta merancang strategi untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional dan nasional. Ini sangat penting bagi Kabupaten Mojokerto, di mana usaha untuk meningkatkan daya saing daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

IDSD terdiri dari empat komponen utama yang masing-masing memiliki beberapa pilar dengan fokus yang berbeda. Pertama, Komponen Lingkungan Pendukung mencakup faktor-faktor seperti institusi yang mempengaruhi iklim sosial, politik, hukum, dan

keamanan yang mendukung kegiatan ekonomi, infrastruktur yang memberikan nilai tambah, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjadi kunci kemajuan di era Industri 4.0, serta stabilitas ekonomi makro seperti penciptaan nilai tambah dan kinerja ekonomi. Kedua, Komponen Pasar melibatkan pasar produk yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, pasar tenaga kerja yang berperan dalam mengurangi pengangguran, sistem keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi, serta ukuran pasar yang memperkuat struktur industri. Ketiga, Komponen Sumber Daya Manusia mencakup aspek kesehatan dan keterampilan yang mendukung tenaga kerja yang produktif. Terakhir, Komponen Ekosistem Inovasi mencakup dinamika bisnis dalam memulai dan memperluas usaha, serta kemampuan inovasi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan ekonomi yang bernilai tambah. IDSD berperan penting dalam menilai dan meningkatkan daya saing Kabupaten Mojokerto di tingkat regional maupun nasional. Status IDSD Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Tabel 2.23 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		Skor IDS
	Pilar 1: Institusi	Pilar 2: Infrastruktur	Pilar 3: Adopsi TIK	Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 5: Kesehatan	Pilar 6: Keterampilan	Pilar 7: Pasar Produk	Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	Pilar 9: Sistem keuangan	Pilar 10: Ukuran Pasar	Pilar 11: Dinamika Bisnis	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Jawa Timur	4,73	4,51	3,95	4,20	3,93	4,01	2,16	2,78	2,40	5,00	4,24	4,63	3,88
Rata-Rata Kab/Kota	4,63	3,61	4,49	3,65	3,96	3,89	3,40	2,87	2,02	4,51	4,55	2,81	3,7
Pacitan	4,88	2,94	4,30	3,68	3,99	4,16	3,56	2,03	1,74	4,19	4,69	2,63	3,57
Ponorogo	4,66	2,95	4,68	3,66	4,05	3,99	4,19	3,01	2,23	4,31	4,27	3,60	3,80
Trenggalek	4,88	3,12	4,51	2,96	4,14	3,73	3,35	2,35	1,57	4,26	4,66	2,35	3,49
Tulungagung	4,61	3,59	4,69	3,50	4,17	4,01	3,57	3,07	1,60	4,60	4,66	2,61	3,72
Kab.Blitar	4,82	3,74	4,68	3,74	4,12	3,85	3,26	2,86	1,75	4,57	4,45	1,27	3,59
Kab.Kediri	4,88	3,73	4,46	3,79	4,03	3,88	3,55	3,15	2,22	4,63	4,52	2,90	3,81
Kab.Malang	4,85	4,25	4,51	3,83	4,03	3,55	3,04	2,60	1,71	5,00	4,71	3,40	3,79
Lumajang	4,43	3,75	4,26	3,62	3,83	3,59	2,57	2,37	1,47	4,51	4,39	1,99	3,40
Jember	4,64	4,07	4,21	3,60	3,76	3,57	3,27	2,86	1,65	4,90	4,49	4,19	3,77
Banyuwangi	4,68	4,69	4,20	4,30	3,87	3,94	3,06	2,77	1,35	4,91	4,80	2,64	3,77
Bondowoso	4,78	3,72	3,92	3,45	3,55	3,37	2,80	2,53	1,62	4,29	4,25	2,26	3,38
Situbondo	4,78	3,55	4,07	4,56	3,75	3,74	2,10	2,41	2,58	4,29	4,34	2,69	3,49
Kab.Probolinggo	4,69	3,64	3,99	3,36	3,60	3,46	2,45	2,35	1,65	4,53	4,99	2,48	3,43
Kab.Pasuruan	4,81	4,26	4,20	3,80	3,82	3,49	1,68	2,15	0,83	5,00	4,38	2,57	3,42
Sidoarjo	4,64	4,13	4,85	3,66	4,15	3,90	3,28	3,18	1,96	5,00	4,74	4,02	3,96
Kab.Mojokerto	4,80	3,74	4,45	3,69	4,03	4,12	2,10	2,30	1,54	4,95	4,35	2,96	3,59
Jombang	4,79	3,85	4,61	3,79	4,03	4,23	3,89	2,65	1,87	4,62	4,71	3,55	3,88
Nganjuk	4,75	3,49	4,38	3,61	3,94	3,88	2,25	3,17	1,61	4,43	4,28	2,01	3,48

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029**

Kabupaten/Kota	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		Skor IDS
	Pilar 1: Institusi	Pilar 2: Infrastruktur	Pilar 3: Adopsi TIK	Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 5: Kesehatan	Pilar 6: Keterampilan	Pilar 7: Pasar Produk	Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	Pilar 9: Sistem keuangan	Pilar 10: Ukuran Pasar	Pilar 11: Dinamika Bisnis	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	
Kab.Madiun	4,73	3,28	4,41	3,93	3,94	4,23	3,60	3,58	2,47	4,28	4,83	1,98	3,75
Magetan	4,91	3,10	4,53	3,53	4,03	4,10	5,00	3,29	1,90	4,27	4,96	2,26	3,83
Ngawi	4,55	3,94	4,57	3,59	4,02	3,67	3,68	3,22	2,21	4,28	4,87	2,27	3,77
Bojonegoro	4,72	3,75	4,19	2,86	3,97	3,79	1,44	2,68	1,31	4,21	4,68	2,82	3,42
Tuban	4,76	3,30	4,25	3,16	3,95	4,02	2,41	2,31	1,13	4,82	4,67	2,39	3,41
Lamongan	4,56	3,83	4,41	3,97	4,02	3,97	3,44	2,46	1,70	4,60	4,81	2,84	3,72
Gresik	4,55	4,12	4,81	3,78	4,03	2,85	2,11	2,47	1,45	5,00	4,82	3,29	3,77
Bangkalan	4,60	3,44	4,08	3,48	3,82	2,96	3,39	2,12	1,81	4,35	4,12	3,38	3,44
Sampang	4,45	3,02	4,24	3,62	3,64	4,00	3,05	1,91	1,07	4,28	4,30	2,51	3,29
Pamekasan	4,52	2,58	4,28	3,81	3,61	3,63	3,68	2,17	1,45	4,21	4,39	3,17	3,52
Sumenep	4,41	3,11	4,18	3,46	3,96	4,25	2,39	2,26	3,17	4,53	4,15	2,60	3,31
Kota Kediri	4,75	3,53	4,89	3,32	4,15	4,37	1,41	3,42	3,10	5,00	4,71	2,92	3,65
Kota Blitar	4,40	3,54	4,87	4,14	4,15	4,37	5,00	3,83	3,17	3,83	4,76	3,03	4,09
Kota Malang	4,33	4,06	4,96	3,96	4,10	4,00	4,74	4,32	3,10	4,90	4,59	4,17	4,27
Kota Probolinggo	4,28	3,28	4,76	3,31	3,84	4,26	5,00	3,31	2,53	4,08	4,56	2,17	3,78
Kota Pasuruan	4,30	3,12	4,77	3,58	3,95	4,24	5,00	3,28	2,88	3,92	4,39	2,67	3,84
Kota Mojokerto	4,48	3,85	4,87	4,11	4,10	4,28	5,00	3,90	3,04	3,83	3,63	2,43	3,96
Kota Madiun	4,71	3,78	4,90	3,83	4,04	4,32	5,00	4,55	3,96	4,18	4,70	3,16	4,26
Surabaya	4,13	4,26	4,93	4,03	4,15	4,08	5,00	3,05	3,13	5,00	4,65	4,35	4,23
Batu	4,60	3,06	4,77	3,79	4,03	4,31	5,00	3,04	3,47	4,22	4,51	2,40	3,93

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah,2024

2.2 Gambaran Umum Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi

2.2.1 Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi

A. Kebijakan Riset dan Inovasi di Tingkat Pusat

Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan nasional yang menjadi payung hukum dan pedoman operasional. Landasan utama di tingkat pusat dimulai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menegaskan perlunya satu lembaga pengarah riset nasional. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Perpres Nomor 95 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Perpres 74/2019, yang menyempurnakan mekanisme koordinasi dan peran BRIN. Selanjutnya, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN memberikan mandat lebih jelas terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), sehingga pemerintah daerah memiliki instrumen kelembagaan yang sah untuk merancang dan melaksanakan program riset sesuai kebutuhan lokal. Dukungan kebijakan juga datang dari Perpres Nomor 33 Tahun 2021 yang memperluas pengaturan mengenai organisasi, tugas, dan fungsi BRIN dalam mengintegrasikan riset lintas sektor. Di sisi substansi, Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045 menjadi panduan strategis jangka panjang, menetapkan prioritas riset nasional seperti pangan, kesehatan, energi, teknologi informasi, dan sosial-humaniora, yang kemudian dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah sesuai potensi dan permasalahan spesifik

B. Kebijakan Riset dan Inovasi di Tingkat Provinsi Jawa Timur

Reformasi kebijakan riset dan inovasi di tingkat Provinsi Jawa Timur pada dasarnya masih bertumpu pada pengaturan kelembagaan, terutama melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 56 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Tahun 2021. Kedua regulasi ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur sebagai motor penggerak aktivitas penelitian di daerah. Kehadiran Pergub tersebut menjadi dasar hukum bagi Balitbang untuk menjalankan perannya dalam perumusan kebijakan berbasis riset, fasilitasi inovasi daerah, dan koordinasi dengan kabupaten/kota. Di sisi lain, aturan ini lebih menekankan pada aspek struktural—seperti penataan organisasi dan tata laksana kerja—sehingga fokus substansi riset dan arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) belum tergambar secara komprehensif.

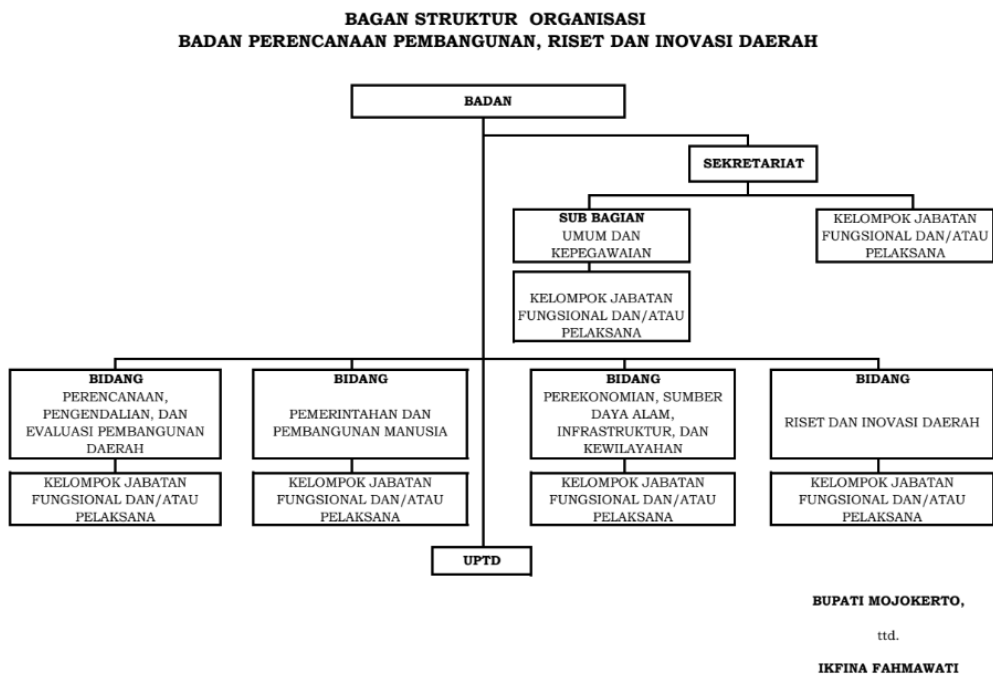
Hingga saat ini, Provinsi Jawa Timur belum memiliki rencana induk iptek atau kebijakan substantif lain yang secara jelas mengarahkan pengembangan riset dan inovasi di tingkat provinsi. Tidak terdapat dokumen sekelas master plan iptek yang memuat prioritas tematik, target capaian, maupun mekanisme pendanaan riset jangka

menengah–panjang. Kondisi ini membuat berbagai inisiatif inovasi daerah berjalan sektoral dan cenderung bergantung pada kebijakan pusat atau program nasional. Akibatnya, meskipun landasan kelembagaan sudah tersedia dan diakui secara hukum—termasuk pengawasan melalui peraturan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah—upaya reformasi kebijakan riset dan inovasi di Jawa Timur belum memiliki arah strategis yang jelas. Tantangan ke depan adalah bagaimana provinsi mampu menyusun kebijakan iptek yang substantif dan terintegrasi, sehingga potensi riset dan inovasi di setiap kabupaten/kota dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan kebutuhan lokal.

C. Kebijakan Riset dan Inovasi di Tingkat Daerah Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto telah memiliki kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan riset dan inovasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto. Di dalam regulasi tersebut, Bapperida secara eksplisit mengemban fungsi di bidang riset dan Inovasi Daerah. Fungsi ini dijalankan melalui bidang riset dan Inovasi Daerah yang bertugas melaksanakan riset dan pengkajian di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, serta inovasi dan teknologi. Kegiatan tersebut mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian, fasilitasi inovasi daerah, diseminasi hasil litbang, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto secara formal telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Sampai saat ini, Kabupaten Mojokerto belum memiliki dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Iptek Daerah (RIPJM) yang komprehensif. Dokumen ini sangat penting sebagai dasar penentuan arah pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat daerah. RIPJM berfungsi sebagai dokumen strategis untuk mengintegrasikan program-program riset dan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sekaligus sebagai pedoman penguatan sistem inovasi daerah (SIDa). Ketidakhadiran RIPJM menyebabkan pengelolaan riset dan inovasi masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi lintas OPD maupun mitra eksternal seperti perguruan tinggi dan dunia usaha. Oleh karena itu, penyusunan RIPJM yang sedang dilakukan saat ini merupakan langkah strategis dalam mendorong reformasi kebijakan iptek di daerah, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan regulasi sektoral maupun lintas sektor ke depan.



Gambar 2.3 Tabel Bagan Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Mojokerto
Sumber: Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2024

2. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi

Dalam konteks penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, keberadaan dan pemanfaatan basis data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses merupakan aspek yang sangat krusial. Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan langkah awal yang progresif dalam hal ini melalui pengembangan Satu Data Palapa, sebuah platform open data daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto. Penyelenggaraan Satu Data Palapa didasarkan pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Satu Data Palapa. Implementasi Satu Data Palapa didasarkan pada visi “Menghasilkan Data yang Terpadu, Berkelanjutan, dan Pasti” serta misi yang menekankan pada pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Penyelenggaraan Satu Data Palapa bertujuan untuk

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
- b. Mewujudkan ketersediaan Data yang terpadu, berkelanjutan, pasti, akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan

Satu Data Palapa secara kelembagaan telah memiliki dukungan regulasi dan kelembagaan yang jelas. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai koordinator teknis pengumpulan, pengelolaan, dan penyebarluasan data sektoral. Tugas dan fungsi ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Adapun tugas dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Mojokerto dijabarkan sebagai berikut

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber; Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang menjadi garda terdepan dalam penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik. Kendati demikian, pelayanan PPID secara daring masih belum optimal, sebagaimana ditunjukkan dari jumlah permintaan informasi yang tinggi namun rasio pemrosesan yang masih rendah melalui situs resmi <https://ppid.mojokertokab.go.id/>. Ini menunjukkan masih terdapat tantangan dalam implementasi pelayanan informasi yang responsif dan digital.

Namun demikian, dari sisi kebijakan strategis, belum terdapat peraturan daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan basis data untuk mendukung riset dan inovasi daerah. Ini menunjukkan bahwa upaya kelembagaan dan teknis belum sepenuhnya dikawal oleh instrumen hukum yang kuat di tingkat legislatif. Ketiadaan perda ini juga berdampak pada belum terbangunnya

sistem interoperabilitas data antarperangkat daerah secara menyeluruh, terutama dalam mendukung program strategis seperti pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), percepatan penyelesaian permasalahan sektoral, dan pembangunan berbasis *data evidence*.

Selain platform Satu Data Palapa dan PPID, berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga telah melakukan pemanfaatan basis data internal untuk mendukung fungsi kerja masing-masing, meskipun belum seluruhnya terhubung dalam satu arsitektur data yang terintegrasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pengembangan riset dan inovasi yang mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi informasi lintas sektor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah memiliki kelembagaan dan infrastruktur awal yang mendukung pengelolaan basis data riset dan inovasi, namun masih terdapat beberapa kelemahan mendasar, terutama terkait kerangka hukum daerah (belum adanya perda), interoperabilitas sistem antar-OPD, dan optimalisasi pelayanan data secara digital. Ke depan, diperlukan langkah strategis berupa: (1) penyusunan dan penetapan Perda tentang basis data riset dan inovasi daerah; (2) penguatan platform Satu Data Palapa agar mendukung kebutuhan riset sektoral; (3) peningkatan kinerja PPID berbasis sistem pelayanan daring; dan (4) penyusunan kebijakan pemanfaatan data untuk mendukung PUD dan penyelesaian masalah strategis daerah secara tepat sasaran dan berbasis bukti.

3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi

Salah satu fondasi penting dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah tersedianya infrastruktur dasar yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil riset. Di Kabupaten Mojokerto, telah terdapat lembaga yang secara struktural menaungi aspek perencanaan dan pengembangan infrastruktur pendukung riset dan inovasi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Kedua lembaga ini telah memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan dan inisiatif-inisiatif berbasis teknologi informasi. Namun demikian, program pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur riset secara eksplisit dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan prioritas daerah belum sepenuhnya tampak, baik dari sisi perencanaan makro maupun implementasi programatik secara konsisten.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan inisiatif dalam memperluas jaringan telekomunikasi dan akses internet, antara lain melalui program “Internet Masuk Desa” dan “Internet Masuk Sekolah”. Meski demikian, tidak terdapat dokumen program formal dan eksplisit yang secara berkelanjutan mendukung konektivitas digital sebagai fondasi riset dan inovasi. Terkait penyedia layanan telekomunikasi, Kabupaten Mojokerto telah dilayani oleh beberapa

operator utama seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, Smartfren, dan penyedia internet berbasis fiber seperti Indihome, Biznet, MyRepublic, dan lainnya. Namun demikian, cakupan dan kualitas jaringan di daerah pedesaan dan wilayah terpencil perlu terus dipantau dan ditingkatkan, karena kesenjangan digital masih menjadi kendala laten dalam penguatan infrastruktur riset yang inklusif.

Adapun dari sisi infrastruktur digital pemerintahan dan sistem informasi, Kabupaten Mojokerto cukup progresif dalam mengembangkan platform-platform berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis data. Beberapa inovasi unggulan yang menjadi bagian dari ekosistem riset dan inovasi daerah antara lain:

Kabupaten Mojokerto telah mengembangkan sejumlah inovasi unggulan berbasis digital sebagai bagian dari penerapan *Smart City*, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendorong transformasi tata kelola pemerintahan:

1) Satu Data Palapa

Merupakan wadah berbagi pakai data yang dapat diakses melalui portal daring, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Platform ini menyediakan data yang komprehensif, mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkup Kabupaten Mojokerto. Dapat diakses melalui laman: <https://satudatapalapa.mojokertokab.go.id>.

2) E-Office (*Electronic Office*)

Aplikasi manajemen administrasi internal Dinas Kominfo berbasis web maupun aplikasi mobile yang mendukung pengelolaan tata kelola pemerintahan secara digital di Kabupaten Mojokerto.

3) Klinik Bisnis *On The Way*

Program pendampingan pelaku UMKM dan calon wirausaha pemula secara jemput bola, yang dilaksanakan secara bergiliran di kantor kecamatan dan destinasi wisata, sebagai inisiatif dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

4) Peta Blok Digital (GI-SEL- *Geographic Information System Electronic Layout*)

Aplikasi sistem informasi geografis untuk pengelolaan data spasial objek pajak (PBB-P2) dalam bentuk peta digital. Terintegrasi dengan SIM-PBB, aplikasi ini mempermudah pemerintah dalam pemutakhiran dan monitoring data objek pajak.

5) Si Panjol *Mobile* (Sistem Informasi Pajak Daerah Online)

Aplikasi berbasis *smartphone* yang memungkinkan wajib pajak untuk melihat informasi, menghitung, melapor, dan melakukan pembayaran pajak daerah secara daring.

6) SIM PKK

Sistem digital yang digunakan untuk menginput dan memantau pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh desa. Aplikasi ini memerlukan pembaruan agar selaras dengan kebijakan terbaru hasil Rakernas PKK tingkat nasional

7) E-Puskesmas

Sistem pencatatan data pasien secara elektronik di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. E-Puskesmas memudahkan monitoring kinerja layanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan melalui data yang bersifat real-time dan berbasis web.

8) SIMPEL KENDOR (Sistem Pelayanan Kendaraan Bermotor)

Merupakan sistem pengujian kendaraan bermotor berbasis aplikasi yang terkoneksi langsung dengan data Kementerian Perhubungan, mendukung efisiensi pelayanan dan transparansi data uji kendaraan.

9) SIM Penataan

Platform pelaporan bagi pelaku usaha atau kegiatan berizin lingkungan di Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan komitmen dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan dokumen lingkungan seperti AMDAL maupun KLHK.

4. Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi

Berdasarkan data APBD Kabupaten Mojokerto tahun berjalan, terlihat bahwa pengalokasian anggaran untuk riset dan inovasi masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Anggaran untuk *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah* hanya sekitar 4,7% dari total APBD, dan dari porsi tersebut, sub kegiatan seperti pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan perundang-undangan hanya memperoleh 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan fiskal terhadap kegiatan riset dan inovasi masih sangat minim dan lebih difokuskan pada belanja rutin atau penunjang urusan pemerintahan yang menyerap lebih dari 63,7% anggaran.

Tabel 2.24 Rencana Kerja dan Pendanaan P-RENJA 2025 BAPPEDA

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran P-APBD	Ket.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota		8,074,896,804	63.7
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000	0.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,500,000	0.1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,500,000	0.0

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,303,647,000	49.8
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,303,647,000	49.8
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,139,775,404	9.0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	813,868,528	6.4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	0.2
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53,488,483	0.4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,250,000	0.0
Penyediaan Bahan / Material	Penyediaan Bahan / Material	145,000,000	1.1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,668,393	0.1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,500,000	0.7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201,500,000	1.6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	24,000,000	0.2
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,500,000	1.4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417,974,400	3.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115,044,892	0.9
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277,999,508	2.2
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,930,000	0.2
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1,207,519,708	9.5
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1,059,269,908	8.4
Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	444,172,308	3.5
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	615,097,600	4.9
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70,525,000	0.6

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70,525,000	0.6
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77,724,800	0.6
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	27,501,300	0.2
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	50,223,500	0.4
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		2,786,522,738	22.0
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	784,520,438	6.2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8,846,700	0.1
			0.0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	300,370,200	2.4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	475,303,538	3.8
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	782,681,250	6.2
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,700,000	0.0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	136,319,850	1.1
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	294,724,000	2.3
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14,518,400	0.1

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		0.0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	333,419,000	2.6
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1,219,321,050	9.6
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15,922,500	0.1
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	753,398,550	5.9
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	450,000,000	3.6
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		599,675,850	4.7
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	105,000,000	0.8
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	105,000,000	0.8
JUMLAH TOTAL PAGU	JUMLAH TOTAL PAGU	12,668,615,100	100.0

Sumber: Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Mojokerto,2025

Selain itu, belum terlihat adanya skema pembiayaan kolaboratif yang melibatkan aktor eksternal seperti perguruan tinggi, dunia usaha, atau lembaga donor. Kegiatan riset dan pengembangan masih dilakukan secara sektoral dan belum mengarah pada pembentukan ekosistem inovasi yang terpadu. Struktur kelembagaan riset di daerah juga masih tergabung dalam kegiatan perencanaan umum, bukan sebagai unit penggerak inovasi yang berdiri secara mandiri, sehingga fungsinya cenderung administratif daripada solutif dalam menjawab persoalan daerah.

Ketidakseimbangan proporsi anggaran ini menandakan perlunya reformasi kebijakan fiskal untuk mendukung transformasi riset dan inovasi sebagai instrumen pembangunan berbasis solusi. Kabupaten Mojokerto membutuhkan kebijakan afirmatif yang menjamin minimal 10% dari belanja pembangunan dialokasikan untuk riset dan pengembangan, serta pembentukan forum riset kolaboratif daerah yang melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas. Di samping itu, perlu diterapkan skema pembiayaan bersama (co-funding) untuk proyek-proyek inovatif yang menjawab

tantangan nyata di lapangan. Reformasi ini penting agar riset dan inovasi tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi menjadi tulang punggung pengambilan keputusan berbasis data dan pengetahuan.

5. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi ekonomi kreatif yang semakin menonjol, terutama melalui sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan produk unggulan daerah berbasis makanan olahan yang sehat dan berdaya saing. Kehadiran pemerintah pusat melalui kegiatan “DJKI Mendengar” pada 10 Oktober 2023 memperkuat perhatian terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai fondasi pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data DJKI, hingga 2023 tercatat 418 permohonan KI dari Mojokerto, terdiri atas 331 merek, 86 hak cipta, dan 1 desain industri. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat—terutama pelaku usaha—yang cukup tinggi terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai jaminan nilai tambah dan daya saing produk.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga telah menginisiasi kebijakan fasilitasi pendaftaran merek dan hak cipta bagi pelaku IKM. Sepanjang 2022 hingga pertengahan 2023, sebanyak 253 pelaku IKM difasilitasi pendaftaran merek dan hak cipta melalui pendanaan APBD. Upaya ini meliputi bimbingan, pendampingan, dan dukungan pembiayaan agar pelaku IKM mampu memenuhi standarisasi produk untuk ekspor. Langkah ini sejalan dengan visi penguatan ekonomi berbasis kreativitas masyarakat dan mendukung keberlanjutan produk unggulan daerah (PUD). Selain itu, kekayaan budaya seperti tarian Bedoyo Majapahit juga didorong untuk dicatatkan hak ciptanya, menegaskan peran warisan budaya sebagai aset ekonomi kreatif dan identitas daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya menyediakan infrastruktur informasi melalui portal SIPELITA (Sistem Pelayanan Informasi Kekayaan Intelektual Kota Mojokerto). Portal ini memuat informasi dasar mengenai berbagai jenis kekayaan intelektual, panduan pendaftaran, serta tautan ke sistem pendaftaran nasional, sehingga memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses pengetahuan awal terkait proses dan manfaat perlindungan HAKI. Keberadaan platform daring ini menunjukkan langkah progresif menuju digitalisasi layanan publik dan menjadi pintu masuk penting bagi masyarakat untuk mengenal perlindungan kekayaan intelektual secara lebih praktis.

Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih perlu diatasi agar perlindungan HAKI di Kabupaten Mojokerto dapat berkembang lebih optimal. Pertama, tingkat kesadaran masyarakat dan UMKM terhadap pentingnya HAKI masih relatif rendah. Banyak pelaku usaha belum memahami nilai strategis merek, paten, atau hak cipta sebagai aset bisnis yang dapat meningkatkan daya tawar produk, akses pembiayaan, dan peluang ekspor. Kedua, pendampingan teknis dan konsultasi hukum masih terbatas. Portal SIPELITA sejauh ini lebih bersifat informatif dan belum

menyediakan mekanisme bimbingan langsung, misalnya layanan konsultasi tatap muka atau pendampingan penuh mulai dari penyusunan dokumen hingga pendaftaran ke DJKI. Ketiga, kendala biaya dan proses administratif sering menjadi hambatan bagi UMKM yang sebagian besar memiliki kapasitas finansial terbatas. Tidak sedikit pelaku usaha yang menilai pendaftaran HAKI membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan keuntungan jangka pendek.

Selain itu, integrasi perlindungan HAKI ke dalam kebijakan riset dan inovasi daerah masih belum menyeluruh. Walaupun Kabupaten Mojokerto memiliki potensi besar di sektor kuliner, kerajinan, dan industri kreatif, belum ada regulasi atau program daerah yang secara khusus mewajibkan atau mendorong setiap produk inovatif untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini mengakibatkan banyak produk lokal yang telah dikenal luas, seperti makanan khas, batik, atau kerajinan, tidak memiliki perlindungan hukum memadai, sehingga rawan ditiru atau dipatenkan pihak lain di luar daerah.

2.2.2 Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

1. Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah Dengan Pemangku Kepentingan

Ketersediaan platform kolaborasi menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Mojokerto. Saat ini, fungsi orkestrasi kebijakan riset dan inovasi dijalankan oleh Bappeda melalui Bidang Litbang, yang memiliki peran strategis dalam merancang program berbasis data dan menjalin sinergi antar-pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Bappeda tidak hanya bertindak sebagai perumus kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator keterlibatan aktor lain seperti OPD teknis, perguruan tinggi, pelaku industri, komunitas masyarakat, serta lembaga litbang. Selain Bappeda, Diskominfo turut berperan dalam aspek perencanaan dan dukungan infrastruktur digital—terutama dalam menyiapkan sistem informasi, basis data sektoral, dan jaringan komunikasi yang mendukung integrasi kerja sama riset lintas sektor. Ketersediaan data dan sistem informasi yang terpusat dan dapat diakses berbagai pemangku kepentingan menjadi prasyarat penting dalam kolaborasi riset yang berbasis *evidence*.

Namun demikian, saat ini Kabupaten Mojokerto belum memiliki satu wadah/platform kolaborasi riset yang terintegrasi secara formal, seperti *Forum Inovasi Daerah (FID)* atau *Science and Techno Park (STP)* yang bisa menjembatani komunikasi, pertukaran pengetahuan, serta pelaksanaan riset bersama. Kerja sama riset atau kajian selama ini lebih banyak bersifat sektoral dan tidak tersinergi dalam satu ekosistem kelembagaan yang kuat. Beberapa bentuk kerja sama riset yang tercatat adalah hasil inisiatif OPD teknis dengan universitas secara *ad hoc*, seperti studi perencanaan wilayah, kajian potensi ekonomi lokal, hingga evaluasi program pembangunan. Sayangnya, inisiatif ini belum dibangun dalam suatu sistem yang bersifat berkelanjutan dan saling melengkapi.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Tabel 2.25 Daftar Kajian / Dokumen Bidang PPM

No	TAHUN	NAMA PAKET	PENYEDIA	ANGGARAN
1	2022	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kesehatan - Penyusunan Dokumen Evaluasi Kab. Sehat	PT. CEMERLANG STATISTIKA INDONESIA	75,662,000
2	2022	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kesehatan - Penyusunan Profil Kab. Sehat	Amerta Paradina Indonesia	59,388,100
3	2022	Penyusunan Dokumen Evaluasi PUG	CV. Visidata Teknologi Indonesia	75,662,000
4	2022	Penyusunan Profil PUG	CV. Visidata Teknologi Indonesia	52,390,180
5	2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kesehatan- Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Anggaran KLA	CV. Esa Digital Talenta	75,662,000
6	2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kesehatan- Penyusunan Dokumen Profil KLA	CV. Esa Digital Talenta	63,485,000
7	2022	Reviu Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA)	PT. MAHATMA JAYA MULYA	74,828,850
8	2022	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Semester I)	CV. AMERTA PARADINA INDONESIA	27,314,300
9	2022	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Semester II)	CV. AMERTA PARADINA INDONESIA	27,314,300
10	2022	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD)	CV. GAMATIM KONSULTAN	51,870,700
11	2022	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah	CV. GAMATIM KONSULTAN	52,239,200
12	2022	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kebijakan PPRG	PT. MAHATMA JAYA MULYA	83,478,600

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No	TAHUN	NAMA PAKET	PENYEDIA	ANGGARAN
13	2022	Penyusunan Dokumen Analisis Indeks Kesalehan Sosial	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November	73,600,000
14	2022	Penyusunan Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November	73,600,000
15	2022	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pemantauan Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan SDG's	PT. Cemerlang Statistika Indonesia	69,600,000
16	2022	Penyusunan Buku Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Tahun 2022	CV. Amerta Paradina Indonesia	30,000,000
17	2023	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kabupaten Sehat	PT. CEMERLANG STATISTIKA INDONESIA	64,375,782
18	2023	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya	64,979,400
19	2023	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Anggaran KLA	Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya	65,689,800
20	2023	Penyusunan Reviu Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya	65,423,400
21	2023	Penyusunan Reviu Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya	64,217,940
22	2023	Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD)	CV. GAMATIM KONSULTAN	64,979,400
23	2023	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah	CV. GAMATIM KONSULTAN	64,646,400
24	2023	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan Dokumen Evaluasi SDG's)	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November	61,988,505
25	2023	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan Dokumen IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama))	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November	77,809,335

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No	TAHUN	NAMA PAKET	PENYEDIA	ANGGARAN
26	2023	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan Dokumen IKS (Indeks Kesalehan Sosial))	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November	77,809,335
27	2023	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah)	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November	49,840,110
28	2023	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November	52,109,838

Sumber: Bapperida Kabupaten Mojokerto, 2025

Meskipun kolaborasi sporadis telah terjadi antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan beberapa perguruan tinggi atau lembaga penelitian (contoh: Universitas Brawijaya, ITS, Unair), belum tersedia program berkelanjutan yang secara eksplisit dimaksudkan untuk mempertemukan pemangku kepentingan dalam riset berbasis permasalahan daerah (*problem-driven research*).

Tidak tersedia pula struktur pendanaan khusus atau skema hibah riset daerah yang dapat mendanai kolaborasi riset lintas sektor. Hal ini menyebabkan banyak potensi lokal, termasuk dari perguruan tinggi yang berada di wilayah sekitar Mojokerto, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelesaian masalah pembangunan daerah. Di sisi lain, OPD teknis sebenarnya telah menyelenggarakan beberapa kegiatan kajian, misalnya:

- Dinas Kesehatan melibatkan pihak universitas dalam studi perencanaan fasilitas layanan kesehatan.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjalin kemitraan dengan penyuluh dan akademisi dalam penguatan kelembagaan petani.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemetaan UMKM bersama pihak eksternal, meski masih bersifat proyek jangka pendek.

Namun, inisiatif ini belum dibingkai dalam satu narasi strategis kolaborasi riset daerah. Diperlukan transformasi dari pola kerja sektoral menjadi sistem kerja berbasis kolaborasi jangka menengah-panjang, yang melibatkan pemangku kepentingan dari unsur pentahelix: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media/teknologi.

2. Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi Daerah yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Daerah

Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi merupakan elemen krusial dalam memperkuat kapasitas daerah untuk mengembangkan Produk Unggulan Daerah (PUD)

dan menjawab berbagai Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD). Kabupaten Mojokerto, sebagai wilayah yang sedang bertransformasi dalam berbagai sektor pembangunan, menghadapi tantangan dalam menyediakan sarana riset dan inovasi yang memadai dan berkelanjutan.

Secara umum, beberapa aset fisik yang dapat dijadikan dasar pengembangan riset dan inovasi sebenarnya telah tersedia di daerah, seperti balai latihan kerja, gedung pelatihan milik pemerintah, ruang kreatif komunitas, dan fasilitas pendidikan vokasi. Namun demikian, aset-aset tersebut belum secara maksimal difungsikan untuk mendukung kegiatan riset terapan, pengembangan teknologi tepat guna, atau hilirisasi inovasi daerah. Kolaborasi yang ada masih bersifat sektoral dan sporadis, seperti pelatihan teknis atau workshop keterampilan, dan belum menyentuh aspek riset kolaboratif atau pengembangan produk berbasis data dan teknologi.

Di sisi kebijakan, belum terdapat regulasi maupun arah kebijakan eksplisit yang menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sebagai pusat riset dan inovasi di Kabupaten Mojokerto. Hal ini menyebabkan pemanfaatan aset publik belum terarah pada upaya penguatan ekosistem riset secara sistematis. Belum adanya program inkubasi bisnis, taman sains (*science-tech park*), atau pusat kolaborasi inovasi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan lokal juga menunjukkan bahwa riset dan inovasi belum menjadi bagian dari strategi utama pembangunan daerah.

Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sarana baru. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendekatan yang adaptif dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, membangun skema kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, sektor swasta, maupun komunitas inovator lokal. Kunci dari penguatan penyediaan sarana ini adalah adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk mendorong konversi atau penguatan fungsi aset yang sudah ada sebagai bagian dari sistem pendukung riset dan inovasi.

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Mojokerto memiliki dasar potensial dalam bentuk aset dan sumber daya lokal, namun belum terdapat upaya yang terstruktur dalam menjadikan sarana tersebut sebagai bagian dari ekosistem riset dan inovasi daerah. Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat dan berorientasi jangka panjang, termasuk dukungan lintas OPD dan penguatan kolaborasi multipihak agar riset dan inovasi dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah.

2.2.3 Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi

Difusi inovasi adalah proses penyebaran suatu inovasi kepada anggota sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu dalam rentang waktu tertentu. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana inovasi, baik berupa teknologi, metode kerja baru, atau kebijakan daerah, dapat diadopsi secara luas untuk mendorong perubahan positif dan menyelesaikan permasalahan prioritas daerah.

Mengacu pada teori Everett M. Rogers, terdapat empat elemen utama dalam proses difusi inovasi, yaitu: (1) Inovasi, (2) Saluran Komunikasi, (3) Jangka Waktu, dan (4) Sistem Sosial. Keempat elemen ini membentuk dasar analisis dalam merancang strategi penyebaran inovasi yang efektif di suatu daerah. (Dewi Ariningrum Rusmiarti, 2015). Untuk mengukur sejauh mana difusi inovasi berjalan secara efektif, digunakan dua kriteria utama:

- Pemenuhan aspek difusi inovasi
- Pemenuhan kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi

a. Inovasi

Kabupaten Mojokerto telah memiliki berbagai bentuk inovasi di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan UMKM. Sejumlah OPD seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Disperindag telah mengembangkan program inovatif seperti aplikasi layanan kesehatan, pelatihan digital marketing untuk pelaku UMKM, dan e-kinerja ASN. Namun, sebagian besar inovasi masih bersifat internal dan belum sepenuhnya melibatkan kemitraan riset atau evaluasi dampak jangka panjang. Inovasi yang dikembangkan belum selalu direplikasi atau diadopsi oleh wilayah lain di dalam kabupaten.

b. Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi yang tersedia untuk menyebarkan inovasi masih terbatas dan belum terstruktur secara kolaboratif. Website resmi OPD, media sosial pemerintah, serta forum musrenbang menjadi media utama penyampaian inovasi, namun masih bersifat satu arah dan kurang partisipatif. Belum terdapat forum inovasi lintas sektor atau dashboard digital terbuka yang bisa menghubungkan inovator, pemerintah, dan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan inovasi yang ada sulit tersebar secara merata di kalangan komunitas atau desa lainnya. Saluran komunikasi yang efektif seperti media komunitas, kampanye digital inovasi, atau dialog publik masih sangat terbatas.

c. Jangka Waktu

Difusi inovasi di Mojokerto sebagian besar terjadi dalam jangka waktu pendek, tergantung pada masa program atau anggaran proyek. Belum banyak inovasi yang memiliki strategi keberlanjutan jangka menengah hingga panjang. Misalnya, program pelatihan atau inkubasi hanya berlangsung satu kali tanpa pendampingan lanjutan atau mekanisme pembelajaran terus-menerus. Tidak semua inovasi memiliki siklus hidup (*life cycle*) yang terdokumentasi, sehingga sulit untuk mengukur adopsi, adaptasi, atau dampaknya dalam jangka waktu lebih panjang.

d. Sistem Sosial

Sistem sosial yang ada di Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sebagai penggerak difusi inovasi, terutama melalui peran kepala desa, tokoh masyarakat,

dan komunitas lokal. Namun, keterlibatan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan dalam proses difusi masih rendah. Inovasi cenderung terpusat di lingkup OPD dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai *co-creator*. Selain itu, struktur sosial yang bersifat hierarkis di beberapa wilayah menyebabkan adopsi inovasi hanya berlangsung jika didorong oleh figur otoritatif. Keterbukaan sistem sosial terhadap perubahan dan pembaruan juga bervariasi antar wilayah.

2.2.4 Budaya Riset dan Inovasi

1. Promosi dan Kampanye Inovasi

Promosi dan kampanye inovasi merupakan elemen strategis dalam membangun budaya inovasi daerah, memperluas jangkauan difusi inovasi, serta mendorong partisipasi lintas sektor. Di Kabupaten Mojokerto, upaya promosi dan kampanye inovasi telah mulai diarahkan untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan penyelesaian permasalahan prioritas daerah, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi strategi komunikasi dan kesinambungan program. Kabupaten Mojokerto telah memiliki sejumlah kanal informasi yang digunakan untuk menyampaikan hasil, proses, dan peluang pengembangan inovasi, di antaranya:

- Website Bappeda Kabupaten Mojokerto (bappeda.mojokertokab.go.id) secara berkala memuat berita, dokumentasi, serta publikasi kegiatan inovasi seperti pelatihan desa inovatif, lomba inovasi pelayanan publik, dan pendampingan UMKM.
- Portal Satu Data Palapa sebagai integrator data dan informasi program pembangunan daerah, termasuk indikator kinerja inovasi dan data sektoral.
- Media sosial resmi OPD, seperti Instagram dan YouTube milik Diskominfo dan Bappeda, digunakan untuk mengangkat praktik-praktik baik inovasi, seperti digitalisasi pelayanan desa, pelatihan produk olahan, dan teknologi lingkungan skala kecil.
- Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIDa) sebagai instrumen pelaporan dan dokumentasi inovasi daerah yang dikembangkan seiring penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Namun, sebagian besar saluran komunikasi ini masih bersifat one-way communication (monologis) dan belum sepenuhnya bersifat dialogis atau interaktif. Forum diskusi lintas sektor seperti Mojokerto Innovation Forum atau ruang kolaborasi daring lintas komunitas belum dikembangkan secara maksimal. Upaya promosi inovasi di Mojokerto telah berjalan melalui beberapa program terjadwal, di antaranya:

- Lomba Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan setiap tahun oleh Bappeda dan Inspektorat, menciptakan ruang publikasi hasil inovasi di tingkat OPD maupun desa.

- Pelatihan Inovasi UMKM dan Teknologi Tepat Guna oleh Disperindag dan Dinas Koperasi, yang juga dipublikasikan secara berkala dalam kanal berita resmi maupun media sosial.
- Sosialisasi SPBE dan Bimbingan Teknis Digitalisasi Layanan di desa/kelurahan, sebagai kampanye tidak langsung untuk inovasi digitalisasi layanan masyarakat

2. Apresiasi Prestasi Inovasi

Apresiasi terhadap prestasi inovasi di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim kerja yang mendukung semangat berinovasi, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan budaya inovatif melalui partisipasi aktif dalam berbagai ajang penghargaan inovasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Salah satu bentuk nyata apresiasi adalah partisipasi Kabupaten Mojokerto dalam Kompetisi Inovasi Daerah (KID) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Melalui kompetisi ini, beberapa inovasi unggulan yang dikembangkan oleh perangkat daerah, seperti inovasi digitalisasi layanan publik, program pelayanan kependudukan berbasis sistem informasi, serta inovasi ketahanan pangan telah mendapatkan pengakuan dan menjadi representasi semangat transformasi birokrasi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga pernah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Mojokerto atas keberhasilannya mengembangkan inovasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi desa dan pendidikan inklusif. Apresiasi dari pihak eksternal ini menjadi validasi bahwa inovasi yang dikembangkan telah menjawab kebutuhan lokal secara tepat guna.

Di tingkat internal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai memberikan penghargaan kepada perangkat daerah dan aparatur yang berhasil menciptakan inovasi layanan publik. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk motivasi sekaligus dorongan agar inovasi yang dihasilkan tidak bersifat sporadis, namun bisa direplikasi secara berkelanjutan. Meskipun demikian, sistem apresiasi yang bersifat insentif atau berbasis kinerja inovatif masih tergolong terbatas. Belum semua inovator mendapatkan dukungan pembiayaan atau fasilitasi pengembangan lanjutan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan inovasi daerah. Secara umum, praktik apresiasi inovasi di Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan baik melalui berbagai bentuk pengakuan, namun ke depan perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna mendorong tumbuhnya inovasi yang berdampak luas dan menyeluruh dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

3. Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset

Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di Kabupaten Mojokerto masih berada pada tahap embrionik. Secara umum, ekosistem wirausaha lokal

telah tumbuh cukup dinamis melalui kehadiran ribuan pelaku UMKM dan IKM yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari olahan pangan, kerajinan, hingga manufaktur berbasis bahan baku lokal. Namun, transformasi dari usaha kecil konvensional menjadi perusahaan pemula berbasis riset (research-based startup) masih terbatas, mengingat minimnya inkubasi bisnis yang fokus pada riset terapan maupun hilirisasi teknologi. Hingga saat ini, pusat pengembangan wirausaha di Mojokerto lebih banyak didorong oleh program pendampingan UMKM yang menekankan aspek manajemen usaha, pemasaran, dan perizinan. Fasilitas pemerintah daerah seperti aplikasi Pengusaha Keren, program sertifikasi halal, maupun bantuan pameran produk telah membantu meningkatkan daya saing pelaku usaha. Namun, pendekatan berbasis riset untuk menghasilkan produk inovatif yang berakar dari hasil penelitian perguruan tinggi, SMK unggulan, atau balai pelatihan teknis, masih jarang terwujud dalam bentuk startup yang berorientasi pada teknologi dan inovasi.

Potensi sebenarnya cukup besar jika melihat sumber daya riset yang tersedia di Mojokerto. Kehadiran SMK berfokus teknologi, lembaga pelatihan kerja, serta dukungan riset dari perguruan tinggi sekitar (seperti Unim, UTM, maupun perguruan tinggi di Surabaya) membuka peluang terbentuknya perusahaan pemula berbasis riset di bidang pangan fungsional, teknologi pengolahan hasil pertanian, maupun teknologi informasi. Namun, keterhubungan antara lembaga pendidikan, dunia riset, dan dunia usaha (triple helix) masih lemah, sehingga hasil riset sering berhenti pada skala prototipe tanpa keberlanjutan menjadi usaha komersial. Selain itu, akses permodalan dan investasi juga menjadi hambatan. Sebagian besar pelaku usaha pemula di Mojokerto masih mengandalkan modal pribadi atau bantuan pemerintah dalam skala kecil. Belum ada skema khusus yang mendorong hadirnya venture capital, angel investor, maupun dana inovasi daerah yang dapat menumbuhkan perusahaan berbasis riset. Akibatnya, wirausaha muda cenderung memilih jalur usaha konvensional yang lebih cepat menghasilkan pendapatan, ketimbang mengembangkan startup berbasis teknologi yang membutuhkan waktu dan modal lebih besar.

Meski demikian, terdapat indikasi awal tumbuhnya minat generasi muda Mojokerto untuk merintis usaha berbasis riset, terutama di sektor pangan sehat, produk herbal, serta digital service. Beberapa SMK dan komunitas inovasi lokal mulai melatih siswa untuk menghasilkan produk inovatif yang dipasarkan secara digital, meskipun belum dikategorikan sebagai startup riset secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa benih-benih perusahaan pemula berbasis riset sebenarnya mulai berkembang, namun masih membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi tantangan dalam aspek inkubasi bisnis, keterhubungan riset dengan pasar, serta akses pendanaan inovasi.

RIPJPID ke depan perlu mengarahkan strategi penguatan inkubator bisnis riset, memperluas jejaring dengan perguruan tinggi dan dunia industri, serta mendorong skema pembiayaan inovasi daerah. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan, Mojokerto berpotensi menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat lokal, tetapi juga menembus pasar nasional maupun global.

4. Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat

Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan komitmen dalam mendorong pengelolaan kekayaan intelektual serta pelestarian pengetahuan lokal masyarakat melalui keberadaan unit kerja yang memiliki tanggung jawab terhadap inventarisasi dan fasilitasi perlindungan pengetahuan serta teknologi masyarakat. Hal ini tercermin dari peran aktif beberapa perangkat daerah seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bappedalitbang yang mendukung identifikasi, pembinaan, dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk pada produk UMKM, hasil inovasi lokal, dan potensi budaya. Di sisi lain, aspek pengembangan teknologi masyarakat juga didukung melalui program inovasi desa dan platform data terbuka berbasis Satu Data Palapa yang memungkinkan pendataan berbasis komunitas untuk mendorong pengambilan kebijakan berbasis pengetahuan lokal. Meski demikian, sistem pencatatan pengetahuan tradisional dan teknologi tepat guna masyarakat masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam kebijakan perlindungan dan pengembangan inovasi daerah.

2.2.5 Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Sub-ekosistem keterpaduan riset dan inovasi di Kabupaten Mojokerto menunjukkan perkembangan yang cukup positif dengan adanya upaya kelembagaan dan perencanaan yang mulai terintegrasi. Pemerintah daerah telah menyediakan wadah khusus berupa portal RESIMOJO yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi riset serta inovasi, sekaligus menjadi instrumen monitoring dan evaluasi terhadap capaian penelitian dan pengembangan di daerah. Keberadaan portal ini memperkuat implementasi kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2021–2026 serta Renstra Bappeda, yang secara eksplisit menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Selain itu, dalam Kabupaten Mojokerto terdapat beberapa perguruan tinggi lokal yang secara langsung berkontribusi pada ekosistem riset dan inovasi. Beberapa di antaranya adalah Politeknik Kesehatan Majapahit (fokus vokasi kesehatan seperti kebidanan dan keperawatan), Universitas Islam Majapahit, STIKES Majapahit, STIE Darul Falah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet, dan STAI Nurul Islam Pungging. Perguruan tinggi ini memiliki keunggulan

kompetensi lokal dan budaya yang relevan untuk mendukung riset terapan daerah, pengembangan SDM, serta pengabdian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Meskipun demikian, kondisi eksisting masih menghadapi sejumlah tantangan. Data riset dan inovasi yang terkumpul belum sepenuhnya tersentralisasi dan distandardisasi, sehingga kualitas informasi dan pemanfaatannya masih terbatas. Kapasitas riset terapan di kalangan pelaku usaha mikro juga masih rendah karena keterbatasan fasilitas laboratorium, pendampingan teknis, serta akses pembiayaan riset. Sementara itu, ketersediaan sumber daya manusia peneliti maupun pengelola inovasi di OPD dan lembaga pendidikan lokal masih perlu diperkuat, baik dalam hal kompetensi manajerial riset, penyusunan proposal, maupun perlindungan kekayaan intelektual. Tantangan lain yang juga penting adalah lemahnya mekanisme pembiayaan dan komersialisasi, yang mengakibatkan banyak hasil riset belum berkembang menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Secara keseluruhan, gambaran kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah memiliki fondasi untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang terpadu, namun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kapasitas SDM, menyediakan skema pembiayaan inovasi, serta mendorong integrasi riset ke dalam program pembangunan daerah. Upaya tersebut akan semakin memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Mojokerto ke depan.

Pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan dinamika yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengidentifikasi, memfasilitasi, sekaligus memperluas jangkauan pasar produk unggulan lokal. Produk-produk yang lahir dari industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah berhasil dipromosikan ke pasar modern dan difasilitasi agar memiliki legalitas usaha serta perlindungan hak merek. Misalnya, sejumlah produk seperti Jamur Crispy Arifah Jaya, Keripik Pisang Pugeran, Bolu Kering, hingga Tempe Sagu Gunung Lirang telah resmi dipasarkan melalui jaringan toko modern, menunjukkan adanya upaya konkret dalam memperluas distribusi produk unggulan.

Inovasi dalam aspek pemasaran juga mendapat perhatian serius. Aplikasi Tumbas (Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas) menjadi salah satu instrumen penting yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Platform digital ini mempermudah masyarakat dalam mengakses dan membeli produk unggulan lokal, sekaligus membantu pelaku IKM/UMKM memperluas pasar. Keberhasilan Tumbas yang meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 2024 dari

Kementerian PAN-RB menjadi bukti adanya pengakuan nasional terhadap praktik baik inovasi daerah di sektor ini. Selain itu, Pemkab juga meluncurkan aplikasi Pengusaha Keren yang berfungsi memfasilitasi pelaku usaha dalam proses legalisasi, sertifikasi produk, hingga konsultasi pengembangan industri. Kedua inovasi digital ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang mendukung klaster produk unggulan. Di tingkat akar rumput, kreativitas masyarakat dalam menciptakan produk baru berbasis potensi lokal juga cukup menonjol. Beberapa desa telah mengembangkan inovasi berbahan baku lokal, misalnya pengolahan jamur tiram menjadi nugget, bakso, dan camilan kriuk; pemanfaatan tebu menjadi minuman modern Ngestebu dengan varian rasa; hingga optimalisasi potensi kuliner dan herbal melalui branding ulang serta penggunaan platform digital untuk pemasaran. Pendampingan akademisi dalam kegiatan pengabdian masyarakat turut memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal dalam hal diversifikasi produk, desain kemasan, serta manajemen usaha.

Meskipun demikian, ekosistem klaster inovasi berbasis produk unggulan di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi sejumlah tantangan. Skala klaster relatif kecil dan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga potensi sinergi antarpelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia industri, dan pemerintah daerah belum maksimal. Keterbatasan dalam aspek branding, promosi digital, kemampuan produksi massal, hingga akses pasar berskala nasional dan internasional menjadi faktor yang masih harus diperkuat. Di sisi lain, keterhubungan antara riset akademik dengan kebutuhan inovasi produk lokal masih belum optimal, sehingga hasil penelitian sering kali belum terimplementasikan secara luas di sektor UMKM/IKM. Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Mojokerto dalam konteks penyelenggaraan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, ditandai dengan lahirnya berbagai produk unggulan, pengakuan di tingkat nasional, serta dukungan pemerintah daerah melalui platform digital dan fasilitasi legalitas. Namun, keberlanjutan pengembangan klaster inovasi memerlukan penguatan jejaring riset, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta strategi kolaborasi lintas aktor agar produk unggulan Mojokerto tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

2.2.6 Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan kemajuan penting dalam upaya menyelaraskan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan dinamika global. Pemerintah daerah telah membangun infrastruktur kelembagaan dan digital yang menjadi fondasi integrasi lokal ke tren global, antara lain melalui pengembangan portal riset daerah (RESIMOJO) serta platform layanan publik dan pemasaran produk lokal seperti Tumbas dan SuperApps yang memfasilitasi penetrasi produk unggulan ke pasar digital. Inisiatif lain, seperti aplikasi Pengusaha Keren, memperlihatkan perhatian terhadap aspek

legalitas dan standarisasi usaha—prasyarat dasar bagi pelaku IKM/UMKM untuk mengakses rantai pasok modern dan menjalani proses pendampingan menuju kepatuhan mutu dan merek dagang. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menempatkan Mojokerto pada lintasan digitalisasi dan formalitas usaha yang sejalan dengan praktik terbaik global dalam pemberdayaan usaha kecil menengah. Meskipun ada kemajuan infrastruktur dan praktik pelayanan publik digital, penyelarasan penuh dengan perkembangan global belum sepenuhnya tercapai. Skala produksi banyak pelaku IKM masih terbatas, kapasitas pemenuhan standar mutu ekspor (mis. SNI, HACCP, sertifikasi halal) belum merata, dan fasilitas pengujian serta hilirisasi teknologi yang mendukung peningkatan mutu produk belum tersebar secara memadai. Selain itu, adopsi teknologi produksi modern, integrasi rantai pasok untuk e-fulfillment, serta praktik green production yang kini menjadi nilai tambah dalam perdagangan internasional masih memerlukan percepatan. Keterbatasan pembiayaan untuk tahap hilirisasi dan akses ke jejaring riset internasional juga menjadi hambatan signifikan bagi proses transformasi produk unggulan lokal menjadi komoditas yang kompetitif di pasar regional maupun global.

Perkembangan riset dan inovasi di Kabupaten Mojokerto tidak bisa dilepaskan dari dinamika isu-isu internasional yang memengaruhi arah pembangunan daerah. Isu-isu global seperti perubahan iklim, transisi energi, keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, serta disrupsi teknologi digital dan kecerdasan buatan semakin menuntut daerah untuk lebih adaptif. Kepedulian terhadap isu ini sudah mulai terlihat dalam berbagai inisiatif kebijakan maupun praktik yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal.

Dari sisi lingkungan dan keberlanjutan, terdapat kecenderungan pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan dan relatif berkelanjutan, seperti pengembangan produk berbasis jamur, tebu, serta hasil pertanian organik. Hal ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya green economy dan sustainable production. Namun, adopsi strategi green branding dan penerapan standar lingkungan internasional (misalnya ISO 14001, eco-label, atau sertifikasi karbon) masih sangat terbatas di Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepedulian terhadap isu keberlanjutan mulai tumbuh, penerjemahan ke dalam standar dan praktik yang diakui global masih perlu diperkuat.

Pada aspek ketahanan pangan dan kesehatan, isu internasional mengenai keamanan pangan, pencegahan stunting, serta standar mutu gizi juga turut memengaruhi arah kebijakan riset lokal. Beberapa riset terapan tentang pengolahan pangan sehat, diversifikasi bahan pangan, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian telah dilakukan di Mojokerto, baik oleh perguruan tinggi maupun komunitas riset daerah. Meski demikian, keterhubungan hasil riset tersebut dengan standar global pangan aman (HACCP, Codex Alimentarius) dan pasar internasional masih lemah.

Sementara itu, disrupsi teknologi digital juga menjadi isu global yang relevan dengan Mojokerto. Transformasi digital yang diwujudkan melalui aplikasi Tumbas, Super

Apps Mojosakti, dan Pengusaha Keren menunjukkan adanya respon daerah terhadap tantangan era digital dan e-commerce. Inovasi ini membuktikan adanya kepedulian terhadap tren global berupa digitalisasi pasar dan layanan publik. Namun, adopsi teknologi frontier seperti big data analytics, Internet of Things (IoT), atau kecerdasan buatan dalam mendukung riset, pemasaran, maupun manajemen produksi belum terlihat secara signifikan.

Selain itu, isu kolaborasi global dan jejaring riset internasional juga masih menjadi tantangan. Meskipun ada inisiatif untuk membuka ruang kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan mitra nasional, implementasi kerja sama internasional yang konkret masih terbatas. Padahal, isu-isu global seperti transisi energi, inovasi bioteknologi, dan circular economy memerlukan keterhubungan langsung dengan jejaring pengetahuan global agar daerah tidak tertinggal. Secara umum, ekosistem riset dan inovasi Mojokerto sudah mulai memperlihatkan kepedulian terhadap isu internasional, namun masih dominan pada tahap pengakuan dan inisiatif awal. Upaya penerjemahan isu-isu global menjadi kebijakan lokal, standar produk, maupun aktivitas riset aplikatif masih memerlukan penguatan.

2.3 Tema Prioritas Riset dan Inovasi

Penentuan produk unggulan di Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui berbagai kriteria yang menyeluruh. Langkah pertama adalah analisis Location Quotient (LQ), yang membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto dengan PDRB Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menunjukkan keunggulan kompetitif di Kabupaten Mojokerto dibandingkan rata-rata provinsi. Selanjutnya, digunakan metode analisis shift share dengan menggunakan data PDRB dari Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi perubahan kinerja sektor ekonomi dan sejauh mana sektor tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tahap terakhir melibatkan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan sektor industri dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar. Dengan metode yang menyeluruh ini, diharapkan identifikasi produk unggulan Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan secara tepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

A. Penentuan Usulan Produk Unggulan Daerah

Penentuan usulan produk unggulan daerah dilakukan melalui perbandingan hasil dari berbagai analisis yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share, serta telaah terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang relevan. Analisis LQ berperan dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan skala regional maupun nasional. Sementara itu, analisis Shift Share memberikan

gambaran mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan membaginya ke dalam komponen pertumbuhan nasional, pertumbuhan industri, dan pertumbuhan regional. Selain itu, kajian terhadap dokumen perencanaan seperti Rencana Pengembangan Industri Kabupaten. Dengan menggabungkan hasil dari ketiga pendekatan tersebut, produk unggulan daerah yang diusulkan diharapkan tidak hanya memiliki daya saing dan nilai ekonomi tinggi, tetapi juga selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang di tingkat lokal. Rincian hasil analisis produk unggulan daerah Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.26 Analisis Sektor Unggulan Daerah Kabupaten Mojokerto

Kategori PDRB Lapangan Usaha	LQ	SSA	RPI	Total
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	1	0	1
(B) Pertambangan dan Penggalan	0	1	0	1
(C) Industri Pengolahan	1	1	1	3
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	0	0
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0	1	0	1
(F) Konstruksi	0	0	0	0
(G) Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0	0	0	0
(H) Transportasi dan Pergudangan	0	1	0	1
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	0	0	0
(J) Informasi dan Komunikasi	1	0	0	1
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0
(L) Real Estate	0	0	0	0
(M,N) Jasa Perusahaan	0	1	0	1

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0
(P) Jasa Pendidikan	0	0	0	0
(Q)Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	1	0	1
(R,S,T,U) Jasa Lainnya	0	0	0	0

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Seluruh analisis pada tiap sektor diberikan skor 1 atau 0, skor 1 bermakna hasil analisis yang positif dan berpotensi menjadi produk unggulan daerah sedangkan skor 0 menunjukkan hasil yang berlawanan. Usulan produk unggulan daerah ditentukan berdasarkan skor kumulatif dari hasil analisis. Sektor dengan skor total lebih dari 1 dapat dikategorikan sebagai produk unggulan daerah dan layak untuk dianalisis lebih lanjut agar dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis produk unggulan daerah, sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan daerah yang mana di dalamnya terdapat industri tekstil dan alas kaki, industri kertas, industri farmasi, obat kimia, dan tradisional, industri barang dan karet dari plastik, industri peralatan listrik, industri mesin dan perlengkapan, industri barang modal, komponen, dan bahan penolong, industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu, industri kimia dasar, industri pengolahan barang galian bukan logam, dan industri pengolahan logam dasar. Sektor industri pengolahan memiliki nilai LQ paling tinggi dibandingkan sektor lain tetapi jika dibandingkan dengan regional shift share sektor industri pengolahan lebih rendah daripada sektor pertambangan dan penggalian, dan dalam tipologi klassen sektor industri pengolahan merupakan sektor paling unggul. Adapun subsektor unggulan berada di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.27 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Subsektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto (Miliar rupiah)

Subsektor Industri Pengolahan	Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Mojokerto	
	2022	2023	2022	2023
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	1.190	1.206	0	0
Industri Makanan, Minuman, dan Pengolahan Tembakau	316.903	331.072	12.314	15.137
Industri Tekstil, Pakaian Jadi, kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	14.655	15.088	363	522
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan gabus, Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, Furnitur, dan sejenisnya	31.576	31.755	811	1.092

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Industri Kertas, Barang dari Kertas, Percetakan, dan Penerbitan	27.031	27.647	3.681	4.585
Industri Kimia, farmasi, Obat Tradisional, Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	72.217	76.185	3.542	4.192
Industri Barang Galian bukan Logam	21.358	22.123	1.861	3.370
Industri Logam Dasar	25.240	25.859	4.854	5.922
Industri Barang Logam	17.698	18.687	0	0
Industri Mesin, Perlengkapan, dan Alat Angkutan	4.597	4.807	35	38
Industri Pengolahan lainnya	4.080	4.024	230	232
Total PDRB Sektor Industri Pengolahan	536.544	558.452	27.691	35.090

Sumber: Dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Mojokerto, 2024

Berdasarkan kajian weighted Scoring Model, terdapat 6 subsektor basis, berdaya saing, dan tumbuh cepat yakni Industri makanan, minuman, pengolahan tembakau, Industri kertas, barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan, Industri kimia, farmasi, obat, tradsional, karet, barang dari karet, dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri logam dasar, industry pengolahan lainnya Adapun dari subsektor tersebut, terdapat produk unggulan prioritas yang diukur berdasarkan potensi pasar, keunikan produk, dukungan infrastruktur, ketersediaan bahan baku, dan kendala usaha yang mana tertera di bawah ini, yakni:

1. Industri Makanan, Minuman, dan Pengolahan Tembakau

Berdasarkan hasil kajian, terdapat sembilan produk unggulan prioritas dalam subsektor industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau. Produk unggulan prioritas pada subsektor ini adalah kerupuk/kerecek rambak sapi, keripik singkong, onde-onde, sambel wader, kerupuk samiler, kue koyah, tape ketan hitam, kerupuk petulo, dan telur asin/telur asin asap. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan kekayaan kuliner dan tradisi lokal Kabupaten Mojokerto, tetapi juga memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Setiap produk yang terpilih menunjukkan kekuatan dalam beberapa aspek penilaian, seperti potensi pasar yang menjanjikan, keunikan yang mampu menarik konsumen, dukungan infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan bahan baku lokal yang berlimpah. Berikut di bawah ini merupakan produk unggulan subsektor Industri Makanan, Minuman, dan Pengolahan Tembakau.

Tabel 2.28. Produk Unggulan Subsektor Industri Makanan, Minuman, dan Pengolahan Tembakau

No	Produk	Skor
1	Kerupuk/Kerecek Rambak Sapi	100
2	Keripik Singkong	92
3	Onde-onde	90
4	Sambel wader	90
5	Kerupuk Samiler	82

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

6	Kue Koyah	82
7	Tape Ketan Hitam	80
8	Kerupuk Petulo	80
9	Telur Asin/Telur Asin Asap	78
10	Tempe	74
11	Sambel Pecel	74
12	Keripik Tempe	74
13	Keripik Tahu	74
14	Tahu	74
15	Kerupuk Puli	72
16	Olahan Kacang Mede	72
17	Tape Singkong	72
18	Klepon Ketela	70
19	Rengginang/Rengginang Manis	68
20	Keripik Tempe Sagu	66
21	Kue Kering	64
22	Jamur Crispy	64
23	Tortila	64
24	Emping Jagung	64
25	Bawang Goreng	64
26	Keripik Ubi	64
27	Emping Melinjo	64
28	Crepes	64
29	Makaroni Panggang	64
30	Kue Serabi	62
31	Getuk Pisang	62
32	Sambel Rujak Manis Kacang Mede	62
33	Keripik Gadung	62
34	Jipang	62
35	Kerupuk Ikan/Kerupuk Ikan Tengiri	62
36	Lumpia	62
37	Carang Madu	62
38	Kerupung Tongkol	62
39	Keripik Gethuk	62
40	Kacang sangria	62
41	Roti Kulana	60
42	Kunyit Asem	54
43	Jepit	54
44	Keciput	54
45	Peyek Kacang Hijau	54
46	Peyek Kacang Tanah	54
47	Peyek udang dawu	54
48	Keripik Pisang Kepok	54
49	Marning Jagung	54
50	Opak Ladu	54
51	Molen	54
52	Bolu	54
53	Carang Mas	54
54	Keripik Mbote	54
55	Kerupuk payus	54
56	Roti Kacang	54
57	Kue Basah	54
58	Stik Kelor	48
59	Madu Multiflora Murni	48
60	Keripik usus	46

61	Lidas	44
62	Madu Randu	44
63	Kopi Bubuk	42
64	Stim Lele	36
65	Madu Akasia	36
66	Bubuk Cokelat (Berbagai Varian)	32

Sumber: Dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mojokerto

2. Industri Kimia, Farmasi, Obat Tradisional, Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Hasil kajian menunjukkan bahwa subsektor ini hanya memiliki dua jenis produk unggulan, yaitu jamu dan kerajinan bunga dari plastik. Keterbatasan ragam produk ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fokus produksi yang masih terpusat pada produk-produk tertentu, keterbatasan inovasi dalam pengembangan produk baru, atau kurangnya dukungan terhadap diversifikasi industri dalam subsektor tersebut. Namun, keberadaan dua produk unggulan ini tetap mencerminkan potensi lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi kualitas maupun skala produksi untuk meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas. Dengan fokus yang tepat, pengembangan subsektor ini dapat diarahkan untuk memperluas jenis produk, mendorong inovasi, serta memperkuat dukungan dari infrastruktur dan kebijakan lokal. Hal ini penting untuk memastikan subsektor ini memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Mojokerto. Berikut di bawah ini merupakan produk unggulan subsektor Industri Kimia, Farmasi, Obat Tradisional, Karet, Barang dari Karet, dan Plastik.

Tabel 2.29 Produk Unggulan Subsektor Industri Kimia, Farmasi, Obat Tradisional, Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

No	Produk	Skor
1	Jamu	92
2	Kerajinan Bunga dari Plastik	86

Sumber: Dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mojokerto

3. Industri Barang Galian Bukan Logam

Hasil analisis menunjukkan bahwa subsektor ini hanya memiliki lima produk unggulan, yaitu gerabah dari tanah liat, batu akik, batu bata/batu merah/batu pres, genteng, dan batu-bata tempel. Produk-produk ini mencerminkan kekayaan sumber daya alam Kabupaten Mojokerto yang diolah menjadi produk berbasis material bukan logam, yang memiliki nilai ekonomi dan utilitas tinggi. Namun, keterbatasan ragam produk juga mengindikasikan adanya potensi pengembangan lebih lanjut, baik melalui diversifikasi produk maupun peningkatan inovasi dalam proses produksi. Penguatan subsektor ini dapat difokuskan pada pengembangan desain, kualitas, dan pemasaran produk unggulan yang telah ada, sekaligus mendorong eksplorasi untuk menciptakan produk-produk baru berbasis bahan baku lokal. Dengan langkah tersebut, subsektor ini diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas peluang

usaha di Kabupaten Mojokerto. Berikut di bawah ini merupakan produk unggulan subsektor Industri Barang Galian Bukan Logam.

Tabel 2.30 Produk Unggulan Subsektor Industri Barang Galian Bukan Logam

No	Produk	Skor
1	Gerabah dari Tanah Liat	96
2	Batu Akik	76
3	Batu-Bata/Bata Merah/Bata Pres	74
4	Genteng	74
5	Batu-bata Tempel	74

Sumber: Dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mojokerto

4. Industri Logam Dasar

Hasil kajian menunjukkan bahwa subsektor ini hanya memiliki dua produk unggulan, yaitu kerajinan patung arca dan cor kuningan. Produk -produk ini mencerminkan keahlian tradisional serta pemanfaatan sumber daya logam dasar yang ada di daerah tersebut. Namun, terbatasnya jumlah produk unggulan dalam subsektor ini menandakan adanya ruang pengembangan lebih lanjut, baik dari segi diversifikasi produk maupun peningkatan daya saing produk yang telah ada. Dengan dukungan inovasi teknologi, pengembangan desain, dan akses pasar yang lebih luas, subsektor ini memiliki peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Mojokerto. Upaya strategis dalam mendukung subsektor ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga membuka peluang usaha baru di subsektor industri logam dasar.

Tabel 2.31 Produk Unggulan Subsektor Industri Logam Dasar

No	Produk	Skor
1	Pembuatan Patung Arca	96
2	Cor Kuningan	78

Sumber: Dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mojokerto

5. Industri Pengolahan Lainnya

Berdasarkan hasil kajian, terdapat lima produk unggulan prioritas yang berasal dari subsektor industri pengolahan lainnya. Produk unggulan prioritas pada subsektor ini adalah kerajinan bonsai/buah imitasi, produk mebel, pembuatan udeng (Oleh-oleh Khas Mojokerto), pembuatan *tote bag* (Oleh-oleh Khas Mojokerto), dan kerajinan dari *fiberglass*. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan kekayaan dan tradisi lokal Kabupaten Mojokerto, tetapi juga memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Setiap produk yang terpilih menunjukkan kekuatan dalam beberapa aspek penilaian, seperti potensi pasar yang menjanjikan, keunikan yang mampu menarik konsumen, dukungan infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan bahan baku lokal yang berlimpah.

Tabel 2.32 Produk Unggulan Subsektor Industri Pengolahan Lainnya

No	Produk	Skor
1	Kerajinan Bonsai/Buah Imitasi	92
2	Produk Mebel	92
3	Pembuatan Udeng (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

4	Pembuatan Tote Bag (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92
5	Kerajinan dari <i>Fiberglass</i>	92
6	Pembuatan Kaos (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92
7	Pembuat Topi (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92
8	Layah	92
9	Sarung Goyor	90
10	Batik Tulis/Busana Batik (Sarung, Kain, Sajadah)	90
11	Kerudung Bercorak Budaya Lokal	90
12	Kerajinan Bunga Daur Ulang Sampah	90
13	Aksesoris/Aksesoris Gantungan Kunci	90
14	Pembuatan Tas/Tas Rajut/ Tas Kulit	90
15	Pembuatan Sepatu	84
16	Pembuatan Dompot	84
17	Pembuatan Sandal	84
18	Pembuatan Ikat Pinggang	84
19	Kerajinan Bambu	82
20	Pembuatan Bordir	80
21	Pembuatan Kaset	74
22	Kerajinan Perak	74
23	Kerajinan Anyaman	74
24	Kursi Stainless	74
25	Kerajinan Berbahan Dasar Aluminium	74
26	Pembuatan Helm	74
27	Kerajinan Bingkai Foto	64
28	Lis Kayu	64
29	Tali Tampar	64
30	Pembuatan Terpal	64
31	Pembuatan Songkok	64

Sumber: Dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mojokerto, 2024

Tabel 2.33 Produk Unggulan Prioritas Dalam *Shortlist*

Produk	Skor	Z-score
Kerupuk/Kerecek Rambak Sapi	100	1,949538
Gerabah dari Tanah Liat	96	1,690739
Pembuatan Patung Arca	96	1,690739
Keripik Singkong	92	1,43194
Jamu	92	1,43194
Kerajinan Bonsai/Buah Imitasi	92	1,43194
Produk Mebel	92	1,43194
Pembuatan Udeng (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Pembuatan Tote Bag (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Kerajinan dari <i>Fiberglass</i>	92	1,43194
Pembuatan Kaos (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Pembuat Topi (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Layah	92	1,43194
Onde-onde	90	1,30254
Sambel wader	90	1,30254

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Sarung Goyor	90	1,30254
Batik Tulis/Busana Batik (Sarung, Kain, Sajadah)	90	1,30254
Kerudung Bercorak Budaya Lokal	90	1,30254
Kerajinan Bunga Daur Ulang Sampah	90	1,30254
Aksesoris/Aksesoris Gantungan Kunci	90	1,30254
Pembuatan Tas/Tas Rajut/ Tas Kulit	90	1,30254
Kerajinan Bunga dari Plastik	86	1,043741

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 2.34 Produk Unggulan Daerah Prioritas			
No.	Pembagian KBLI Produk Unggulan Prioritas	Produk	
1	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik		
	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Genteng/Bata Gerabah Bata Merah	
2	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing		
	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Keripik Kedelai	Samiler
		Kerupuk Ikan	Keripik Gadung
		Rambak	Keripik Pisang
		Rengginang	Kerupuk Beras
Industri Makanan dan Masakan Olahan	Makanan Ringan Olahan Usus Jemblem Telur Asin	Kue basah	
3	Industri kerajinan non logam		
	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Anyaman Bambu Kerajinan Bambu Pigora	
	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan sejenisnya	Patung batu	
	Industri Kain Sulaman	Sulam pita	
	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	Tas	
		Dompot	
	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari	Sepatu dan sandal	
4	Industri kerajinan logam		
	Industri Pengolahan Logam Tidak Terdefinisi di Tempat Lain	Cor kuningan Perak	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil kajian ekonomi daerah yang dilakukan melalui metode *Location Quotient* (LQ), *Shift Share Analysis*, serta kajian dokumen perencanaan, diperoleh hasil bahwa dua sektor yang memiliki nilai tertinggi adalah industri batu bata dan tanah liat serta industri makanan yang sehat dan berdaya saing. Kedua sektor ini menonjol baik dari segi

kontribusi ekonomi maupun persebaran usaha di masyarakat. Namun, setelah dilakukan diskusi mendalam, industri batu bata diputuskan untuk dieliminasi dari daftar prioritas. Pertimbangannya adalah tren penggunaan material konstruksi yang mulai bergeser dari batu bata merah menuju bata ringan, yang dinilai lebih efisien dan diminati pasar. Pergeseran ini berpotensi menurunkan daya saing industri batu bata di masa depan. Selain itu, industri batu bata memiliki risiko berkurangnya peran dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan adanya peluang besar penggunaan mesin dalam proses produksinya, sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Dengan demikian, kontribusi sosial-ekonomi industri ini bagi masyarakat secara langsung juga cenderung menurun.

Industri makanan yang sehat dan berdaya saing diputuskan menjadi tema superprioritas dalam pengembangan ekonomi daerah. Sektor ini memiliki potensi pasar yang luas, tren permintaan yang terus meningkat, serta peluang inovasi yang tinggi. Makanan olahan sehat, keripik, kerupuk, dan produk sejenis dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam sesuai selera pasar lokal maupun nasional. Keunggulan lain dari industri makanan adalah kebutuhan modal yang relatif lebih kecil dan kemudahan proses produksinya, sehingga dapat dilakukan oleh lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil. Dengan modal yang terjangkau, industri ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

B. Tema Prioritas Permasalahan Prioritas Daerah

Sebagai salah satu tahapan penting dalam penyusunan Dokumen RIPJPID Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, identifikasi dan usulan permasalahan prioritas di daerah (PPD) memerlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai permasalahan strategis yang dihadapi daerah demi mendukung pengembangan dan pemanfaatan IPTEK. Usulan permasalahan prioritas daerah (PPD) dihimpun melalui eksplorasi dan hasil *scanning* isu-isu strategis dari beberapa dokumen perencanaan wilayah, berita terkini, konsultasi publik, dan masukan OPD maupun akademisi di Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang diidentifikasi mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial, bencana alam, lingkungan hidup, serta tata kelola birokrasi atau pemerintahan. Permasalahan yang diidentifikasi mencerminkan tantangan nyata yang berpotensi mempengaruhi kemajuan ekosistem berbagai aspek di Kabupaten Mojokerto. Dengan merumuskan usulan PPD, diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi dan program pemajuan IPTEK yang adaptif, kontekstual, dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.35 Tabel Identifikasi Permasalahan Daerah Kabupaten Mojokerto

No.	Aspek	Permasalahan Daerah	Sumber
1	Pendidikan	1. Masih terdapatnya anak putus sekolah. 2. Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. 3. Ketersediaan guru yang kurang merata.	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Aspek	Permasalahan Daerah	Sumber
		4. Angka putus sekolah masih perlu ditekan 5. Ketersediaan tenaga pendidik yang belum merata 6. Layanan dan akses pendidikan yang belum merata	Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 (Berita Publik)
2.	Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu dan Neonatal Tinggi. 2. Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan/digitalisasi data. 3. Masih tingginya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang. 4. Masing tingginya angka stunting. 5. Peningkatan penyebaran penyakit menular seperti TB, Malaria, dan Dengue. 6. Tingginya kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kanker. 7. Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat. 8. Meningkatnya perokok aktif. 9. Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil. 10. Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan). 11. Pemantauan kualitas air secara rutin untuk mencapai target akses air minum aman.	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
		12. Angka kematian ibu dan neonatal yang tinggi 13. Kasus gizi buruk dan stunting yang masih banyak 14. Permasalahan penyebaran penyakit menular dan tidak menular. 15. Penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang belum merata. 16. Layanan balita gizi buruk dan stunting yang masih belum optimal.	Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 (Berita Publik)
3.	Ekonomi	1. Harga pangan yang cenderung fluktuatif pada momen tertentu. 2. Belum optimalnya diversifikasi pangan. 3. Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah. 4. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan. 5. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan harga relatif murah dan berkualitas. 6. Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan. 7. Belum optimalnya kunjungan wisatawan. 8. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah.	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Aspek	Permasalahan Daerah	Sumber
		9. Kurangnya peluang produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasok perdagangan baik skala lokal regional maupun global. 10. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru. 11. Kurang optimalnya jaringan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha menengah dan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto. 12. Masih rendahnya jumlah usaha mikro formal. 13. Belum semua kecamatan memiliki regulasi tentang RDTR sehingga mengurangi minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kab. Mojokerto.	
		14. Daya saing hasil produksi daerah masih rendah	RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025
4.	Infrastruktur dan Permukiman	Air Minum : 1. Akses layak air minum belum mencapai 100%. 2. Akses layak perpipaan PDAM dan non PDAM belum 30%. 3. Terdapat idle capacity yang masih bisa di manfaatkan. 4. Terdapat daerah rawan air yang kebutuhan air minumnya harus segera dipenuhi. Persampahan : 1. Masih ada 58,5 % sampah belum terkelola. 2. Belum meratanya TPS 3R dan bank sampah kelurahan/desa. 3. Banyak infrastruktur persampahan (TPS 3R dan TPST) yang belum beroperasi. 4. Membutuhkan penambahan lahan baru dan kebutuhan sarana prasarana pendukungnya untuk pengembangan TPA Karangdiyeng, Desa Karangdiyeng agar bisa mencapai target pelayanan, diperkirakan umur TPA Karangdiyeng akan penuh dalam waktu 4 tahun lagi. 5. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 6. Kurangnya armada pengangkutan persampahan. 7. Kurangnya pemilahan sampah dari sumbernya. 8. Kebutuhan sarana dan prasarana TPS3R pada lokasi pembangunan kawasan pedesaan Kecamatan Gondang (5 Desa).	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Aspek	Permasalahan Daerah	Sumber
		<p>Pengelolaan Air Limbah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapat akses belum layak 0,5% (1.782 RT).2. Akses aman masih 0,03 %.3. Truk tinja 1 unit dalam kondisi rusak.4. Terdapat MCK kombinasi + IPAL komunal ada 9 unit : 8 unit berfungsi tetapi kurang optimal, 1 unit IPAL berfungsi tetapi belum ada sambungan rumah dikarenakan kondisi lokasi IPAL beda elevasi IPAL komunal belum berfungsi optimal (rata-rata pemakaian masih 33,3 %).5. Draft perda air limbah domestik masih proses pengesahan.6. Belum ada regulasi pelaksanaan LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal).7. Belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa terkait sanitasi8. Belum terbentuknya UPTD air limbah domestik <p>Irigasi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebutuhan pembangunan irigasi primer dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.2. Kebutuhan embung air mendukung pertanian di desa Kemasantani, padi dan Kebontunggul. <p>Perumahan dan Kawasan Permukiman:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Minimnya penanganan RTLH (Rumah tidak layak huni).2. Kurangnya pemeliharaan PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda.3. Minimnya penanganan kawasan permukiman kumuh <p>Infrastruktur transportasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perlunya penambahan titik lokasi ATCS dalam rangka mendukung <i>smart city</i>.2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan.3. Tingkat Keselamatan LLAJ di Kabupaten Mojokerto belum optimal.4. Kebutuhan sarana dan prasarana angkutan wisata dalam rangka mendukung kawasan agrowisata pertanian terpadu.	
		5. Sarana dan prasarana yang masih belum optimal	RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025
		6. Minimnya kawasan permukiman kumuh 7. Minimnya penanganan rumah tidak layak huni	Musrenbang RKPD Kabupaten

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Aspek	Permasalahan Daerah	Sumber
			Mojokerto Tahun 2026 (Berita Publik)
5.	Sosial	1. Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang. 2. Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tidak terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 3. Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan PPKS. 4. Belum optimalnya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin.	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
		5. Belum terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat	RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025
		6. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial	Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 (Berita Publik)
6.	Bencana Alam	1. Tingginya potensi benca serta belum optimalnya pengelolaan kebencanaan 2. Kurang kuatnya kelembagaan melalui DESTANA (Desa Tanggung Bencana) untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bentuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB). 3. Kurangnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran untuk Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL).	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
		4. Rawan terjadi bencana alam	RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025
7.	Lingkungan Hidup	1. Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup. 3. Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan. 4. Rendahnya jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. 5. Pengelolaan TPS3R yang belum optimal. 6. Pengelolaan TPA yang belum optimal. 7. Rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Aspek	Permasalahan Daerah	Sumber
		8. Kebutuhan sarana pengangkutan sampah dan kotoran hewan ternak. 9. Tingginya aktivitas alih fungsi lahan yang mengancam lingkungan	RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025
		10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dan peninggalan sejarah	
8.	Tata kelola birokrasi atau pemerintahan	1. Belum optimalnya integrasi data dan informasi Perangkat Daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah. 3. Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah. 4. Belum optimalnya keamanan teknologi informasi. 5. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. 6. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa. 7. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya. 8. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan. 9. Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang terhadap ketentuan belum optimal. 10. Penguatan Maturitas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal. 11. Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian. 12. Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan.	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
9.	SD dan Perencanaan Pembangunan	1. Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi. 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah. 3. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal.	KLHS RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Aspek	Permasalahan Daerah	Sumber
		4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan.	
		5. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.	
		6. Pemanfaatan potensi sumber daya yang ada kurang optimal 7. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan masih kurang optimal	
10.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Rendahnya tingkat transparansi informasi terkait prosedur dan persyaratan administrasi pelayanan yang berlaku dalam mengakses inovasi layanan berbasis <i>website</i> .	(Ilmu et al., 2005)
		2. Akses internet dan perangkat digital yang tidak merata di berbagai wilayah, terutama di desa-desa, me menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam ekonomi digital.	(Lusiana & et al, 2025)

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dalam tabel di atas masih menggambarkan spektrum isu yang cukup luas di masing-masing aspek. Namun, untuk keperluan perencanaan yang lebih fokus dan terarah, permasalahan-permasalahan tersebut perlu untuk disederhanakan menjadi dua hingga tiga permasalahan utama yang cukup mewakili pada masing-masing aspek. Proses dalam pengkerucutan ini mempertimbangkan tingkat urgensi, skala dampak, serta relevansinya terhadap pencapaian tujuan strategis RIPJPID. Berdasarkan hal tersebut, berikut uraian usulan permasalahan prioritas daerah yang diseleksi sebagai opsi dalam menentukan usulan permasalahan prioritas daerah dalam RIPJPID Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.36
Tabel Daftar Permasalahan Pokok Kabupaten Mojokerto

No.	Aspek	Permasalahan Pokok Daerah
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat anak putus sekolah Layanan dan askes pendidikan yang belum merata
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Angka kematian ibu dan neonatal yang tinggi Kasus gizi buruk dan stunting yang masih banyak Penyediaan fasilitas kesehatan yang belum merata dan belum optimalnya PHBS di masyarakat.
3.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya ketersediaan dan diversifikasi pangan Hasil produksi daerah yang belum kompetitif Kurangnya jangkauan promosi untuk objek wisata daerah
4.	Infrastruktur dan Permukiman	<p>Air Minum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses air layak minum belum mencapai 100% Pasokan air bersih yang masih terbatas di beberapa daerah <p>Persampahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih ada 58,5% sampah belum terkelola Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan <p>Pengelolaan air limbah :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat akses belum layak 0,5% (1.782 RT)

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Aspek	Permasalahan Pokok Daerah
		<ul style="list-style-type: none">• elum terbentuknya UPTD air limbah domestik Infrastruasktur Transportasi: <ul style="list-style-type: none">• Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan• Tingkat Keselamatan LLAJ di Kabupaten Mojokerto belum optimal Perumahan dan kawasan permukiman: <ul style="list-style-type: none">• Minimnya penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5.	Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang• Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tidak terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas• Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial
6.	Bencana alam	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya potensi bencana serta belum optimalnya pengelolaan kebencanaan• Kurang kuatnya kelembagaan melalui DESTANA (Desa Tanggung Bencana) untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bentuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
7.	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Menurunnya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup• Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan• Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
8.	Tata kelola birokrasi dan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah• Belum optimalnya integrasi data dan informasi antar Perangkat Daerah
9.	SD dan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal• Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan masih kurang optimal
10.	Ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none">• Ketimpangan akses informasi dan teknologi di berbagai wilayah, terutama di desa-desa, yang menghambat transparansi layanan publik dan kesetaraan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok daerah dari berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mojokerto masih menghadapi tantangan salah satunya yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan wilayah. Permasalahan pokok yang telah diidentifikasi kemudian dipetakan ke dalam beberapa kelompok isu prioritas. Merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, isu strategis yang diturunkan dari permasalahan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing
- b. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
- c. Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik/infrastruktur
- d. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah

e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan

Isu-isu strategis tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan permasalahan prioritas daerah di Kabupaten Mojokerto. Penetapan permasalahan prioritas daerah ini juga akan mempertimbangkan potensi dampak terhadap aspek lingkungan hidup, dosial-ekonomi, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang yang mungkin timbul akibat pengembangan PUD. Proses dalam penentuan PPD berdasarkan pertimbangan dampak pengembangan PUD dimulai dengan membuat matriks keterkaitan antara isu-isu strategis dengan pengembangan PUD yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan analisis *stakeholder* berdasarkan persepsi dan diskusi yang akan dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik yang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat yang dapat diwakili oleh OPD di Kabupaten Mojokerto. Sebagai langkah awal dalam penetapan PPD, matriks keterkaitan antar isu-isu strategis dengan pengembangan PUD akan digambarkan dengan menjabarkan setiap isu lalu bagaimana keterkaitannya dengan masing-masing PUD di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.37 Tabel Matriks Keterkaitan Dengan Pengembangan PUD

No.	Isu Strategis Daerah	Keterkaitan dengan PUD	Kondisi PPD terkait dengan PUD
1.	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	Kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri makanan, kimia, dan logam	Sebagian besar pekerja lokal belum bisa memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga, dengan adanya pelatihan kerja/alih teknologi yang dimodalkan dari PMA, maka pekerja pada perusahaan tersebut yang awalnya merupakan sumber daya manusia dengan kualitas rata rata perusahaan, menjadi pekerja dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompeten, berketerampilan tinggi, menjadi tenaga kerja yang memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi (Etika Sari & Sumanto, 2021). Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa SDM lokal masih belum bersifat siap pakai dimana kualitasnya masih rata-rata.
2.	Penuntasan kemiskinan dengan sistem regsosek & perlindungan sosial adaptif	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM berbasis pengolahan makanan dan produk lokal	Meskipun beberapa wilayah di Kabupaten Mojokerto memiliki potensi besar pada komoditas pertanian, pemanfaatannya masih belum optimal karena sebagian besar hasil dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah, sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian pangan lokal melalui pengolahan produk belum sepenuhnya dimaksimalkan (Candiwatu et al., 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa UMKM berbasis pengolahan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

No.	Isu Strategis Daerah	Keterkaitan dengan PUD	Kondisi PPD terkait dengan PUD
			makanan dan produk lokal di Kabupaten Mojokerto masih belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
3.	Penguatan ekonomi daerah	Penguatan rantai pasok dan hilirisasi produk industri pengolahan	Berdasarkan Dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mojokerto, Jamu merupakan satu hasil produksi komoditas unggulan di Kabupaten Mojokerto yang masih mengalami kendala pada aspek ketersediaan bahan baku. jamu menghadapi tantangan dalam akses terhadap bahan herbal berkualitas, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor musiman dan kurangnya pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan hilirisasi PUD di Kabupaten Mojokerto masih belum sepenuhnya optimal.
4.	Peningkatan kualitas tata kelola dan kepemimpinan daerah	Penguatan sistem pelayanan perizinan, insentif dan promosi investasi industri unggulan	Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Tahun 2023 terdapat kelemahan dan ancaman terkait sistem pelayanan perizinan, insentif dan promosi investasi : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan – peraturan pendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal terbatas• Pelayanan perizinan belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi• Jaringan aplikasi perizinan online sering terhambat atau tidak lancar• Pelayanan perizinan belum dilakukan secara terpadu dalam satu pintu (100%).• Belum adanya kajian kemudahan insentif perizinan dan penanaman modal• Belum adanya kajian prospektus dan peta potensi penanaman modal.
5.	Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan kebencanaan	Risiko limbah industri kimia dan galian bukan logam terhadap lingkungan	Pada tahun 2023 terdapat beberapa pengaduan masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang terurai dalam Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 terkait pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri kimia dan galian. Salah satu pengaduannya yaitu berkaitan dengan dampak limbah udara PT. Energo yang mencemari lingkungan sekitar.

Berdasarkan matriks keterkaitan antar isu-isu strategis dengan pengembangan PUD di Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya integrasi yang erat antar arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan pengembangan PUD. Setiap isu strategis yang tercantum baik peningkatan kualitas SDM, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi dan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, maupun perlindungan lingkungan hidup memiliki relevansi langsung dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh subsektor PUD seperti industri makanan-minuman, kimia, logam, dan barang galian. Hal ini menandakan bahwa program riset dan inovasi yang dirancang dalam RIPJPID Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat selaras dengan tantangan faktual yang dihadapi oleh sektor industri lokal, sehingga upaya peningkatan daya saing daerah dapat lebih terarah dan berdampak nyata.

Untuk memperkuat objektivitas dalam menetapkan PPD, dilakukan analisis stakeholder dengan melibatkan OPD serta pemangku kepentingan lainnya melalui mekanisme *polling* partisipatif. Dalam konteks penyusunan RIPJPID Kabupaten Mojokerto, analisis *stakeholder* dan kepentingan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memastikan partisipasi yang objektif dan terukur. Setiap pihak diminta mengidentifikasi permasalahan sesuai ruang lingkup dan perspektif masing-masing. Data yang dihimpun dari polling tersebut kemudian diolah menggunakan pendekatan Z-Score, yaitu metode statistik untuk menilai posisi nilai masing-masing komponen terhadap nilai rata-rata keseluruhan. Dalam konteks ini, permasalahan dengan nilai Z-Score positif dianggap memiliki urgensi dan tingkat prioritas di atas rata-rata, sehingga masuk dalam daftar PPD. Sementara permasalahan dengan nilai Z-Score negatif tereliminasi karena dianggap memiliki urgensi yang lebih rendah. Permasalahan-permasalahan yang lolos seleksi ini kemudian diranking berdasarkan nilai Z-Score tertinggi, dan yang menempati posisi teratas ditetapkan PPD yang akan menjadi dasar arah kebijakan IPTEK dan inovasi di dalam dokumen RIPJPID Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis daerah Kabupaten Mojokerto, diputuskan bahwa isu strategis superprioritas yang akan menjadi fokus utama adalah “Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing”. Pemilihan isu ini didasari pada pandangan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. SDM yang kompeten, terampil, dan adaptif menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program pembangunan daerah, khususnya dalam mengembangkan Produk Unggulan Daerah (PUD) superprioritas yaitu makanan olahan yang sehat dan berdaya saing.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri makanan, kimia, dan logam di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagian besar tenaga kerja lokal masih belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan, sehingga peluang kerja sering kali diisi oleh tenaga kerja luar daerah atau pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dari perusahaan. Kondisi ini

mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kualitas SDM yang tersedia di tingkat lokal.

Dengan menetapkan peningkatan kualitas SDM sebagai isu strategis superprioritas, diharapkan akan tercipta sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan sektor industri untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten. Khusus untuk PUD makanan olahan, peningkatan keterampilan SDM akan berdampak langsung pada efisiensi produksi, inovasi produk, dan pemenuhan standar mutu yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Selain itu, investasi pada peningkatan kualitas SDM akan memberikan efek berantai positif bagi sektor-sektor lain di Kabupaten Mojokerto. Tenaga kerja yang terampil tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi baru, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi lokal yang sesuai dengan potensi daerah. Hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah, memperluas peluan

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

3.1 Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi modal dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Namun demikian, dinamika perubahan lingkungan strategis, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global, menimbulkan beragam tantangan yang harus diantisipasi dengan tepat. Analisa tantangan dan peluang dalam pengembangan PUD ini menjadi instrumen penting untuk memahami kondisi aktual serta potensi yang dimiliki Kabupaten Mojokerto.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

	Peluang	Tantangan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Regulasi Mendukung: Sudah ada BRIDA dan lembaga pengampu kebijakan riset-inovasi yang menjadi landasan hukum pengembangan PUD • Basis Data Awal Tersedia: Sudah terdapat basis data riset dan inovasi serta aplikasi pendukung (Tumbas, Pengusaha Keren) yang bisa dikembangkan • Lembaga Inkubasi Awal: Sudah ada lembaga pendamping perusahaan pemula (startup) walaupun masih berfokus pada legalitas. • Platform Kerjasama Lokal: Sudah terdapat platform kerjasama riset dan inovasi di internal Pemda • Kemitraan Awal untuk Difusi Inovasi: Sudah ada kerjasama dalam pelaksanaan difusi inovasi yang bisa diperluas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Basis Data Lemah: Basis data PUD dan riset belum terintegrasi dengan penyelesaian masalah daerah. • Fokus Basis Data Terbatas: Aplikasi yang ada masih fokus pada pemasaran dan legalitas, belum menyentuh aspek riset, branding, dan inovasi produk. • Kurangnya Promosi dan Kampanye PUD: Belum ada pendataan, promosi, maupun kampanye inovasi produk unggulan daerah. • Ketiadaan Kompetisi dan Apresiasi: Belum ada kompetisi atau penghargaan baik untuk pengembangan PUD • Pembinaan PUD Lemah: Inkubator hanya fokus pada legalitas, belum pada peningkatan kapasitas bisnis, inovasi, maupun ekspansi pasar. • Tidak Ada Sistem HKI: Belum ada sistem pengelolaan HKI, perlindungan pengetahuan lokal, maupun paten teknologi inovasi. • Keterbatasan Program Kontinu: Kolaborasi riset-inovasi belum berkelanjutan, cenderung sporadis. • Belum Ada Standar Internasional: Produksi PUD belum memenuhi standar internasional (ISO, HACCP, sertifikasi halal global).

Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi: Program BRIN/BRIDA, Kemenkop-UKM, dan Kemendag untuk penguatan riset, UMKM, dan inovasi daerah. • Tren Pasar Produk Lokal: Meningkatnya permintaan produk lokal, sehat, dan ramah lingkungan di pasar nasional & global. • Perkembangan Ekonomi Digital: E-commerce, marketplace, dan media sosial memberi peluang penetrasi pasar lebih luas. • Kemitraan Eksternal: Peluang kerjasama dengan universitas, BUMN, sektor swasta, dan investor untuk inkubasi dan inovasi. • Kebijakan Sertifikasi dan HKI Nasional: Pemerintah pusat sudah memperkuat akses sertifikasi halal, SNI, dan HKI. • Potensi Wisata Mojokerto: PUD dapat dikolaborasikan dengan pariwisata budaya dan sejarah (Majapahit, situs heritage). 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan Global dan Regional: Produk lokal harus bersaing dengan produk dari daerah lain dan impor dengan kualitas dan harga kompetitif. • Keterbatasan Akses Teknologi Mutakhir: Industri kecil kesulitan mengakses mesin modern, IoT, dan teknologi produksi. • Keterbatasan Pasar Ekspor: Hambatan ekspor karena syarat sertifikasi, standar mutu, dan keterbatasan SDM ekspor. • Ketergantungan Pasar Domestik: PUD lebih banyak berorientasi ke pasar lokal, belum global. • Ancaman Disrupsi: Pergeseran tren konsumsi (misal: bata ringan menggantikan batu bata tradisional). • Risiko Bencana dan Krisis Global: Pandemi, inflasi, atau perubahan iklim dapat memengaruhi rantai pasok dan daya beli. • Perubahan Regulasi Cepat: Ketidakpastian kebijakan nasional dapat menghambat kontinuitas program daerah.
------------------	---	--

3.2 Tantangan dan Peluang dalam Penanganan Permasalahan Daerah (PPD)

Analisis tantangan dan peluang dalam pemecahan permasalahan daerah di Kabupaten Mojokerto menjadi langkah penting untuk memahami arah pengembangan kebijakan riset dan inovasi (Iptek). Melalui identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dilihat bagaimana potensi daerah sekaligus hambatan yang ada akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. Fokus utama analisis ini mencakup lima aspek krusial, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan rantai produksi dan diversifikasi produk, pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung ekonomi sekaligus ramah

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

lingkungan, pemanfaatan teknologi untuk tata kelola dan pelayanan publik, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Faktor	Peluang	Tantangan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Nasional & Daerah Mendukung: Adanya regulasi BRIDA, arah kebijakan nasional terkait riset-inovasi, serta kesadaran Pemda akan pentingnya inovasi daerah. • Kanal Promosi Sudah Aktif: Website OPD, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer sudah ada, tinggal diperluas dan diintegrasikan. • Program Pelatihan Rutin: Sudah ada pelatihan UMKM dan sosialisasi, bisa ditingkatkan menjadi pelatihan inovasi lintas sektor. • Partisipasi Daerah di Ajang Eksternal: Kabupaten sudah aktif ikut pameran dan ajang inovasi di luar daerah. • Kemitraan Awal dengan Lembaga Riset: Sudah ada kolaborasi awal yang bisa ditingkatkan menjadi sistem permanen. • Kesadaran akan Perlunya HKI: Ada inisiatif awal untuk pendaftaran HKI meski belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan Sinergi Lintas OPD: Tidak ada sistem yang mendorong OPD bekerja sama dalam riset dan inovasi berbasis kebutuhan pembangunan. • Kelembagaan Lemah: Belum ada sistem koordinatif permanen, platform fisik/digital riset, maupun wadah kolaborasi terjadwal. • Basis Data Tidak Terintegrasi: Pemanfaatan data riset belum mendukung evidence-based policy. • Pendekatan Fragmentaris: Inovasi masih sporadis, tidak fokus pada transformasi sosial menyeluruh. • Kurangnya Infrastruktur Fisik Riset: Aset pendukung riset tidak difungsikan optimal, kesenjangan antara kebutuhan & fasilitas. • Partisipasi Sosial Rendah: Informasi inovasi belum menjangkau kelompok rentan (desa terpencil, disabilitas, dsb). • Belum Ada Wadah Kolaborasi Pelatihan–Dunia Kerja: Sehingga skill masyarakat tidak link and match dengan kebutuhan industri. • Promosi & Kampanye Belum Menyeluruh: Kampanye publik masih fokus UMKM, belum inovasi untuk kualitas hidup. • Tidak Ada Sistem Apresiasi Lokal: Belum ada penghargaan atau kompetisi inovasi internal,

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

		<p>serta insentif formal bagi inovator lokal.</p> <ul style="list-style-type: none">• HKI Belum Optimal: Minim pendampingan & fasilitasi daerah, menyebabkan inovasi masyarakat tidak tercatat resmi.• Pendanaan Lemah: Riset-inovasi belum prioritas APBD, masih tergantung dukungan eksternal.
--	--	---

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

<p>Eksternal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah Pusat & Provinsi: Ada program BRIN/BRIDA, Kemenkop-UKM, Kemendag, dan Kemenperin untuk mendukung riset dan inovasi. • Potensi Kerjasama Eksternal: Peluang menggandeng universitas, BUMN, sektor swasta, dan NGO dalam inkubasi & riset. • Tren Pasar Global: Kenaikan demand produk sehat, ramah lingkungan, dan lokal berbasis kearifan daerah. • Perkembangan Ekonomi Digital: Marketplace, e-commerce, dan fintech mendukung ekspansi produk unggulan daerah. • Agenda Nasional & Internasional: Ada peluang mengikuti kompetisi inovasi nasional maupun global untuk branding PUD. • Potensi Integrasi dengan Pariwisata: Wisata sejarah-budaya Mojokerto bisa menjadi pasar sekaligus media promosi produk unggulan. • Skema Sertifikasi Nasional: Program sertifikasi halal, SNI, HKI dari pemerintah pusat bisa mendukung PUD Mojokerto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan Produk Global & Regional: PUD Mojokerto harus bersaing dengan produk dari daerah lain maupun impor. • Akses Teknologi Modern Terbatas: UMKM kesulitan mendapatkan mesin canggih, IoT, dan teknologi produksi terbaru. • Pasar Ekspor Sulit Ditembus: Karena kendala sertifikasi internasional, standar mutu, dan minimnya SDM ekspor. • Ketergantungan pada Pasar Domestik: Produk unggulan belum menembus pasar global, masih berorientasi lokal. • Risiko Krisis Global: Pandemi, inflasi, perubahan iklim dapat memengaruhi rantai pasok dan daya beli. • Perubahan Regulasi Cepat: Dinamika kebijakan pusat bisa menghambat kesinambungan program daerah. • Disrupsi Teknologi & Preferensi Pasar: Pergeseran ke arah produk modern (contoh: bata ringan mengganti bata merah) bisa mengurangi relevansi PUD tradisional.
-------------------------	---	---

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

4.1 Analisis Kesenjangan Produk Unggulan Daerah

1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah

Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah

Kriteria	Kondisi yang diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Sudah memiliki platform kebijakan bidang riset dan inovasi sesuai ketentuan BRIDA	Berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur terkait Bapperida, Bapperida berfokus sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan pengkajian, penerapan serta ivensi dan inovasi.	Secara kebijakan riset, pada tahun 2022, 2023, dan 2024 terjadi 22, 23, 23 kegiatan riset yang dilakukan pada lampiran yang disediakan oleh Bapperida. Akan tetapi, pada tahun 2023, masih terdapat kurangnya pemanfaatan teknologi dalam perekonomian masyarakat karena terbatas pada penggunaan aplikasi Tumbas untuk pemasaran produk UMKM dan aplikasi pendampingan legalitas usaha yakni Pengusaha Keren.	Pada hal ini, tidak terdapatnya gap antara kondisi eksisting dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan peraturan yang mengatur riset dan inovasi sesuai dengan Ketentuan BRIDA
Sudah memiliki platform yang menaungi kebijakan mengenai basis data pendukung riset dan inovasi	Terdapat penggunaan basis data yang mendukung riset dan inovasi di daerah	Terdapat kebijakan mengenai basis data pendukung riset dan inovasi yakni di dalam Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto yang mengintegrasikan seluruh data yang ada	Sudah terdapat basis data pendukung riset dan inovasi tetapi masih kurang dalam pengintegrasian basis data untuk mendukung riset

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

		di Kabupaten Mojokerto	dan inovasi di daerah
Program pemanfaatan pengembangan basis sudah terarah untuk mengembangkan PUD dan penyelesaian masalah daerah	Diharapkan pengembangan basis dapat mengembangkan proses produksi hingga pemasaran PUD dan dapat menciptakan produktivitas masyarakat di Kabupaten Mojokerto	Terdapat penggunaan basis data dalam pengembangan PUD yakni pada pemasaran melalui aplikasi Tumbas di bawah kendali Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dan aplikasi Pengusaha Keren yang dapat mempermudah pendampingan legalitas usaha dan konsultasi elektronik bagi pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil survey, tidak semua UMKM tersinkronisasi oleh pendataan karena tidak semua mengurus perizinan usaha, untuk industri kecil menengah sendiri hanya tercatat 1989 usaha yang terdaftar dalam perizinan berusaha pada tahun 2024. Hal ini dibuktikan juga dengan permasalahan terkait digitalisasi sistem perdagangan dalam mendukung kegiatan ekonomi	Pengembangan basis data untuk pengembangan PUD dan penyelesaian masalah daerah sudah tersedia tetapi masih kurang maksimal karena berfokus pada pemasaran melalui aplikasi Tumbas dan pendampingan legalitas usaha yakni aplikasi Pengusaha Keren.
Sudah ada instansi yang menaungi perumusan kebijakan dan perencanaan di bidang	Terdapatnya lembaga yang menaungi perumusan kebijakan dan perencanaan di bidang	Dinas Kementerian Informasi dan Komunikasi merupakan lembaga yang mengembangkan infrastruktur	Sudah terdapat lembaga yang menaungi perumusan kebijakan dan perencanaan di

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

infrastruktur pendukung riset dan inovasi	infrastruktur pendukung riset dan teknologi seperti pengembangan jaringan telekomunikasi, ketersediaan penyedia jaringan seluler dan internet, dan infrastruktur pemerintahan dan data dan pengelolaan sistem informatika	pendukung riset dan teknologi berdasarkan Buku Smart City Kabupaten Mojokerto	bidang infrastruktur riset dan inovasi
Sudah ada program pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur untuk membangun PUD dan penyelesaian permasalahan daerah	Terdapatnya program pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur untuk membangun PUD dan menyelesaikan permasalahan daerah	Terdapat peraturan bupati yang mengatur penyelenggaraan satu data palapa yang bertujuan untuk menghasilkan data terpadu, berkelanjutan, dan pasti melalui pemenuhan standar data,, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk tetapi dari basis data yang ada belum terintegrasi dengan pengembangan PUD secara konkrit. Selain itu, terdapat pula Buku Analisis <i>Smart City</i> Kabupaten Mojokerto yang menjadi panduan perencanaan dan pengembangan <i>smart city</i> di Kabupaten Mojokerto bagi perangkat atau organisasi daerah	Kurangnya integrasi basis data dengan penyelesaian permasalahan daerah dalam konteks pengembangan PUD Kabupaten Mojokerto

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Tabel 4.2 Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kriteria	Kondisi yang diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Ketersediaan platform kelembagaan atau kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi	Platform kelembagaan memiliki kerjasama dalam pengembangan riset dan inovasi	Terdapat platform kerjasama kelembagaan dalam pengembangan riset dan inovasi seperti melakukan penelitian bersama-sama dari Bapperida dengan lembaga lain pada tahun 2022-2024.	Sudah terdapat platform kerjasama dalam pengembangan riset dan inovasi di lingkungan PEMDA
Adanya program yang kontinu mewadahi kolaborasi dalam mengembangkan riset dan inovasi	Terdapatnya program yang mewadahi kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi	Program yang ada belum memiliki kontinuitas karena terbatas pada penyelenggaraan kolaborasi per proyek dari OPD dengan lembaga lain	Belum adanya program yang kontinu dalam mewadahi kolaborasi dalam mengembangkan riset dan inovasi di daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Tabel 4.3 Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi

Kriteria	Kondisi yang diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Pemenuhan aspek difusi inovasi (inovasi, saluran komunikasi dan system sosial)	Terdapatnya aspek difusi inovasi secara komprehensif dari inovasi, saluran komunikasi, dan sistem sosial	Berdasarkan data yang ada di lapangan, aspek yang tersedia terbatas pada inovasi dan saluran komunikasi sehingga masih belum ada sistem sosial dalam difusi inovasi	Belum tersedianya sistem sosial dalam kerangka difusi inovasi
Pemenuhan kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi	Terdapat kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi untuk mempercepat pembangunan	Dalam pelaksanaan difusi inovasi, sudah terdapat kemitraan dengan lembaga lain seperti Universitas atau konsultan swasta dalam pelaksanaan difusi inovasi	Sudah terdapat kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi di Kabupaten Mojokerto

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

	teknologi di daerah		
--	---------------------	--	--

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4. Budaya Riset dan Inovasi

Tabel 4.4 Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi

Kriteria	Kondisi yang diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Telah memiliki saluran atau media dalam promosi dan kampanye inovasi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam penyusunan strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mana salah satunya adalah penyelenggaraan basis data tunggal, penyediaan katalog promosi digital UKM Ekspor, dan Pengembangan Kemitraan Strategis UMKM Masuk Rantai Pasok.	Basis data tunggal belum digunakan secara total dalam melakukan pendataan terkait promosi ataupun kampanye inovasi produk unggulan daerah pada saat ini	Belum dilakukannya pendataan terkait promosi atau kampanye inovasi produk unggulan daerah
Pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam pengembangan PUD	Seharusnya terdapat kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam pengembangan PUD agar dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha dan peningkatan	Belum terdapatnya pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam pengembangan PUD	Belum terdapatnya pelaksanaan kompetisi atau pemberian penghargaan dalam pengembangan PUD yang mana seharusnya ada

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

	penggunaan teknologi		
Pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam penyelesaian PPD	Seharusnya terdapat kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam pengembangan PUD agar dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan penggunaan teknologi	Belum terdapatnya pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam penyelesaian PPD	Belum terdapatnya pelaksanaan kompetisi atau pemberian penghargaan dalam penyelesaian PPD yang mana seharusnya ada
Keberadaan unit pengembang perusahaan pemula	Terdapat unit atau lembaga pengembang perusahaan pemula untuk mengembangkan produk unggulan daerah	Peran pengembang perusahaan pemula untuk mengembangkan produk unggulan daerah diberdayakan melalui aplikasi Pengusaha Keren yang berfokus pada pendampingan legalitas usaha yang dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sudah terdapat lembaga pengembang perusahaan pemula tetapi hanya berfokus pada pendampingan legalitas sehingga belum terfokus pada pembinaan pengembangan PUD
Jumlah PUD yang sudah mendapatkan HKI terkait pengembangan teknologi dan inovasi	Berdasarkan peraturan yang ada, diharapkan seluruh pengembangan teknologi dan inovasi memiliki hak kekayaan intelektual	Belum terdapat catatan terkait pengelolaan HKI atau perlindungan pengetahuan lain dalam pengembangan teknologi dan inovasi yang dilakukan Kabupaten Mojokerto	Belum tersedianya pengelolaan HKI atau perlindungan pengetahuan lain yang mana seharusnya terdapat perlindungan pengetahuan dalam pengembangan teknologi dan inovasi

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Tabel 4.5 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi

Kriteria	Kondisi yang diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Kebijakan mengenai pembentukan klaster inovasi	Terdapatnya kebijakan yang mengatur pembentukan klaster inovasi untuk mengembangkan produk unggulan daerah dalam konteks pembangunan ekonomi dan industri kreatif	Terdapatnya pembentukan klaster inovasi riset dan inovasi daerah yakni tersebar 105 Sentra Industri UMKM yang ada di Kabupaten Mojokerto berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/789/hk/416-012/2024.	Sudah terdapat klaster inovasi riset dan inovasi di daerah untuk memicu pembangunan ekonomi dan industri kreatif
Kontinuitas program dalam pengembangan klaster inovasi	Terdapatnya kebijakan yang kontinu dalam pengembangan program yang ada di klaster inovasi	Belum terdapatnya program yang kontinu dalam pengembangan klaster inovasi	Belum terdapatnya kontinuitas program dalam pengembangan klaster inovasi

Sumber: Hasil Analisis, 2025

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Tabel 4.6 Analisis Kesenjangan Penyelarasan Perkembangan Global

Kriteria	Kondisi yang diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Menerapkan standar internasional dalam proses produksi PUD	Proses produksi PUD seharusnya dapat menerapkan standar internasional atau berbasis SDGs dalam pembuatan hingga pemasaran agar terjadi perkembangan teknologi di masyarakat	Tidak adanya keterkaitan antara pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah dengan standar internasional ataupun isu berbasis SDGs di Kabupaten Mojokerto	Belum ada penerapan standar internasional dalam proses produksi PUD yang mana seharusnya terdapat standarisasi internasional dalam produksi PUD

Sumber: Hasil Analisis, 2025

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

4.2 Analisis Kesenjangan Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Perlunya Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat

Tabel 4.7 Analisis Kesenjangan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Ekosistem Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah				
1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Sudah memiliki platform kebijakan bidang riset dan inovasi sesuai ketentuan BRIDA	Terdapat kebijakan daerah yang mendukung penyusunan rekomendasi perencanaan berbasis riset oleh BRIDA dan OPD teknis	Belum semua kebijakan mengintegrasikan hasil riset, dan peran BRIDA belum maksimal dalam kebijakan berbasis bukti	Belum ada sistem yang mendorong sinergi lintas OPD untuk mendukung riset berbasis kebutuhan pembangunan
2. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	Sudah memiliki instansi yang menaungi kebijakan mengenai basis data pendukung riset dan inovasi	Lembaga teknis (BRIDA atau OPD terkait) memiliki basis data dan kapasitas data riset secara berkelanjutan	Lembaga pengelola belum difokuskan untuk peran ini; data tersebar di berbagai OPD tanpa keterpaduan	Tidak ada sistem terpadu yang mendukung integrasi data riset; kelembagaan belum siap menjalankan peran koordinatif
	Program pemanfaatan dan pengembangan basis data sudah terarah untuk pengembangan PUD dan penyelesaian masalah daerah	Program disusun berdasarkan pemetaan data PUD dan PPD	Belum ada pemetaan atau database PUD dan PPD sebagai dasar penyusunan program	Pemanfaatan basis data belum mengarah pada evidence-based policy di tingkat sektoral maupun lintas sektor
3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	Sudah ada instansi yang menaungi perumusan kebijakan dan perencanaan di bidang	Kelembagaan formal dengan tupoksi yang jelas untuk pengembangan dan pengelolaan infrastruktur riset	Belum ada unit khusus di daerah yang bertanggung jawab pada infrastruktur riset	Ketiadaan kelembagaan menyebabkan rendahnya pengembangan sarana riset

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
	infrastruktur pendukung riset dan inovasi		(laboratorium, pusat data, dll.)	dan inovasi di daerah
	Sudah ada program pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur untuk membangun PUD dan penyelesaian PPD	Terdapat proyek atau fasilitas pendukung riset tematik sesuai kebutuhan PUD dan masalah strategis daerah	Belum tersedia roadmap atau inisiatif pembangunan infrastruktur riset sesuai sektor prioritas	Tidak ada platform fisik dan digital yang memadai untuk kegiatan riset dan uji coba inovasi lokal
4. Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Nilai dan persentase anggaran bagi kegiatan kajian dan inovasi	Minimal 1% dari APBD dialokasikan untuk riset dan inovasi, sesuai arahan nasional	Belum ada alokasi khusus atau masih bergabung dalam program kegiatan umum OPD	Riset dan inovasi belum menjadi prioritas pendanaan mandiri, menyebabkan ketergantungan pada dukungan eksternal
Ekosistem Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
a. Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Ketersediaan platform kolaborasi • Adanya program kontinu yang mewadahi kolaborasi riset dan inovasi	Tersedia wadah sinergi yang memfasilitasi riset kolaboratif antar pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat secara terjadwal dan berkelanjutan	Kolaborasi masih minim, berbasis proyek, dan belum terstruktur dalam platform kelembagaan tetap	Belum tersedia sistem/platform kelembagaan permanen yang mewadahi kolaborasi lintas sektor secara terjadwal
			Program kolaborasi hanya bersifat ad-hoc dan tidak berkelanjutan	Tidak ada skema jangka panjang kolaborasi riset dan inovasi
b. Penyediaan sarana pendukung riset	• Ketersediaan untuk pengembangan	Memiliki laboratorium, teknologi dan	Ketersediaan masih sangat terbatas; sarana	Aset pendukung riset dan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
dan inovasi yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	riset dan inovasi • Realisasi pengembangan riset dan inovasi	perangkat pendukung yang dimanfaatkan untuk kegiatan riset daerah	riset belum tersedia secara khusus; belum terhubung dengan kebutuhan sektor unggulan	inovasi belum dialokasikan secara spesifik dan belum difungsikan secara optimal
			Belum ada roadmap atau alokasi APBD untuk pengembangan riset-inovasi	Kesenjangan antara potensi kebutuhan dan dukungan infrastruktur fisik riset
Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi				
Peningkatan difusi Inovasi	Pemenuhan aspek difusi inovasi			
	• Inovasi	• Inovasi pelatihan bersifat sistemik, mendorong transformasi sosial, dan berbasis kebutuhan lokal secara menyeluruh.	• Terdapat program pelatihan vokasional, pelatihan UMKM, dan program Majapahit Cerdas melalui layanan pelatihan berbasis desa. Namun inovasi masih bersifat teknis, belum sistematis, dan belum menyentuh transformasi kapasitas masyarakat secara menyeluruh.	• Pendekatan inovasi masih fragmentaris dan belum fokus pada perubahan sosial menyeluruh.
	• Saluran Komunikasi	• Tersedianya kanal komunikasi dua arah yang interaktif, menjangkau kelompok rentan,	• Komunikasi difusi masih melalui media sosial OPD atau saat pelaksanaan pelatihan. Belum	• Saluran informasi belum partisipatif dan belum menyentuh

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		dan berbasis komunitas.	ada saluran interaktif dua arah untuk menjangkau masyarakat luas. Informasi belum disampaikan dalam bahasa yang inklusif dan menjangkau kelompok marjinal.	kelompok sulit akses (desa terpencil, disabilitas, dll).
	· Sistem Sosial	· Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok komunitas sosial lokal.	· Peran perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pelatihan cukup penting, namun belum seluruh desa aktif. Keterlibatan pemuda, perempuan, dan komunitas sosial belum merata.	· Masih rendahnya partisipasi sosial lintas kelompok masyarakat dalam penyebaran informasi.
	Pemenuhan kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi	· Terbangunnya forum kolaboratif antar-OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas dalam penyusunan serta pelaksanaan pelatihan.	· Kemitraan terbatas pada OPD teknis dan balai pelatihan. Keterlibatan kampus lokal dan dunia usaha belum optimal. Belum ada forum atau platform koordinasi SDM lintas sektor untuk menyatukan pelatihan dengan kebutuhan nyata	· Belum ada wadah kolaboratif terpadu untuk menyatukan kebutuhan pelatihan dan dunia kerja.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
			masyarakat dan dunia kerja.	
Ekosistem Budaya Riset dan Inovasi				
. Promosi dan Kampanye Inovasi	Telah memiliki saluran atau media dalam promosi dan kampanye inovasi	· Tersedia saluran informasi resmi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan strategi konten yang disesuaikan untuk berbagai segmen (UMKM, kelompok rentan, generasi muda, dll.), serta aktif mengangkat hasil inovasi daerah.	· Pemkab Mojokerto aktif mempromosikan inovasi melalui website resmi OPD seperti Diskopum dan Diskominfo, kanal media sosial Instagram dan YouTube, serta portal berita lokal. Contohnya, pelatihan branding produk dan promosi digital kepada 180 UMKM di Kelurahan Mojosari melalui kolaborasi kreator konten & influencer media sosial (Radar Mojokerto, 10 Jul 2024).	· Kanal promosi sudah aktif melalui media sosial, website OPD, dan kolaborasi influencer; namun belum terintegrasi secara sistemik dan belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat secara merata.
	Secara rutin, terarah dan kontinu melakukan promosi dan kampanye terhadap inovasi penyelesaian PPD	· Tersedianya strategi komunikasi publik yang terencana dan berkelanjutan terkait berbagai inovasi PPD, termasuk kampanye sosial tematik secara lintas sektor yang melibatkan berbagai stakeholder (OPD,	· Program pelatihan dan sosialisasi berlangsung secara berkala, seperti workshop pelatihan branding dan manajerial UMKM. Dinas Koperasi & BPJamsostek juga rutin menggelar sosialisasi	· Program pelatihan dan sosialisasi rutin dilakukan, namun kampanye publik masih berfokus pada UMKM dan belum banyak menysasar inovasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		komunitas, media, akademisi).	kewirausahaan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan pelaku usaha mikro. Meskipun demikian, kampanye lebih banyak menyasar UMKM atau peserta pelatihan, sementara kampanye inovasi terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum belum terstruktur dalam format kampanye publik terjadwal seperti event tahunan atau konten seri edukatif.	secara luas. Kurangnya event publik berskala besar dan kampanye visualisasi konten tematik PPD.
Apresiasi Prestasi Inovasi;	Pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam penyelesaian PPD	· Tersedianya skema kompetisi inovasi daerah yang inklusif dan berjenjang (desa–kecamatan–kabupaten), disertai dengan penghargaan rutin yang berbasis indikator kinerja dan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Adanya sistem penghargaan internal antarlini OPD dan insentif	· Kabupaten Mojokerto secara aktif mendorong apresiasi inovasi melalui berbagai penghargaan, seperti penghargaan Top 30 Inovasi Terpuji KOVABLIK Jatim 2023 atas inovasi Teropong Sakti oleh Puskesmas Ngoro, serta penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dalam IGA 2024	· Kabupaten telah aktif mengikuti ajang eksternal, namun belum memiliki sistem penghargaan atau kompetisi inovasi secara internal yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat lokal. Belum ada insentif formal untuk inovator lokal

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		inovasi untuk mendorong budaya kompetitif dalam pelayanan publik.	dari Kemendagri. Meraih dua penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Jatim 2024 — kategori pemerintah Kabupaten/Kota terCETTAR dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi ketiga (nilai IKM 88,88%). Upaya ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendorong inovasi berbasis layanan publik untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.	(desa/OPD), serta belum tersedia mekanisme penilaian inovasi berbasis dampak terhadap kualitas hidup.
c. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Hasil kajian yang terdaftar pada HKI	· Tersedianya sistem dan kebijakan daerah yang mendorong pendokumentasian dan pendaftaran hasil kajian atau inovasi masyarakat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan	· Pencatatan hasil kajian masyarakat yang terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih sangat terbatas, khususnya yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Meskipun beberapa perangkat daerah telah	· Belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan untuk pendaftaran HKI, serta minimnya fasilitasi daerah dalam mendorong perlindungan hasil kajian lokal, menyebabkan inovasi dan potensi teknologi masyarakat belum tercatat

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		masyarakat secara berkelanjutan.	memfasilitasi sosialisasi dan pendampingan pendaftaran HKI, sebagian besar inovasi lokal termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi tepat guna belum terdaftar secara resmi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem inventarisasi dan perlindungan hasil kajian sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan.	secara resmi sebagai HKI.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Belum adanya rantai produksi yang komprehensif dan diversifikasi produk yang berdaya saing

Tabel 4.8 Analisis Kesenjangan Rantai Produksi yang Komprehensif dan Diversifikasi Produk yang Berdaya Saing

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Ekosistem Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah				
1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Sudah memiliki platform kebijakan riset dan inovasi terkait peningkatan nilai tambah	Terdapat kebijakan yang fokus pada hilirisasi hasil riset untuk memperkuat rantai produksi dan inovasi produk daerah	Belum terdapat kebijakan yang spesifik mendukung hilirisasi hasil riset untuk produk unggulan	Belum optimalnya kebijakan riset dan inovasi yang diarahkan pada penguatan sektor produksi dan diversifikasi produk PUD

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
	produk unggulan daerah (PUD)			
2. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	a. Sudah memiliki instansi yang menaungi kebijakan basis data riset dan inovasi	BRIDA dan OPD sektor memiliki sinergi kelembagaan dalam pengelolaan data riset dan inovasi	Terdapat keterpisahan antara data riset di BRIDA dan data produksi/UMKM di OPD sektor	Fragmentasi kelembagaan dan data antara BRIDA dan OPD sektor
	b. Program basis data riset terarah untuk pengembangan rantai produksi dan PUD	Basis data riset mendukung analisis rantai nilai, produksi, dan peluang hilirisasi produk	Basis data riset belum mengintegrasikan informasi ekonomi lokal dan rantai pasok	Basis data belum menyatu dengan sistem informasi produksi dan potensi UMKM/IKM lokal
3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	a. Sudah ada perangkat untuk mengembangkan infrastruktur pendukung riset berbasis sektor produksi	Infrastruktur dasar (contoh: laboratorium produk, industri, bisnis) tersedia di sektor-sektor prioritas (makanan, kerajinan, dll)	Fasilitas inkubasi produk masih terbatas dan belum menjangkau lintas sektor	Terbatasnya fasilitas riset dan inkubasi produk untuk hilirisasi sektor strategis daerah
	b. Sudah ada program pemanfaatan infrastruktur riset	Program pengembangan produk berbasis hasil riset berjalan dan menyasar	Belum ada program kolaboratif yang menjembatani hasil riset dan dunia usaha/UMKM	Keterputusan antara hasil riset dan pelaku usaha lokal sebagai pengguna inovasi

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
	untuk membangun rantai produksi	komoditas prioritas		
4. Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Nilai dan persentase anggaran untuk mendukung riset yang mengarah pada diversifikasi dan peningkatan nilai produk	Alokasi anggaran meningkat untuk mendukung produk lokal inovatif dan hilirisasi hasil riset	Porsi anggaran riset masih kecil dan tersebar tanpa prioritas pada produk unggulan	Minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan dan hilirisasi riset sektor produksi
Ekosistem Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
a. Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	- Ketersediaan platform kolaborasi – Adanya program yang kontinu mewadahi kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi berbasis produksi dan diversifikasi produk	- Tersedia forum atau sistem koordinasi lintas sektor antara BRIDA, OPD teknis, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM/industri – Terselenggara program riset berbasis hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan daerah secara periodik	- Belum tersedia platform formal untuk kolaborasi riset inovasi yang fokus pada diversifikasi produk – Program kolaboratif masih bersifat stagnan dan tidak berbasis roadmap produk unggulan	- Ketiadaan wadah yang menghubungkan industri, pelaku usaha, dan institusi riset – Belum ada sistem pembinaan produk lokal berbasis riset secara berkelanjutan
b. Penyediaan Sarana	- Ketersediaan	- Tersedia fasilitas laboratorium	- Fasilitas dan sarana masih belum optimal dan	- Sarana belum disesuaikan dengan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Pendukung Riset dan Inovasi yang Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah	platform yang dapat digunakan untuk mendukung diversifikasi dan pengembangan produksi – Realisasi pemanfaatan atau pengembangan industri untuk riset dan inovasi	sederhana dan bisnis yang menunjang prototipe produk – Terdapat kebijakan pemanfaatan ruang kreatif atau techno park untuk UKM berbasis riset	belum fokus pada sektor PUD unggulan – Inkubator belum terhubung dengan hasil riset atau data pasar yang komprehensif	kebutuhan sektor industri kreatif dan agribisnis unggulan – Belum ada integrasi infrastruktur dengan roadmap PUD dan PPD
Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi				
Peningkatan difusi Inovasi	Pemenuhan aspek difusi inovasi			
	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya ekosistem inovasi berbasis riset yang mendukung rantai produksi dari hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa UMKM telah melakukan diversifikasi produk seperti olahan pangan dan kerajinan, namun belum terbentuk rantai produksi yang utuh dari hulu ke hilir. Inovasi bersifat teknis dan belum didukung sistem riset atau inkubasi terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi masih bersifat teknis individual, belum didukung kelembagaan riset dan sistem inkubasi yang menyeluruh.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
	· Saluran Komunikasi	· Tersedianya saluran komunikasi aktif dan rutin antar pelaku usaha, OPD, dan lembaga pendidikan dalam forum lintas sektor di level kabupaten dan kecamatan.	· Sudah terdapat pelatihan branding, promosi digital, dan penggunaan platform daring seperti Tumbas serta SIKOMIK, namun belum ada forum komunikasi rutin lintas pelaku usaha, OPD, dan kampus di tingkat kabupaten maupun kecamatan.	· Belum tersedia forum kolaboratif berkelanjutan yang mempertemukan aktor-aktor utama dalam rantai inovasi dan produksi.
	· Sistem Sosial	· Masyarakat desa dan komunitas lokal aktif terlibat dalam pengembangan inovasi dan mendukung pelaku usaha mikro melalui sistem sosial yang mendorong kolaborasi.	· Keterlibatan komunitas IKM/ekraf dan jejaring UMKM sudah ada melalui pelatihan atau event, namun belum menjangkau pelaku usaha mikro di desa terpencil. Sistem sosial desa belum seluruhnya mendukung kolaborasi pengembangan produk inovatif.	· Dukungan sosial belum menyeluruh, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan wilayah terpencil. Kolaborasi sosial belum terstruktur.
	Pemenuhan kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi	· Terbentuknya kemitraan strategis dan berkelanjutan antara Pemkab, dunia usaha, akademisi, dan komunitas dalam mendukung	· Kolaborasi Pemkab, Diskopum, platform digital lokal, dan ritel modern mulai membuka akses pasar, namun kemitraan riset dan produksi	· Kemitraan belum optimal, belum terbangun jejaring berkelanjutan antar sektor untuk mendukung alur riset-produksi-pasar.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		hilirisasi inovasi ke pasar.	massal dengan perguruan tinggi atau industri besar belum berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan.	
Ekosistem Budaya Riset dan Inovasi				
. Promosi dan Kampanye Inovasi	Telah memiliki saluran atau media dalam promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> · Tersedianya platform kampanye digital dan media promosi yang terintegrasi, menampilkan narasi rantai produksi daerah secara utuh mulai dari hulu ke hilir, serta mampu menarik kolaborasi sektor swasta, akademisi, dan komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> · Pemerintah telah menggunakan saluran seperti Satu Data Palapa, aplikasi Tumbas Disperindag, serta media sosial OPD untuk menyebarkan informasi terkait produk unggulan. Namun belum ada platform kampanye kolaboratif yang menampilkan rantai produksi lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> · Pemerintah telah memanfaatkan media sosial dan kanal resmi OPD, namun belum ada platform kampanye kolaboratif yang menyajikan narasi lengkap rantai produksi unggulan secara visual dan interaktif.
	Secara rutin, terarah dan kontinu melakukan promosi dan kampanye terhadap penyelesaian PPD	<ul style="list-style-type: none"> · Terselenggaranya kampanye tematik dan terpadu secara berkala, melalui festival produk unggulan, konten kreatif edukatif, serta event lintas sektor untuk memperkuat citra dan daya saing produk lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> · Adanya pelatihan manajerial, branding, dan diversifikasi produk yang dilaksanakan secara periodik bagi UMKM (melalui Disperindag / Diskopum), namun belum ada kampanye publik terjadwal seperti festival produk unggulan atau 	<ul style="list-style-type: none"> · Kegiatan pelatihan dan diversifikasi produk sudah berjalan, namun kampanye publik masih belum konsisten dan belum dikemas dalam bentuk promosi visual naratif atau kegiatan promosi yang sistematis dan berkelanjutan.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
			konten video naratif sebagai bagian dari promosi terstruktur.	
Apresiasi Prestasi Inovasi;	Pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam penyelesaian PPD	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya ajang kompetisi inovasi daerah yang secara khusus mendorong penguatan rantai nilai produksi dan diversifikasi produk unggulan lokal yang berdaya saing. Penghargaan diarahkan untuk inovasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal, keberlanjutan produk, dan penciptaan nilai tambah berbasis potensi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan komitmen terhadap penguatan inovasi dalam sektor produksi dan diversifikasi produk melalui berbagai ajang penghargaan, seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) dan Innovative Government Award (IGA). Namun, apresiasi terhadap inovasi yang fokus pada penguatan rantai produksi dan hilirisasi produk unggulan daerah masih terbatas, sehingga dibutuhkan lebih banyak kompetisi riset dan penghargaan inovatif yang menjangkau sektor pertanian, peternakan, dan industri kreatif lokal sebagai bagian dari 	<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan terhadap inovasi sudah diberikan, namun belum spesifik mendorong riset dan inovasi yang fokus pada pengembangan rantai produksi komprehensif dan diversifikasi produk lokal secara menyeluruh. Kompetisi inovasi yang ada belum menjadi instrumen sistemik untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis riset dan inovasi terarah.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Hasil kajian yang terdaftar pada HKI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil kajian inovasi terdaftar pada HKI dan dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM. Rantai produksi terintegrasi secara menyeluruh. Diversifikasi produk meningkat dan didukung kolaborasi lintas sektor untuk memperluas daya saing pasar. 	<p>penguatan daya saing daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan inisiatif dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual, terutama di sektor UMKM dan produk lokal. Namun, pemanfaatan hasil inovasi dan kekayaan intelektual tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam rantai produksi yang komprehensif. Diversifikasi produk juga masih terbatas pada skala kecil dan belum didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang kuat, sehingga daya saing produk daerah masih rendah di pasar yang lebih luas. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil inovasi belum seluruhnya didaftarkan sebagai HKI. Pemanfaatan HKI belum masuk dalam rantai produksi yang komprehensif. Diversifikasi masih terbatas dan kolaborasi antar sektor masih lemah.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3. Perlunya pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pengembangan ekonomi, lingkungan hidup, fungsi-fungsi kawasan, dan kualitas hidup masyarakat

Tabel 4.9 Analisis Kesenjangan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Ekosistem Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah				

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Tersedianya kebijakan riset dan inovasi untuk pembangunan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan	Kebijakan riset dan inovasi mendukung transisi energi bersih, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan adaptasi iklim	Kebijakan masih bersifat umum, belum spesifik mendorong inovasi untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Belum ada kebijakan riset yang secara eksplisit mendukung teknologi dan inovasi infrastruktur hijau dan resilient
2. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	Basis data mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur yang adaptif dan inklusif	Data riset mendukung pemetaan risiko lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perencanaan infrastruktur berkelanjutan	Basis data spasial dan ekosistem belum terintegrasi dengan sistem perencanaan infrastruktur	Data riset dan data lingkungan hidup belum sepenuhnya mendukung perencanaan infrastruktur berkelanjutan
3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	a. Tersedianya fasilitas riset untuk inovasi teknologi ramah lingkungan	Tersedia laboratorium, pusat teknologi, atau inovasi untuk pengembangan green technology dan smart infrastructure	Minim fasilitas pengujian dan pengembangan teknologi untuk lingkungan dan infrastruktur pintar	Keterbatasan sarana-prasarana riset teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur cerdas
	b. Infrastruktur riset mendukung pengelolaan sumber daya air, energi, dan limbah	Adanya sarana riset untuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengolahan limbah terintegrasi	Belum tersedia laboratorium atau fasilitas penelitian energi baru terbarukan (EBT) secara lokal	Belum ada fokus infrastruktur riset untuk mendukung solusi pengelolaan SDA secara berkelanjutan
4. Penyediaan	Porsi anggaran memadai untuk mendanai riset	Terdapat alokasi prioritas bagi	Anggaran riset tidak mengarah secara spesifik	Anggaran riset belum dialokasikan dengan pendekatan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Anggaran Riset dan Inovasi	infrastruktur berkelanjutan	riset sektor energi, air, transportasi hijau, dan lingkungan	pada sektor infrastruktur berkelanjutan	tematik pada isu keberlanjutan
Ekosistem Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Gap
a. Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	- Ketersediaan platform kolaborasi – Adanya program kontinu untuk kolaborasi riset terkait infrastruktur hijau dan teknologi ramah lingkungan	- Terbentuk forum lintas sektor (BRIDA, Dinas PUPR, LH, akademisi, swasta) untuk pengembangan teknologi infrastruktur hijau – Terselenggara program riset-inovasi terkait efisiensi energi, bangunan hijau, pengelolaan air dan limbah	- Belum tersedia forum formal yang menghubungkan pengambil kebijakan, akademisi, dan pelaku 111ndustry konstruksi berkelanjutan – Riset mengenai teknologi infrastruktur masih minim dan belum menjadi prioritas	- Ketiadaan sistem koordinasi dan jejaring untuk riset infrastruktur berkelanjutan – Minimnya insentif dan integrasi program inovasi dengan agenda pembangunan infrastruktur
b. Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi yang Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah	- Ketersediaan industri yang dapat digunakan untuk pengembangan teknologi infrastruktur hijau dan lingkungan – Realisasi pemanfaatan/pengembangan riset dan inovasi infrastruktur berkelanjutan	- Terdapat beberapa laboratorium seperti laboratorium teknik sipil dan lingkungan di perguruan tinggi lokal – Terdapat area percontohan atau pilot project pembangunan dengan prinsip ramah lingkungan	- Belum ada fasilitas riset terpusat atau techno park khusus bidang teknologi bangunan hijau atau lingkungan – Skala pemanfaatan riset masih terbatas dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah	- Aset riset belum dikembangkan untuk fokus pada isu lingkungan dan pembangunan hijau – Belum ada pemetaan potensi daerah untuk mendukung riset infrastruktur berkelanjutan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi				
Peningkatan difusi Inovasi	Pemenuhan aspek difusi inovasi			
	· Inovasi	· Infrastruktur daerah dirancang secara inovatif dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi tepat guna, memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan integrasi fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis.	· Pemerintah daerah aktif membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan jaringan telekomunikasi melalui anggaran APBD dan BK Desa (~Rp121 Miliar untuk 236 kegiatan jalan & JUT) (Radar Mojokerto, Sept 2023; Harian Bangsa, 2024).	· Pembangunan masih bersifat fisik dan konvensional, belum berbasis inovasi teknologi dan prinsip keberlanjutan.
	· Saluran Komunikasi	· Tersedianya kanal komunikasi interaktif dan transparan yang melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan pembangunan.	· Informasi dan dokumen resmi tersedia di portal dan RPJMD, tetapi belum ada kanal komunikasi interaktif yang melibatkan masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan dalam forum formal, namun belum ada mekanisme partisipatif tentang rencana infrastruktur untuk publik (Harian Bangsa, 2024).	· Partisipasi publik masih rendah dan belum difasilitasi melalui saluran komunikasi interaktif dan terbuka.
	· Sistem Sosial	· Sistem sosial desa	· Masyarakat desa, terutama petani dan	· Forum warga belum inklusif,

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		aktif mendorong partisipasi kelompok rentan dan masyarakat adat/lokal dalam proses pembangunan infrastruktur dan tata ruang.	warga di desa terpencil, masih belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengembangan infrastruktur. Forum warga lokal hanya sebagian aktif diberdayakan, sementara perencanaan dampak sosial-lingkungan belum melibatkan seluruh komunitas kritis (PAFI/Blog Mojokerto).	belum menjangkau komunitas kritis dan rentan secara sistematis.
	Pemenuhan kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi	· Terbangun kemitraan lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas dalam pengembangan infrastruktur yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.	· Infrastruktur banyak dibiayai APBD dan program BK desa, sedangkan kemitraan dengan sektor swasta, pihak riset dan akademisi masih terbatas. Kolaborasi rekosistem dengan startup lingkungan dan JICA untuk pengelolaan sampah muncul sebagai terobosan, namun belum diterapkan secara luas di seluruh kabupaten.	· Kemitraan belum terbangun secara strategis dan berkelanjutan, belum melibatkan seluruh stakeholder kunci.
4. Ekosistem Budaya Riset dan Inovasi				
. Promosi dan Kampanye Inovasi	Telah memiliki saluran atau media dalam promosi dan	· Adanya media kampanye digital dan kanal	· Pemkab Mojokerto telah memanfaatkan media digital seperti website	· Kanal informasi OPD sudah digunakan, namun belum ada kampanye publik

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
	kampanye inovasi	komunikasi publik yang menyajikan informasi pembangunan infrastruktur secara utuh, inklusif, dan menarik. Menampilkan inovasi hijau, proyek ruang publik, hingga dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.	OPD (Diskominfo, Bappeda/Pemkab Mojokerto), Satu Data Palapa, serta media sosial untuk menyampaikan program infrastruktur berkelanjutan, sosialisasi Smart City, serta hasil pelaksanaan proyek jalan dan wisata ramah lingkungan (MoU Smart City dengan Kemenkominfo pada 2022). Namun belum ada kampanye publik visual atau event kreatif yang mempromosikan inovasi infrastruktur hijau atau proyek kesejahteraan masyarakat secara massif.	visual atau konten kreatif terpadu yang secara masif menyampaikan narasi inovasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan manfaatnya.
	Secara rutin, terarah dan kontinu melakukan promosi dan kampanye terhadap inovasi penyelesaian PPD	· Promosi dilakukan secara rutin dan strategis melalui konten serial digital, video edukatif, serta kegiatan literasi publik tahunan untuk membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur berkelanjutan.	· Promosi inovasi dilakukan secara berkala melalui laporan pembangunan jangka menengah dan penyampaian berita kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan, revitalisasi ruang publik, serta proyek wisata berkelanjutan (seperti Taman Bahari Majapahit	· Promosi masih bersifat informasi laporan proyek atau berita pembangunan fisik saja. Belum menyentuh bentuk kampanye edukatif atau partisipatif yang dirancang secara terstruktur dan menjadi bagian dari strategi komunikasi publik daerah.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
			senilai Rp 50 miliar). Meski demikian, bentuk promosi yang melibatkan masyarakat luas secara edukatif atau kreatif secara rutin (misalnya kampanye lingkungan digital, video serial kegiatan infrastruktur komunitas, agenda tahunan masyarakat) masih kurang terstruktur dan belum menjadi bagian dari strategi komunikasi publik Mojokerto.	
Apresiasi Prestasi Inovasi;	Pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam penyelesaian PPD	· Terselenggara kompetisi dan pemberian penghargaan inovasi yang mendorong pengembangan infrastruktur berkelanjutan, khususnya yang mendukung transportasi publik ramah lingkungan, sistem sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, dan ruang publik hijau secara menyeluruh dan	· Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan infrastruktur berkelanjutan melalui berbagai penghargaan seperti Anugerah Pandu Negeri 2024 dari IIPG atas tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Mojokerto juga meraih penghargaan	· Penghargaan terhadap pembangunan infrastruktur telah diterima, tetapi belum secara khusus mendorong inovasi dan riset di bidang infrastruktur berkelanjutan secara rutin dan menyeluruh, terutama pada isu sanitasi, ruang publik hijau, dan air bersih yang masih terbatas serta belum menjadi agenda inovasi yang konsisten di tingkat daerah.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		terintegrasi antarwilayah.	Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Kementerian Perhubungan atas inovasi pengelolaan transportasi berkelanjutan. Namun, secara khusus, pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan yang menargetkan inovasi di sektor infrastruktur hijau, ruang publik ramah lingkungan, atau sistem sanitasi dan air bersih masih terbatas dan belum menjadi agenda rutin di tingkat daerah.	
c. investasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Hasil kajian yang terdaftar pada HKI	· Tersedia data kajian yang lengkap dan terintegrasi, khususnya untuk infrastruktur berkelanjutan seperti teknologi lingkungan, sanitasi, dan arsitektur hijau. Hasil kajian telah terdaftar dalam HKI dan diakses melalui sistem	· Saat ini, belum tersedia data terbuka yang memetakan jumlah hasil kajian teknis seperti teknologi ramah lingkungan, sistem sanitasi berkelanjutan, atau rancangan green infrastructure yang telah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Mojokerto melalui portal resmi Satu Data Palapa. Hal tersebut	· Belum tersedia sistem data terbuka dan terintegrasi untuk mendata hasil kajian berkelanjutan yang terdaftar sebagai HKI. Pemanfaatan kajian untuk perencanaan dan pembangunan wilayah belum berjalan secara sistematis.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		informasi yang terbuka dan digunakan sebagai dasar perencanaan wilayah.	menunjukkan bahwa inovasi bidang infrastruktur berkelanjutan masih sebatas konsep dan belum diinventarisasi atau dilindungi secara hukum, sehingga potensi adopsi kajian lokal dalam pembangunan wilayah secara sistematis belum maksimal.	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4. Perlindungan sosial kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus

Tabel 4.10 Analisis Kesenjangan Perlindungan Sosial Kelompok Rentan dan Masyarakat Berkebutuhan khusus

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Ekosistem Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah				
1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Adanya kebijakan riset yang mendukung pengumpulan data dan inovasi kebijakan untuk kelompok rentan	Kebijakan riset berorientasi pada perlindungan anak, lansia, difabel, dan masyarakat miskin	Belum terdapat kebijakan riset spesifik yang mendukung pengembangan program sosial berbasis data lokal	Kebijakan riset belum memprioritaskan kelompok rentan sebagai objek riset strategis
2. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	a. Tersedianya data mikro kelompok rentan untuk intervensi berbasis bukti	Data individu/keluarga rentan yang real-time dan terintegrasi antar sektor	Data belum terintegrasi dan masih bersifat agregat (Dinsos, Dukcapil, Dinkes, dll.)	Keterbatasan data granular untuk mendesain intervensi perlindungan sosial yang tepat sasaran
	b. Interoperabilitas data antar instansi	Sistem data sosial saling terhubung antara OPD,	Masih terdapat silo data di antara institusi	Sistem informasi belum terintegrasi antar OPD untuk identifikasi dan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		desa/kelurahan, dan pusat		pemantauan kelompok rentan
3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	a. Adanya fasilitas riset sosial dan kesehatan masyarakat	Terdapat pusat studi sosial, sosial-ekonomi, dan fasilitas untuk pengembangan teknologi bantu	Keterbatasan pusat studi lokal dan fasilitas riset terkait kesejahteraan sosial	Belum tersedia fasilitas riset sosial dan pengembangan teknologi tepat guna untuk kelompok rentan
	b. Inovasi sosial untuk pelayanan dasar yang inklusif	Pengembangan teknologi pelayanan dasar yang menjangkau difabel dan wilayah tertinggal	Masih minim inovasi sosial lokal (contoh: pelayanan jemput bola, aplikasi inklusif, dsb.)	Minimnya inovasi berbasis riset untuk inklusivitas dan aksesibilitas layanan
4. Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Dukungan anggaran untuk riset sosial dan pengembangan program inklusif	Adanya skema pendanaan lokal untuk mendukung riset dan inovasi kebijakan sosial	Belum ada penganggaran khusus riset sosial atau berbasis gender/kelompok rentan	Pendanaan riset belum berpihak pada pendekatan inklusif untuk perlindungan sosial
Ekosistem Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
a. Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	- Ketersediaan platform kolaborasi – Adanya program kontinu untuk riset sosial inklusif	- Terbentuk forum kolaboratif antara BRIDA, Dinas Sosial, LSM, universitas, dan komunitas penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya – Adanya program riset dan inovasi sosial inklusif	- Kolaborasi dengan pihak eksternal (LSM atau universitas) masih bersifat ad hoc atau berbasis proyek jangka pendek – Belum ada pendekatan riset sosial yang sistematis terhadap isu kelompok rentan	- Tidak tersedia wadah kolaborasi berkelanjutan untuk pengembangan perlindungan sosial berbasis bukti – Riset-riset tidak terkoordinasi dengan kebijakan daerah

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		yang rutin dijalankan		
b. Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi yang Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah	- Ketersediaan industri yang dapat digunakan untuk riset sosial dan inovasi layanan perlindungan sosial – Realisasi pemanfaatan atau pengembangan untuk mendukung intervensi sosial inovatif	- Terdapat fasilitas layanan dasar seperti UPTD, shelter, dan rumah aman – Beberapa perguruan tinggi lokal memiliki pusat studi sosial atau gender	- Fasilitas riset tidak dioptimalkan untuk menghasilkan inovasi layanan sosial – Belum ada pusat data terpadu untuk perlindungan sosial daerah	- Aset riset tidak diarahkan untuk menghasilkan kebijakan berbasis data kelompok rentan – Keterbatasan sarana digital dan SDM dalam pemanfaatan teknologi sosial
Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi				
Peningkatan difusi Inovasi	Pemenuhan aspek difusi inovasi			
	· Inovasi	· Tersedianya perlindungan sosial berbasis inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan secara menyeluruh, termasuk pekerja informal, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.	· Pemkab telah meluncurkan program perlindungan jkn-jkk untuk pekerja rentan dan lembaga kemasyarakatan desa (16.382 orang) serta pekerja ekosistem desa (15.358 orang) melalui BPJS Ketenagakerjaan (alokasi Rp1,06 miliar/AP BD 2025).	· Program masih terfokus pada cakupan pekerja rentan dan ekosistem desa; belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan lain seperti penyandang disabilitas dan lansia.
	· Saluran Komunikasi	· Terbentuknya saluran komunikasi	· Dinas Sosial menggunakan layanan	· Kanal komunikasi sudah tersedia, namun belum

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		yang inklusif dan responsif terhadap seluruh komunitas rentan, dengan keterlibatan aktif dalam menyampaikan pengaduan dan menerima layanan sosial secara real-time.	pengaduan Sang Patih Kesos berbasis WhatsApp 24-jam dan MPP untuk memfasilitasi komunitas rentan dalam mengakses layanan sosial dan bantuan (bansos, alat bantu mobilitas dsb.)	sepenuhnya inklusif dan tidak semua kelompok rentan terjangkau secara digital atau memiliki kapasitas untuk mengaksesnya.
	· Sistem Sosial	· Sistem sosial yang menjamin partisipasi aktif semua kelompok rentan (terutama disabilitas, lansia, anak-anak) dalam proses perencanaan dan distribusi layanan sosial.	· Pemberdayaan rentan melalui jaminan sosial melibatkan RT/RW, BPD, LPM, karang taruna di 303 desa. Namun, partisipasi langsung penyandang disabilitas dan kelompok lansia masih terbatas sebagai penerima manfaat langsung.	· Partisipasi kelompok disabilitas dan lansia masih terbatas, sehingga belum menjadi subjek aktif dalam sistem perlindungan sosial.
	Pemenuhan kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi	· Kemitraan strategis antara Pemda, pelaku riset, LSM, perguruan tinggi, dan donor internasional untuk inovasi sosial berbasis komunitas rentan secara berkelanjutan.	· Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan berjalan aktif. Namun, kemitraan riset atau lembaga pendidikan/donatur untuk inovasi sosial berbasis komunitas belum berkembang secara strategis	· Kemitraan masih terbatas pada BPJS Ketenagakerjaan; belum melibatkan sektor riset dan inovatif untuk pengembangan perlindungan sosial secara sistemik dan berkelanjutan.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
dan berkelanjutan.				
Ekosistem Budaya Riset dan Inovasi				
. Promosi dan Kampanye Inovasi	Telah memiliki saluran atau media dalam promosi dan kampanye inovasi	· Tersedianya kanal digital yang tidak hanya menyampaikan informasi formal, tetapi juga memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah, penerima manfaat, dan masyarakat luas. Termasuk platform interaktif untuk menyampaikan keluhan, ide, atau inovasi masyarakat dalam perlindungan sosial.	· Pemerintah telah menggunakan media digital seperti website Pemkot Mojokerto, portal berita daerah, dan media sosial OPD (Dinas Sosial, Diskominfo). Informasi program perlindungan sosial seperti bansos BPNT, PKH, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan lansia dipublikasikan resmi dalam bentuk infografis dan artikel layanan publik (Pemekot Mojokerto, Desember 2024). Kanal ini berfungsi sebagai saluran informasi formal namun belum terdapat platform komunikasi interaktif antar penerima manfaat dan	· Kanal media digital sudah ada, namun belum ada integrasi fungsi interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah atau partisipasi publik dalam perbaikan program perlindungan sosial. Belum optimal sebagai media edukasi inovasi sosial.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
			penyelenggara program.	
	Secara rutin, terarah dan kontinu melakukan promosi dan kampanye terhadap inovasi penyelesaian PPD	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kampanye inovatif secara rutin dengan pendekatan humanistik, seperti testimoni penerima manfaat, serial edukasi inklusif, dan kegiatan literasi sosial yang melibatkan kelompok rentan, komunitas disabilitas, dan lansia. 	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye inovasi perlindungan sosial dilaksanakan secara berkala melalui sosialisasi program bantuan sosial (BPNT APBD, PKH, bansos lansia/disabilitas) dan pelatihan ekonomi inklusif bagi warga rentan (program bantuan modal usaha bagi tukang becak dan kelompok KUBE) (Pemkot Mojokerto, Desember 2024). Namun kegiatan ini bersifat informatif dan administratif, belum diformalkan dalam bentuk kampanye publik kreatif yang mengangkat kisah penerima manfaat atau edukasi masyarakat luas tentang inovasi sosial berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kampanye masih bersifat administratif dan informatif, belum menyentuh bentuk kampanye publik yang komunikatif, inspiratif, dan partisipatif. Belum ada narasi yang mengangkat inovasi sosial secara emosional dan membangun kesadaran publik.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Apresiasi Prestasi Inovasi;	Pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam penyelesaian PPD	· Adanya kompetisi dan sistem penghargaan daerah secara rutin yang secara khusus mendorong inovasi pelayanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak.	· Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperoleh penghargaan dari MenPAN-RB melalui inovasi SANG PATIH KESOS—layanan pengaduan sosial berbasis WhatsApp 24 jam yang mempermudah penyaluran bantuan sosial dan pengaduan rentan (Media Brantas, Des 2023). Meski inovasi ini diakui secara nasional, belum ada kompetisi atau penghargaan internal daerah khusus untuk inovasi sosial lainnya yang melibatkan kelompok rentan dan penyandang disabilitas.	· Penghargaan sudah diperoleh dari tingkat nasional, namun belum ada kompetisi internal dan sistem apresiasi daerah yang konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong inovasi sosial inklusif lintas sektor dan lintas kelompok rentan.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Hasil kajian yang terdaftar pada HKI	· Tersedia hasil kajian inovatif yang telah terdaftar pada sistem HKI dan fokus pada perlindungan sosial kelompok rentan serta masyarakat	· Saat ini, belum ditemukan hasil kajian terkait penyelesaian isu perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus di Kabupaten Mojokerto yang	· Belum ada kajian terkait perlindungan kelompok rentan yang terdaftar sebagai HKI. Hasil riset sosial belum terdokumentasi secara sistematis dan belum dimanfaatkan dalam kebijakan.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		berkebutuhan khusus. Kajian tersebut terdokumentasi dengan baik dan digunakan secara aktif dalam penyusunan kebijakan dan program penyelesaian masalah sosial.	telah didaftarkan atau tercatat dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan dokumentasi dan perlindungan atas hasil inovasi atau riset yang mendukung penyelesaian permasalahan sosial tersebut.	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5. Perlunya pengembangan organisasi pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis teknologi

Tabel 4.11 Analisis Kesenjangan Pengembangan organisasi Pemerintahan dan Layanan Masyarakat Berbasis Teknologi

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Ekosistem Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah				
1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	Adanya kebijakan riset dan inovasi untuk mendukung transformasi digital layanan publik	Kebijakan daerah mendorong pemanfaatan riset dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi	Belum ada kebijakan yang secara eksplisit menjadikan riset sebagai dasar transformasi layanan publik	Belum ada penguatan kebijakan riset untuk mendukung inovasi teknologi layanan pemerintahan
2. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	a. Sistem data manajemen kinerja organisasi dan pelayanan publik	Data kinerja birokrasi terintegrasi dengan layanan masyarakat dan evaluasi berbasis data	Masih banyak data pelayanan yang tidak terdokumentasi secara digital dan tidak terhubung	Basis data pelayanan belum mendukung inovasi manajemen modern dan responsif
	b. Integrasi data internal	Sistem informasi	Banyak OPD masih	Fragmentasi sistem

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
	antar OPD untuk pengambilan keputusan	manajemen lintas sektor OPD tersedia dan terintegrasi	mengelola data sendiri-sendiri tanpa integrasi ke sistem pusat	informasi internal menghambat pengembangan layanan berbasis teknologi
3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi	a. Adanya Command Center atau pusat kendali dan inovasi pelayanan publik	Terdapat Smart City Center, Innovation Hub atau Pusat Data Daerah	Belum semua fungsi smart city optimal dan belum dikembangkan sebagai pusat riset layanan publik	Infrastruktur fisik belum difungsikan untuk riset inovasi dan tata berbasis teknologi
	b. Pengembangan kebijakan dan lab inovasi pemerintahan	Lab inovasi kebijakan berbasis data dan partisipatif didirikan	Belum tersedia model lab inovasi atau ruang eksperimen kebijakan berbasis data di OPD	Belum ada ruang untuk uji coba, riset, dan replikasi kebijakan digital secara terstruktur
4. Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	a. Alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi layanan publik	Terdapat pendanaan daerah untuk pilot project riset layanan industri berbasis digital	Anggaran masih difokuskan pada infrastruktur dasar tanpa didukung riset inovasi	Minim dukungan pendanaan untuk riset dan eksperimen layanan digital
	b. Kolaborasi pembiayaan dengan industri riset/pendidikan	Tersedia skema kerja sama pembiayaan program inovasi pelayanan	Kolaborasi terbatas dan belum terstruktur dengan baik	Belum ada mekanisme pendanaan kolaboratif untuk riset tata industri dan teknologi publik
Ekosistem Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
a. Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di	- Ketersediaan platform kolaborasi – Adanya	- Terbangunnya kemitraan antara BRIDA,	- Beberapa aplikasi layanan industri telah	- Tidak tersedia forum sinergis untuk integrasi antar-inovator

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
Daerah dengan Pemangku Kepentingan	program kontinu untuk kolaborasi dalam pengembangan teknologi layanan publik	Dinas Kominfo, universitas, dan penyedia teknologi untuk merancang layanan berbasis digital – Program inkubasi inovasi layanan berbasis riset secara rutin	dikembangkan namun kurang terintegrasi dan tidak berbasis hasil riset mendalam – Kolaborasi bersifat stagnan dan belum menyentuh perbaikan sistem layanan secara menyeluruh	dan perumus kebijakan – Riset belum menjadi dasar utama dalam pengembangan platform layanan publik
b. Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi yang Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah	- Ketersediaan industri (lab digital, ruang uji coba layanan industri digital) – Realisasi pengembangan sarana dan sistem digital untuk uji coba dan prototyping inovasi layanan publik	- Tersedia beberapa perangkat dan sistem layanan digital di OPD (seperti aplikasi perizinan atau pengaduan) – Infrastruktur TI di beberapa OPD sudah ada, namun belum digunakan untuk kegiatan riset dan inovasi	- Belum ada pusat uji coba/ industri teknologi layanan di daerah – Infrastruktur TI belum mendukung integrasi dan analitik berbasis data riset	- Infrastruktur tidak mendukung proses inovasi end-to-end dari riset hingga implementasi – Keterbatasan SDM TI untuk mengelola dan memanfaatkan sistem secara optimal
Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi				
Peningkatan difusi Inovasi	Pemenuhan aspek difusi inovasi			
	· Inovasi	· Adanya sistem layanan publik terintegrasi lintas perangkat daerah yang mudah diakses	· Pemkab telah mengembangkan platform Super App dan portal Palapa Mojo untuk integrasi	· Inovasi telah dikembangkan (Super App, Palapa Mojo, SIPENTOLMA NIS), namun integrasi dan pemanfaatanny

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, dengan dukungan platform digital yang user-friendly dan interoperabilitas antar sistem.	layanan publik (perizinan, pengaduan warga, e-office desa, e-reses DPRD, dll). Beberapa kecamatan seperti Jetis juga meluncurkan SIPENTOLMA NIS untuk pelayanan administrasi online.	a belum menyeluruh, serta masih terbatas pada beberapa wilayah dan layanan.
	· Saluran Komunikasi	· Kanal komunikasi digital interaktif yang memungkinkan dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, termasuk media edukasi literasi digital yang menjangkau kelompok marjinal.	· Informasi teknologi layanan tersedia melalui website OPD dan portal Satu Data Palapa. Namun belum ada kanal dialog publik digital interaktif, edukasi masyarakat masih terbatas untuk kelompok dengan literasi rendah.	· Saluran komunikasi bersifat satu arah (website OPD, Satu Data Palapa); belum tersedia media interaktif dan edukatif yang dapat menjangkau kelompok dengan literasi digital rendah.
	· Sistem Sosial	· Sistem layanan digital yang inklusif dan adaptif terhadap kemampuan teknologi warga, dengan pendekatan	· Layanan digital telah disosialisasikan ke OPD dan desa melalui bimtek SPBE 2024–2028 (seluruh perangkat	· Layanan digital telah tersedia di OPD dan desa, tetapi adopsi oleh kelompok rentan (lansia, warga pelosok, non-digital

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		pelatihan, pendampingan, serta opsi akses luring bagi masyarakat rentan.	desa/OPD se-Kabupaten). Namun masyarakat terutama lansia, warga desa terpencil, atau non-digital natives masih belum siap secara menyeluruh.	natives) masih rendah karena keterbatasan kemampuan dan akses.
	Pemenuhan kemitraan dalam pelaksanaan difusi inovasi	· Terjalin kolaborasi aktif dan strategis antara Pemda, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas digital lokal dalam mendukung inovasi layanan masyarakat secara berkelanjutan.	· Pemkab telah menjalin kemitraan dengan Diskominfo, OPD, serta beberapa pihak desa dan SMKN (untuk SIPENTOLMA NIS) dalam implementasi e-government. Namun kemitraan dengan lembaga riset, universitas, atau komunitas pengguna masih perlu diperkuat.	· Kemitraan baru melibatkan internal OPD dan sekolah; belum banyak melibatkan perguruan tinggi, startup lokal, maupun aktor eksternal lain yang potensial dalam mendukung inovasi berkelanjutan.
Ekosistem Budaya Riset dan Inovasi				
. Promosi dan Kampanye Inovasi	Telah memiliki saluran atau media dalam promosi dan kampanye inovasi	· Tersedianya platform terintegrasi yang tidak hanya menyampaikan inovasi pelayanan publik, tetapi	· Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengembangkan berbagai platform digital, seperti e-Lapor, SP4N, dan Mojokerto	· Kanal digital sudah dikembangkan (e-Lapor, SP4N, Satu Data), tetapi belum sepenuhnya digunakan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		juga menyediakan fitur edukasi publik, testimoni pengguna layanan, hingga kanal umpan balik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan pemerintah.	Satu Data untuk menyosialisasikan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat.	sebagai media promosi inovasi pelayanan publik yang bersifat interaktif dan berorientasi pada peningkatan pengalaman masyarakat.
	Secara rutin, terarah dan kontinu melakukan promosi dan kampanye terhadap inovasi penyelesaian PPD	· Promosi dilakukan secara sistematis, lintas OPD, dengan jadwal kampanye inovasi yang berkelanjutan, menampilkan contoh inovasi teknologi pemerintahan yang berhasil, serta berbasis data analitik partisipasi masyarakat.	· Promosi inovasi dilakukan melalui website resmi pemerintah, media sosial OPD, serta partisipasi dalam forum publik dan inovasi tahunan, meskipun belum sepenuhnya berjalan secara terstruktur dan rutin lintas OPD.	· Promosi inovasi masih bersifat sektoral dan belum memiliki struktur kampanye lintas OPD yang terjadwal, sehingga informasi inovasi teknologi belum tersebar merata dan terukur dampaknya terhadap kepuasan masyarakat.
Apresiasi Prestasi Inovasi;	Pelaksanaan kompetisi dan pemberian penghargaan terkait riset dan inovasi dalam penyelesaian PPD	· Tersedianya sistem kompetisi dan penghargaan yang mendorong OPD untuk menciptakan	· Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi nasional dan	· Meskipun penghargaan eksternal telah diraih, belum tersedia agenda rutin dan terstruktur di tingkat

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		inovasi teknologi informasi dan pelayanan digital yang mendukung efisiensi birokrasi, keterbukaan informasi, serta layanan publik yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.	regional atas inisiatif layanan digital dan transformasi birokrasi. Di antaranya: Top Digital Implementation 2022 Level Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2022 bagi Bupati Mojokerto (Majalah IT Works dan Wantiknas) serta penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jatim 2024 untuk kategori Kabupaten sangat CETTAR dan IKM tinggi (nilai 88,88%). Selain itu, Diskominfo Kab. Mojokerto memberikan penghargaan internal bagi OPD atas pencapaian implementasi SPBE seperti e-Office, tanda tangan elektronik, dan laporan Satu	kabupaten untuk mendorong inovasi berbasis teknologi secara menyeluruh dan lintas OPD, serta belum ada skema penghargaan lokal yang mendorong kompetisi inovasi secara berkelanjutan.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
			Data Palapa terlengkap. Namun demikian, kompetisi formal atau penghargaan yang secara khusus mendorong inovasi berbasis teknologi—misalnya layanan e-government komunitas, integrasi super-apps, atau digitalisasi transparan desa—belum terstruktur sebagai agenda rutin di tingkat kabupaten.	
c. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Hasil kajian yang terdaftar pada HKI	• Tersedia data resmi dan lengkap mengenai hasil kajian teknologi layanan industri yang telah terdaftar sebagai HKI. Kajian tersebut dimanfaatkan dalam pengembangan sistem digital pemerintah daerah, mendukung peningkatan	• Belum tersedia catatan resmi di portal Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto mengenai hasil kajian inovasi teknologi layanan publik seperti sistem e-Lapor, Super Apps atau e-Office Desa yang telah didaftarkan sebagai Hak	• Upaya inventarisasi dan perlindungan HKI atas inovasi layanan digital masih terbatas. Pemanfaatan kajian teknis untuk penguatan layanan pemerintah belum optimal.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen	Kriteria	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi Eksisting	Analisis Kesenjangan
		layanan masyarakat secara efisien dan inovatif.	Kekayaan Intelektual (HKI). Meskipun Pemkab telah meluncurkan sejumlah aplikasi inovatif untuk mendukung pelayanan digital, data HKI terkait kajian atau blueprint teknis belum tercantum, menunjukkan perlunya peningkatan upaya inventarisasi dan perlindungan HKI atas karya teknis yang mendasari ekosistem layanan pemerintahan berbasis teknologi.	

Sumber: Hasil Analisis, 202

BAB V

STRATEGI RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Strategi penguatan riset dan inovasi di daerah dirancang untuk menciptakan ekosistem inovasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) serta penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD). Rangkaian strategi ini meliputi enam pilar utama yang saling terhubung.

- Pertama, Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi difokuskan pada reformasi kebijakan, penataan basis data, dan pengembangan infrastruktur pendukung riset. Langkah ini mencakup penguatan kapasitas Brista Kabupaten Mojokerto dalam menyusun perencanaan berbasis riset, pemutakhiran basis data riset dan inovasi, serta peningkatan konektivitas antar-OPD dan komunitas PUD untuk mendukung pelayanan publik dan penyelesaian PPD.
- Kedua, Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga penelitian eksternal. Upaya ini membuka akses terhadap sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mempercepat pengembangan inovasi lokal.
- Ketiga, Kemitraan Riset dan Inovasi mendorong peningkatan difusi inovasi melalui riset produk dan pemasaran PUD, pengembangan sentra IKM, pembentukan saluran komunikasi berbasis sistem informasi, serta riset komprehensif untuk penyelesaian PPD. Strategi ini menekankan keterhubungan antara riset, pasar, dan industri lokal.
- Keempat, Budaya Riset dan Inovasi dibangun melalui apresiasi prestasi inovasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan UMKM berbasis inovasi, serta promosi dan kampanye inovasi. Upaya ini tidak hanya memotivasi generasi muda, tetapi juga memperkuat keberlanjutan inovasi di tingkat daerah.
- Kelima, Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah diwujudkan melalui pengembangan klaster inovasi berbasis PUD, yang mengintegrasikan proses produksi, hilirisasi produk, dan jaringan sentra IKM. Keterpaduan ini

menciptakan rantai nilai yang lengkap dari riset hingga pemasaran produk unggulan daerah.

- Keenam, Penyelarasan dengan Perkembangan Global menekankan pentingnya adopsi standar internasional dalam mekanisme produksi PUD, sehingga produk daerah dapat bersaing di pasar global. Strategi ini memperluas peluang ekspor dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, keenam strategi ini membentuk kerangka kerja inovasi daerah yang utuh. Mulai dari kebijakan, kapasitas kelembagaan, kemitraan, budaya inovasi, keterpaduan sistem, hingga penyelarasan global, seluruh langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, memperkuat daya saing PUD, dan menghadirkan solusi inovatif untuk PPD.

5.1 Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah

Strategi -strategi ini menekankan pentingnya penguatan riset dan inovasi di daerah untuk mendukung **Pemajuan PUD (Produk Unggulan Daerah)** dan **penyelesaian PPD (Permasalahan Prioritas Daerah)**. Strategi disusun dalam tiga sub elemen utama sebagai berikut:

1. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi

Tujuan: Memperkuat kapasitas **Brida Kabupaten Mojokerto** agar mampu merumuskan rekomendasi perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi.

Strategi Utama:

- Mengembangkan kebijakan yang mendukung teknologi dan inovasi tepat guna.
- Menjadikan riset sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk pemajuan PUD dan penyelesaian PPD.

1. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi

Tujuan: Menyediakan sistem informasi dan basis data yang akurat dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.

Strategi Utama:

- Menemukan potensi dan permasalahan terkait sinkronisasi dan pemutakhiran basis data riset.
- Mengembangkan kebijakan pemetaan basis data untuk mempercepat pemajuan PUD dan penyelesaian PPD.

Data yang terintegrasi akan mempermudah pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas program pembangunan daerah.

2. Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi

Tujuan: Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi di tingkat daerah.

Strategi Utama:

- Meningkatkan konektivitas sistem informasi dan basis data antara OPD pembina dengan komunitas atau kelompok sasaran PUD.
- Memperkuat sinergi antar-OPD untuk memanfaatkan data dalam meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan PPD.

Strategi kebijakan dan infrastruktur riset ini dirancang untuk mewujudkan tata industri riset dan inovasi yang terintegrasi, mulai dari kebijakan, basis data, hingga infrastruktur. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mempercepat pemajuan PUD, menyelesaikan PPD, dan meningkatkan pelayanan industri berbasis inovasi di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 5.1 Strategi Ekosistem Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan inovasi di daerah

Sub elemen	Strategi
Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas Bripda Kabupaten Mojokerto dalam merumuskan rekomendasi perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi • Mengembangkan kebijakan yang mendukung perwujudan teknologi dan inovasi yang tepat guna bagi pemajuan PUD dan penyelesaian PPD.
Penataan basis data Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan potensi dan masalah terkait sinkronisasi dan updating basis data melalui system informasi yang tepat guna. • Mengembangkan kebijakan terkait petaan basis data riset yang diarahkan bagi

	percepatan pemajuan PUD dan penyelesaian PPD
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konektivitas system informasi dan basis data antara OPD pembina dan komunitas atau kelompok sasaran PUD • Meningkatkan sinergi antara OPD dalam memanfaatkan system informasi dan basis data dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelesaian PPD

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.2 Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Strategi penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di daerah berfokus pada kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini menekankan pentingnya kemitraan dengan industri dan penelitian eksternal untuk memperkuat sarana dan prasarana riset, serta memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat:

- Memperoleh akses terhadap teknologi dan fasilitas penelitian yang lebih maju.
- Memanfaatkan keahlian dan pengalaman lembaga riset eksternal dalam mengembangkan inovasi lokal.
- Mempercepat implementasi inovasi yang relevan untuk **pemajuan Produk Unggulan Daerah (PUD) dan penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah (PPD)**.

Strategi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, industri, penelitian, dan masyarakat, sehingga hasil inovasi dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 5.2 Strategi Ekosistem Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Sub elemen	Strategi
-------------------	-----------------

Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	Memanfaatkan laboratorium penelitian eksternal untuk menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung riset dan inovasi.
--	--

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.3 Kemitraan riset dan inovasi

Strategi kemitraan riset dan inovasi menekankan pada peningkatan difusi inovasi melalui berbagai kegiatan riset dan pengembangan. Fokus utamanya adalah memperkuat Produk Unggulan Daerah (PUD) dan mendukung penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) secara komprehensif.

Beberapa strategi yang dijalankan meliputi:

- 1. Riset pengembangan produk dan pemasaran PUD.** Kegiatan riset diarahkan untuk menciptakan inovasi produk baru sekaligus meningkatkan strategi pemasarannya agar daya saing PUD semakin kuat di pasar.
- 2. Pengembangan saluran komunikasi berbasis sistem informasi.** Membangun platform komunikasi yang dapat menghubungkan **sentra IKM** dengan **OPD pembina** dan **pasar**, sehingga proses difusi inovasi dan pemasaran dapat berjalan efektif.
- 3. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.** Mendorong terbentuknya sentra IKM yang terintegrasi, mampu memproduksi dan memasarkan produk inovatif, serta menjadi penggerak ekonomi lokal.
- 4. Riset pengembangan inovasi untuk penyelesaian PPD.** Riset dilakukan secara menyeluruh untuk menghadirkan solusi inovatif yang berkelanjutan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

Melalui strategi ini, diharapkan tercipta ekosistem riset dan inovasi yang produktif dan sinergis, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan daya saing PUD, dan mendukung penyelesaian PPD secara terukur dan berkelanjutan.

Tabel 5.3 Strategi Ekosistem Kemitraan Riset dan Inovasi

Sub elemen	Strategi
------------	----------

Peningkatan Difusi Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan riset yang berorientasi pada strategi pengembangan produk, dan pemasaran PUD. • Pengembangan saluran komunikasi berupa system informasi yang mampu menghubungkan sentra IKM dengan OPD pembina dan pasar. • Mengembangkan dan membina sentra IKM • Melaksanakan riset yang berorientasi pada pengembangan inovasi penyelesaian PPD secara komprehensif
----------------------------	--

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.4 Budaya riset dan inovasi

Strategi penguatan budaya riset dan inovasi di daerah bertujuan membangun ekosistem inovasi yang produktif, berkelanjutan, dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) serta penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD).

Langkah strategis yang dijalankan meliputi:

1) Apresiasi Prestasi Inovasi

- Memberikan motivasi bagi generasi muda dalam mengembangkan teknologi dan inovasi melalui penyelenggaraan kompetisi dan pemberian penghargaan.
- Upaya ini diharapkan mampu mencetak talenta inovatif baru yang dapat mendorong pengembangan PUD.

2) Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan

- Melindungi **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** atas penemuan teknologi dan inovasi yang muncul dari pengembangan PUD maupun penyelesaian PPD.
- Memberikan jaminan hukum bagi penemu dan mendorong keberlanjutan inovasi daerah.

3) Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

- Membina **sentra IKM** dan komunitas pengrajin untuk memperkuat ekosistem industri kreatif lokal.
- Mendorong lahirnya **UMKM baru berbasis inovasi PUD**, sehingga meningkatkan perekonomian daerah.

4) Promosi dan Kampanye Inovasi

- Melakukan sosialisasi capaian pembinaan sentra IKM, termasuk perkembangan produksi dan pemasaran produk unggulan.
- Menyebarkan informasi terkait penerapan iptek untuk mendukung penyelesaian PPD, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat inovasi dalam pembangunan.

Melalui strategi ini, pemerintah daerah berupaya menumbuhkan budaya riset dan inovasi yang kuat, melindungi karya industri lokal, mendorong lahirnya UMKM inovatif, serta memperluas pemahaman masyarakat akan pentingnya inovasi bagi kemajuan daerah.

Tabel 5.4 Strategi Ekosistem Budaya Riset dan Inovasi

Sub elemen	Strategi
Apresiasi Prestasi Inovasi	Meningkatkan motivasi generasi muda terkait pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengembangan PUD melalui penyelenggaraan kompetisi dan pemberian penghargaan
Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan	Melindungi hak kekayaan intelektual industry yang bersumber dari penemuan teknologi baru atau inovasi dalam pengembangan PUD dan penyelesaian PPD.
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membina sentra IKM dan komunitas pengerajin. • Mendorong tumbuhnya UMKM baru berbasis PUD
Promosi dan Kampanye Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada masyarakat terkait perkembangan pembinaan terhadap sentra IKM dan capaian produksi / pemasarannya • Sosialisasi terkait perkembangan iptek yang diimplementasikan dalam penyelesaian PPD

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.5 Keterpaduan riset dan inovasi di daerah

Strategi keterpaduan riset dan inovasi di daerah menekankan pada pengembangan industri inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai upaya membangun ekosistem inovasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Langkah utama yang dijalankan adalah penyelenggaraan pengembangan industri inovasi melalui:

- Pembentukan dan pembinaan kelompok sentra IKM yang saling terhubung.
- Pengembangan proses produksi dan hilirisasi produk, sehingga mampu menciptakan rantai nilai yang kuat dari produksi hingga pemasaran.
- Integrasi antar-sentra IKM dan OPD pembina untuk mempercepat difusi inovasi, memperkuat daya saing PUD, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dengan strategi ini, pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi antara riset, inovasi, dan pelaku ekonomi lokal, sehingga hasil inovasi tidak hanya berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam pengembangan PUD dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Tabel 5.5 Strategi Ekosistem Keterpaduan Riset dan Inovasi

Sub elemen	Strategi
Penyelenggaraan Pengembangan Kluster Inovasi Berbasis PUD	Mengembangkan proses produksi dan hilirisasi produk melalui kelompok-kelompok sentra IKM yang terintegrasi.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.6 Penyelarasan dengan perkembangan global

Strategi penyelarasan riset dan inovasi dengan perkembangan global difokuskan pada peningkatan kepedulian terhadap isu internasional, khususnya dalam konteks pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). Langkah utama yang dijalankan adalah:

- Memperluas penggunaan standar internasional dalam mekanisme produksi PUD, sehingga produk lokal dapat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang diakui di pasar global.

- Mendorong daya saing PUD agar mampu bersaing di tingkat internasional melalui peningkatan kualitas, efisiensi produksi, dan kepatuhan terhadap regulasi global.

Strategi ini diharapkan dapat menjadikan inovasi daerah lebih relevan dengan dinamika global, meningkatkan peluang ekspor PUD, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis standar internasional yang berkelanjutan.

Tabel 5.6 Strategi Ekosistem Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Sub elemen	Strategi
Peningkatan Kepedulian terhadap Isu Internasional	Memperluas penggunaan standar internasional dalam mekanisme produksi PUD.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Peta jalan ini dikembangkan untuk mendorong pengembangan ekosistem yang terarah secara bertahap. Pentahapan dilakukan berdasarkan pengelompokan elemen ekosistem berdasarkan urutan proses implementasinya. Dalam hal ini baik PPD maupun PUD harus didahului oleh pengembangan elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi, dan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi. Kedua elemen ini memberikan pondasi legalitas dan kelengkapan dasar bagi pengembangan elemen-elemen lainnya. Setelah itu dilakukan pengembangan bagi elemen-elemen ekosistem lainnya.

Peta jalan ini disusun dalam periode 5 tahun mulai dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Secara umum, pengembangan elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi menempati seluruh periode tahun 2025 – 2029; sementara elemen-elemen lainnya dimulai pada tahun kedua (2027). Pembagian periodisasi ini untuk memberi kesempatan bagi ekosistem untuk memiliki legalitas dalam pengembangan kebijakan, infrastruktur dan industri riset eksternal.

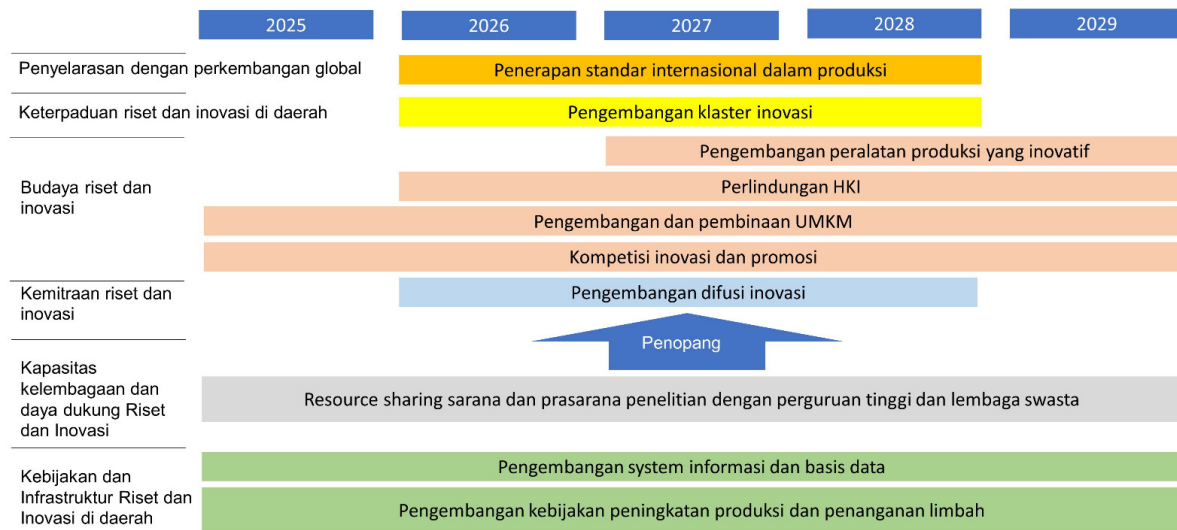
6.1 Peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi Produk Unggulan Daerah

Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dilakukan melalui pengembangan keenam elemen ekosistem: kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, Kemitraan riset dan inovasi, budaya riset dan inovasi, keterpaduan riset dan inovasi, dan penyelarasan dengan perkembangan global. Dalam peta jalan ini, masing-masing elemen dikembangkan dalam periode yang berbeda-beda (Gambar 6.1).

Sebagai pondasi bagi pengembangan keseluruhan elemen ekosistem, selama periode tahun 2025 – 2029 dilakukan pengembangan elemen kebijakan dan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan. Kedua elemen ekosistem ini berorientasi pada pengembangan kebijakan peningkatan produksi, pemasaran dan penanganan limbah IKM; serta peningkatan industri riset eksternal.



Gambar 6.1 Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi PUD

Dalam tahap selanjutnya, dilakukan difusi inovasi yang berorientasi pada kajian pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis SDGs, serta perlindungan HKI. Promosi dan kampanye juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan permasalahan daerah dan menjaring Industri yang luas di antara masyarakat. Tahap ini dilakukan pada periode tahun 2026 – 2029.

6.2 Peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi Permasalahan Prioritas Daerah

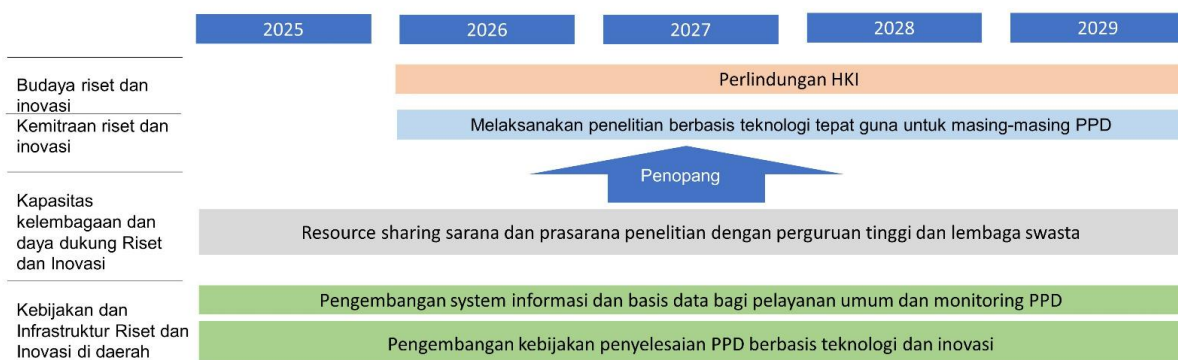
Peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi bagi penyelesaian permasalahan prioritas daerah (PPD) dilakukan terhadap elemen kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemitraan, dan budaya riset. Penyelesaian PPD tidak melibatkan elemen keterpaduan riset, dan penyelarasian dengan perkembangan global karena:

- Keterpaduan riset dan inovasi berorientasi pada pengembangan kluster inovasi berbasis PUD. Dengan demikian, tidak relevan dengan penyelesaian PPD

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

- Penyelarasan dengan perkembangan global dicapai melalui riset dan inovasi yang berorientasi pada SDGs. Hal ini dicapai melalui arahan riset pada pengembangan difusi inovasi (elemen kemitraan riset dan inovasi).

Sama halnya dengan peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi PUD, penyelesaian PPD juga mempergunakan elemen kebijakan dan infrastruktur, dan elemen kapasitas kelembagaan sebagai elemen penopang bagi keseluruhan ekosistem. Hal ini dikarenakan pengembangan ekosistem riset dan inovasi membutuhkan legalitas kebijakan serta industri lintas sektor dan dengan institusi riset eksternal. Dalam tahap ini dilakukan pengembangan kebijakan penyelesaian PPD berbasis teknologi dan inovasi serta pengembangan system informasi dan basis data bagi pelayanan umum dan monitoring PPD. Selain itu juga dilakukan penjajakan industri dengan pihak eksternal. Tahap dasar ini dilakukan selama periode 2025 – 2029.



Gambar 6.2 Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi PPD

Dalam tahap selanjutnya, dilakukan difusi inovasi yang berorientasi pada kajian pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis SDGs, serta perlindungan HKI. Promosi dan kampanye juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan permasalahan daerah dan menjaring industri yang luas di antara masyarakat. Tahap ini dilakukan pada periode tahun 2026 – 2029.

BAB VII

PROGRAM INDIKATIF TEMATIK RISET DAN INOVASI KABUPATEN MOJOKERTO

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi merupakan salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Kabupaten Mojokerto memiliki potensi besar dalam sektor industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pengembangan ekosistem adalah mengintegrasikan potensi riset dari perguruan tinggi, penelitian, dan industri di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, perlu juga mendorong terciptanya inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah, terutama di sektor unggulan. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat), dan mengembangkan kebijakan dan infrastruktur pendukung inovasi, seperti industri atau bisnis dan *research center*.

Dalam program indikatif ini perlu menghubungkan pelaku riset dengan UMKM agar hasil penelitian bisa dihilirisasi menjadi produk bernilai ekonomi. Selain itu perlu juga menggandeng perguruan tinggi dan riset nasional untuk program penelitian bersama, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk dukungan pendanaan dan program inovasi.

7.1 Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, terutama dari sektor pertanian, industri kecil dan menengah (IKM), serta pariwisata berbasis budaya dan sejarah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,

Program indikatif ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
- Mendorong nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi dan diversifikasi produk.
- Memperkuat peran UMKM dan IKM dalam struktur perekonomian daerah.
- Menumbuhkan klaster industri berbasis potensi lokal.

Program indikatif ini mengadopsi pendekatan terintegrasi melalui:

- **Penguatan kapasitas pelaku usaha**, termasuk pelatihan manajemen usaha, produksi, dan pemasaran digital.
- **Pengembangan kawasan sentra produksi** dan kemitraan dengan industri besar.
- **Fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, dan SNI** untuk menjamin kualitas produk.
- **Promosi dan pemasaran melalui event lokal dan e-commerce.**
- **Dukungan akses pembiayaan melalui BUMDes, koperasi, dan perbankan.**

Program indikatif ini menjadi kerangka dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Mojokerto berbasis potensi lokal. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan swasta, produk unggulan Mojokerto diharapkan mampu bersaing, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Tabel 7.1 Program indikatif pengembangan ekosistem riset dan inovasi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Mojokerto

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Elemen: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah									
Sub elemen: Reformasi dan Kebijakan Riset Daerah	Mengembangkan kebijakan mengenai pengembangan produksi dan pemasaran PUD berbasis teknologi dan inovasi	Jumlah kajian	1					Koordinator: Bapperida Pelaksana: Bagian pemerintahan sekretariat daerah, Dinkopum, BPOM	Keluaran: kajian menghasilkan strategi pengembangan produk dan pemasaran termasuk jenis teknologi yang dapat dikembangkan beserta strateginya
	Mengembangkan kebijakan mengenai penanganan limbah industry kecil dan menengah	Jumlah kajian	1					Koordinator: Bapperida Pelaksana: Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup	Keluaran: Kajian menghasilkan strategi penanganan limbah yang dihasilkan IKM dan sentra industri beserta strategi pengembangan teknologinya

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Sub elemen: Penataan basis data Riset dan Inovasi	Pengembangan system informasi dan basis data daerah	Jumlah kajian	1					Koordinator: Bapperida Pelaksana Diskominfo	Keluaran: Kajian menghasilkan potensi dan masalah pengembangan system informasi dan basis data beserta strategi pengembangannya bagi PUD yang akan dipergunakan oleh OPD terkait dan kecamatan/desa sebagai institusi Pembina.
Sub elemen: Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Penerapan system informasi dan basis data bagi pengembangan PUD di kecamatan	Persentase OPD Pembina IKM dan satuan wilayah Pembina IKM yang terkoneksi dengan system	20%	40%	60%	80%	100%	Koordinator: Bappeda/Bapperida Pelaksana: Diskominfo, Kecamatan	Keluaran: Konektivitas sistem informasi dan updating basis data Keterangan: System informasi berisi sekurang-kurangnya:

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
		informasi dan basis data							<ul style="list-style-type: none"> - Sebaran sentra dan produsen - Profil sentra dan produsen - Pusat promosi dan layanan penjualan produk <p>Basis data dapat dioperasikan oleh OPD pengampu basis data dan dipergunakan oleh OPD pembina IKM</p>

Elemen: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Sub elemen: Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	<i>Resource sharing</i> sarana dan prasarana penelitian dengan lembaga penelitian dan inkubator bisnis di perguruan tinggi dan lembaga swasta	Persentase jumlah surat perjanjian kerjasama (PKS) dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta terkait pengembangan teknologi dan inovasi tepat guna	20%	40%	60%	80%	100%	Koordinator: Bappeda/Bapperi da Pelaksana: Bagian pemerintahan sekretariat daerah dan Perguruan Tinggi/lembaga riset	Keluaran: <ul style="list-style-type: none"> Adanya legalitas <i>resource sharing</i> sumber dana manusia dan sarana prasarana penelitian dengan pihak eksternal Meningkatnya keterlibatan peneliti perguruan tinggi/lembaga riset dalam penelitian yang dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Meningkatnya kapasitas riset staf peneliti Bapprida
		Persentase jumlah surat perjanjian kerjasama (PKS) dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta terkait pengembangan UMKM	20%	40%	60%	80%	100%	Koordinator: Bappeda/Bapperi da Pelaksana: Bagian pemerintahan sekretariat daerah dan Perguruan Tinggi/lembaga riset	

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
									<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya peranan laboratorium / pusat riset perguruan tinggi / lembaga riset dalam penelitian yang dikoordinasikan Pemkab Mojokerto
Elemen: Kemitraan riset dan inovasi									
Sub elemen: Peningkatan Difusi Inovasi	Melaksanakan penelitian aplikatif dengan topik: <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penanganan bahan baku 	Jumlah kajian untuk masing-masing PUD		2	2			Pelaksana: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perguruan tinggi	Keluaran: Hasil penelitian yang aplikatif sebagai masukan pengambilan keputusan Catatan: Kajian untuk masing-masing PUD
	<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi produk dan pengembangan 				2	2			

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
	teknologi produksi								
	• Strategi dan media pemasaran			1	2	1			
	• Pengembangan kapasitas keuangan			1	1	1	1		
	Mengembangkan komunikasi berbasis system informasi	Persentase sentra IKM		25%	50%	75%	100%		Catatan: Dikembangkan untuk sentra-sentra IKM masing-masing PUD
	Mengembangkan sentra IKM dalam kaitannya dengan difusi inovasi	Persentase sentra IKM		25%	50%	75%	100%		Catatan: Dikembangkan untuk sentra-sentra IKM masing-masing PUD
Elemen: Budaya riset dan inovasi									
Sub elemen: Apresiasi Prestasi Inovasi	Melaksanakan kompetisi inovasi PUD	Jumlah kompetisi		1	1	1	1	Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian,	Keluaran: Meningkatnya motivasi pengembangan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
<p>Sub elemen: Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan</p> <p>Sub elemen: Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi</p>								Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Daerah	produk dan wawasan masyarakat terhadap produk
		Persentase peningkatan jumlah peserta kompetisi		25%	50%	75%	100%		
	Melindungi kekayaan intelektual	Jumlah pendaftaran kekayaan intelektual terkait pengembangan PUD		4	7	4	1	Pelaksana: Bapperida, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, perguruan tinggi	Keluaran: Perlindungan terhadap kekayaan intelektual pencipta
	Mengembangkan peralatan produksi baru dan inovatif	Persentase jumlah teknologi produksi baru yang dipergunakan oleh IKM			25 %	50 %	100 %	Pelaksana: Bapperida, Disperindag, Dinkopum, perguruan tinggi (inkubator bisnis)	Keluaran: Meningkatnya produksi
	Mengembangkan UMKM	Persentase Jumlah UMKM	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %		Keluaran:

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Sub elemen: Promosi dan Kampanye Inovasi		atau start up yang dibina melalui inkubator bisnis perguruan tinggi							Meningkatnya jumlah UMKM dan start up
	Melaksanakan penyebaran informasi publik dan berita mengenai pelaksanaan kompetisi dan pengembangan inovasi	Jumlah berita dan informasi publik mengenai masing-masing PUD melalui kanal online pemda dan media massa	4	4	4	4	4	Pelaksana: Dinas Komunikasi dan Informasi	Keluaran: Meningkatnya jangkauan informasi publik
Elemen: Keterpaduan riset dan inovasi di daerah									
Sub elemen: Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis PUD	Mengembangkan sentra IKM atau komunitas produsen berbasis klaster inovasi	Persentase jumlah sentra IKM yang mendapatkan kajian pengembangan klaster inovasi		25%	50%	100%		Pelaksana: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perguruan tinggi	Keluaran: Meningkatkan produktivitas, kualitas hidup dan lingkungan pada sentra IKM, dan komunitas
Elemen: Penyelarasan dengan perkembangan global									

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Sub elemen: Peningkatan Kepedulian terhadap Isu Internasional	Menerapkan standar internasional dalam produksi PUD	Jumlah produsen yang telah memenuhi standar		25%	50%	100%	100%	Pelaksana: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan	Keluaran: Meningkatnya kualitas dan keamanan produk

Sumber: Rencana, 2025

7.2 Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Prioritas Daerah

Kabupaten Mojokerto memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, hingga penguatan daya saing daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendorong lahirnya **ekosistem riset dan inovasi** yang terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis pengetahuan (knowledge-based development).

Tujuan Program

Program indikatif ini bertujuan untuk:

- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat (quadruple helix).
- Menyediakan solusi berbasis riset terhadap permasalahan daerah secara terarah dan aplikatif.
- Memperkuat kapasitas inovasi lokal, khususnya di sektor prioritas seperti pertanian, industri kreatif, dan lingkungan hidup.
- Membangun sistem pendukung inovasi seperti inkubator bisnis, pusat riset terapan, dan digitalisasi layanan publik.

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi dilakukan melalui:

- **Kemitraan riset dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang**, baik regional maupun nasional.
- **Pembangunan pusat inovasi daerah (regional innovation hub)** untuk menghubungkan ide riset dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- **Pemberian insentif dan pendampingan bagi inovator lokal dan pelaku UMKM.**
- **Digitalisasi sistem informasi riset dan pengembangan kebijakan berbasis data.**
- **Pelibatan masyarakat dan generasi muda dalam program kompetisi inovasi daerah.**

Program indikatif ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan Mojokerto sebagai kabupaten yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui riset yang terarah dan inovasi yang tepat guna, permasalahan daerah dapat diselesaikan secara efektif, sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Tabel 7.2 Program indikatif ekosistem riset dan inovasi Permasalahan Prioritas Daerah Kabupaten Mojokerto

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Elemen: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah									
Sub elemen: Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi	Pengembangan kebijakan mengenai penyelesaian PPD berbasis teknologi dan inovasi	Jumlah kajian	1					Pelaksana Bapperida	Keluaran: kajian menghasilkan strategi penyelesaian PPD beserta teknologi dan inovasinya
Sub elemen: Penataan basis data Riset dan Inovasi	Pengembangan system informasi dan basis data daerah	Jumlah kajian	1					Koordinator: Bapperida Pelaksana: Diskominfo	Keluaran: Kajian menghasilkan potensi dan masalah pengembangan system informasi dan basis data beserta strategi pengembangannya bagi PUD yang akan dipergunakan oleh OPD terkait dan kecamatan/desa sebagai institusi Pembina.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Sub elemen: Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Penerapan system informasi dan basis data bagi pelayanan umum	Persentase aspek pelayanan umum terkoneksi dengan system informasi dan basis data.	20%	40%	60%	80%	100%	Koordinator: Bapperida Pelaksana: Diskominfo	<p>Keluaran: Konektivitas sistem informasi dan updating basis data</p> <p>Keterangan: Aspek pelayanan umum terkait aspek smart city sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan umum masyarakat • Pengaduan terhadap pelayanan infrastruktur kawasan • Informasi layanan pendidikan dan kesehatan • Informasi kesehatan lingkungan

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
									• Aspek SDGs
Elemen: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Sub elemen: Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	<i>Resource sharing</i> sarana dan prasarana penelitian dengan lembaga penelitian di perguruan tinggi dan lembaga swasta	Persentase jumlah surat perjanjian kerjasama (PKS) dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta terkait pengembangan teknologi dan inovasi tepat guna	20%	40%	60%	80%	100%	Koordinator: Bapperida Pelaksana: Bagian pemerintahan sekretariat daerah dan Perguruan Tinggi/lembaga riset	Keluaran: <ul style="list-style-type: none"> Adanya legalitas <i>resource sharing</i> sumber dana manusia dan sarana prasarana penelitian dengan pihak eksternal Meningkatnya keterlibatan peneliti perguruan tinggi/lembaga riset dalam penelitian yang dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Meningkatnya kapasitas riset staf peneliti Bapperida
		Persentase jumlah surat perjanjian kerjasama (PKS) dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta	20%	40%	60%	80%	100%	Koordinator: Bapperida Pelaksana: Bagian pemerintahan sekretariat daerah dan Perguruan Tinggi/lembaga riset	

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
									<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya peranan laboratorium / pusat riset perguruan tinggi / lembaga riset dalam penelitian yang dikoordinasikan Pemkab Mojokerto
Elemen: Kemitraan riset dan inovasi									
Sub elemen: Peningkatan Difusi Inovasi	Melaksanakan penelitian berbasis teknologi tepat guna untuk masing-masing PPD	Jumlah kajian untuk masing-masing PPD		1	1	1	2	Pelaksana: Bapperida, Perguruan tinggi	Keluaran: Hasil penelitian yang aplikatif sebagai masukan pengambilan keputusan
Elemen: Budaya riset dan inovasi									
Sub elemen: Inventarisasi, Pengembangan, dan	Melindungi kekayaan intelektual	Jumlah pendaftaran kekayaan intelektual terkait kajian		1	1	1	2	Pelaksana: Bapperida, perguruan tinggi	Keluaran: Perlindungan terhadap kekayaan intelektual pencipta

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Elemen / sub elemen ekosistem riset dan inovasi	Program indikatif	Indikator	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029		
Perlindungan Pengetahuan		penyelesaian PPD							
Sub elemen: Promosi dan Kampanye Inovasi	Melaksanakan penyebaran informasi publik dan berita mengenai inovasi dalam penyelesaian PPD	Jumlah PPD yang diberitakan melalui kanal online pemda dan media massa	5	5	5	5	5	Pelaksana: Diskominfo	Keluaran: Meningkatnya jangkauan informasi publik

Sumber: Rencana, 2025

7.3 Program indikatif Produk Unggulan Daerah dan Permasalahan Prioritas Daerah

Program indikatif pengembangan Produk Unggulan Daerah

Program indikatif ini memuat rencana kegiatan khususnya PUD berdasarkan sub elemen program, sasaran, dan waktu pelaksanaan dari tahun 2025 hingga 2029. Program ini bertujuan mendorong inovasi, pengembangan UMKM, dan penguatan ekosistem usaha daerah yang berkelanjutan.

1 .Peningkatan Difusi Inovasi Sub elemen ini berfokus pada pengembangan bahan baku, diversifikasi produk, strategi pemasaran, dan penguatan kapasitas keuangan UMKM.

- **Riset bahan baku:** Dilaksanakan bergilir dari 2025 hingga 2029 untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku masing-masing PUD.
- **Diversifikasi produk dan teknologi produksi:** Setiap tahun hingga 2029 menargetkan lahirnya varian produk baru yang meningkatkan daya saing.
- **Strategi dan media pemasaran:** Memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan dan permintaan, dilaksanakan secara berkala pada tahun 2025–2029.
- **Kapasitas keuangan:** Fokus pada strategi keuangan yang kredibel bagi keberlanjutan UMKM, juga dilaksanakan bertahap hingga 2029.

2. Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi

- **Pengembangan peralatan produksi inovatif:** Dilaksanakan pada 2026–2028 untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan teknologi tepat guna.
- **Pelatihan pengelolaan UMKM:** Dilaksanakan setiap tahun 2025–2029 untuk mendorong pertumbuhan UMKM baru dan memberdayakan yang sudah ada.

3. Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis PUD

- **Pengembangan sentra IKM/komunitas produsen:** Fokus pada pembentukan dan penguatan klaster inovasi dari hulu ke hilir. Progres capaian ditargetkan bertahap: 20% pada 2025 hingga 100% pada 2039.

Program Indikatif PUD ini disusun untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM melalui inovasi bahan baku, diversifikasi produk, strategi pemasaran, penguatan keuangan, pengembangan teknologi produksi, serta pembentukan klaster inovasi. Implementasi bertahap selama 2026–2030 diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha daerah yang kuat dan berkelanjutan.

Tabel 7.3 Program indikatif pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui pengembangan IKM dan pemberdayaan UMKM

Kegiatan	PUD	Sasaran	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
Sub elemen: Peningkatan Difusi Inovasi								
Riset pengembangan teknologi bagi pengembangan PUD	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Berkembangnya strategi terkait pengadaan dan keberlanjutan bahan baku masing-masing PUD		X				Bapperida
	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing			X				
	Industri kerajinan non logam				X			
	Industri kerajinan logam				X			
Riset pengembangan diversifikasi produk dan pengembangan teknologi produksi	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Berkembangnya keberagaman produk untuk meningkatkan daya jual dan permintaan, beserta berkembangnya teknologi baru untuk menghasilkan varian-varian produk		X				Bapperida
	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing			X				
	Industri kerajinan non logam				X			
	Industri kerajinan logam				X			
Riset pengembangan strategi dan media pemasaran	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Meningkatnya permintaan dan pelayanan terhadap pembeli		X				Bapperida
	Industri makanan				X			

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	PUD	Sasaran	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	yang sehat dan berdaya saing	mempergunakan sistem informasi						
	Industri kerajinan non logam					X		
	Industri kerajinan logam						X	
Kajian penanganan limbah	Industri kerajinan non logam	Terselesaikannya permasalahan limbah khususnya IKM Batik		X				Bapperid Dinas Lingkung Hidup
Kajian pengembangan sentra promosi	Semua PUD	Adanya dasar kebijakan pengembangan sentra promosi		X	X			Bapperid Dinas Koperasi Usaha M
Riset pengembangan kapasitas keuangan	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Berkembangnya keberlanjutan UMKM melalui strategi keuangan yang kredibel dan handal		X				Bapperid Dinas Koperasi Usaha M
	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing				X			
	Industri kerajinan non logam					X		
	Industri kerajinan logam						X	
Sub elemen: Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi								
Pengembangan peralatan produksi baru yang inovatif	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Meningkatnya produksi akibat penggunaan teknologi tepat guna yang inovatif			X	X	X	Bapperid Dinas Perindust dan perdagang Dinas Koperasi Usaha M perguruan tinggi (Inkubato bisnis)
	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing				X	X	X	
	Industri kerajinan non logam				X	X	X	
	Industri kerajinan logam				X	X	X	

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	PUD	Sasaran	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
Pelatihan pengelolaan UMKM	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Bertambahnya UMKM baru dan pemberdayaan UMKM yang telah ada	X	X	X	X	X	
	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing		X	X	X	X	X	
	Industri kerajinan non logam		X	X	X	X	X	
	Industri kerajinan logam		X	X	X	X	X	
Monitoring dan evaluasi pembinaan IKM	Semua PUD	Terkendalinya dan terarahnya kegiatan pembinaan IKM		X	X	X	X	
Sub elemen: Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis PUD								
Mengembangkan sentra IKM atau komunitas produsen berbasis klaster inovasi	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Berkembangnya strategi hulu-hilir sentra IKM berbasis klaster inovasi	X	X	X	X	X	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perguruan Tinggi
	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing							
	Industri kerajinan non logam							
	Industri kerajinan logam							
	Industri alas kaki			X				

7.4Program indikatif penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

Program indikatif ini memuat rencana kegiatan PPD berdasarkan sub elemen program, sasaran, dan jadwal pelaksanaan dari tahun 2026 hingga 2030. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam penyelesaian permasalahan PPD secara berkelanjutan. Fokus utama program ini adalah mendorong difusi inovasi melalui pengembangan teknologi untuk mendukung penyelesaian PPD melalui kegiatan riset yang dilaksanakan secara bertahap. Sasaran yang hendak dicapai

adalah tercapainya strategi pengembangan dan variasi teknologi tepat guna untuk menyelesaikan tantangan PPD di daerah.

Jadwal Pelaksanaan:

- Tahun 2026: Kegiatan riset tahap pertama dimulai (ditandai dengan tanda **X**).
- Tahun 2027: Riset tahap kedua dilanjutkan untuk memperluas variasi teknologi.
- Tahun 2028: Pelaksanaan riset berlanjut dengan fokus penyempurnaan strategi penerapan teknologi.
- Tahun 2029: Tahap keempat difokuskan pada pengujian dan penerapan teknologi di lapangan.
- Tahun 2030: Tahap akhir menekankan evaluasi hasil riset dan penerapan penuh teknologi tepat guna untuk penyelesaian PPD.

Sasaran umum dari program program ini antara lain:

- Menghasilkan strategi pengembangan teknologi yang variatif dan tepat guna.
- Menyediakan solusi inovatif untuk mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal dalam memanfaatkan hasil riset teknologi.

Program Indikatif PPD ini menitikberatkan pada riset dan pengembangan teknologi tepat guna sebagai strategi utama penyelesaian masalah pembangunan daerah. Pelaksanaan yang bertahap selama lima tahun akan memastikan tercapainya sasaran inovasi dan penerapan teknologi secara optimal di daerah.

Tabel 7.4 Program indikatif penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

Kegiatan	PPD	Sasaran	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
Sub elemen: Peningkatan Difusi Inovasi								
Pengembangan SDM dalam pengelolaan infrastruktur sistem informasi dan basis data	Perlunya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup Masyarakat	Adanya strategi pengembangan dan variasi teknologi tepat guna bagi penyelesaian PPD		X				Bapperida, Perguruan Tinggi
Pengembangan lembaga pelatihan tenaga kerja				X	X	X		
Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi monitoring dan pembinaan				X	X	X		

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	PPD	Sasaran	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
kualitas hidup masyarakat								
Pengembangan kemitraan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja			X					
Pengembangan infrastruktur sistem informasi dan basis data IKM	Belum adanya rantai produksi yang komprehensif dan diversifikasi produk yang berdaya saing	Adanya strategi pengembangan dan variasi teknologi tepat guna bagi penyelesaian PPD	X					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan anggaran bagi kajian rantai pasok dan inovasi produk lokal			X	X	X	X	X	Bapperida
Pengembangan kemitraan melalui inkubator bisnis			X	X	X	X	X	Bapperida dan Perguruan Tinggi
Pemeliharaan sistem informasi bagi pemasaran PUD			X	X	X	X	X	Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kajian penanganan limbah dalam produksi IKM				X	X			Dinas Lingkungan Hidup
Kajian pengembangan sentra promosi PUD				X				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan sistem informasi dan basis data bagi monitoring komponen SDGs	Perlunya pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pengembangan ekonomi, lingkungan hidup, fungsi-fungsi kawasan dan kualitas	Adanya strategi pengembangan dan variasi teknologi tepat guna bagi penyelesaian PPD		X	X			Dinas Komunikasi dan Informatika

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	PPD	Sasaran	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	hidup masyarakat							
Kajian ekonomi hijau						X		Bapperida, Perguruan Tinggi
Pengembangan kemitraan bagi pemanfaatan laboratorium perguruan tinggi			X					Bapperida, Perguruan Tinggi
Kajian pengembangan infrastruktur pedesaan						X		Bapperida, Perguruan Tinggi
Pemeliharaan infrastruktur smart city			X	X	X	X	X	Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informasi
Pengembangan sistem informasi dan basis data bagi monitoring kelompok rentan	Perlindungan sosial kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus	Adanya strategi pengembangan dan variasi teknologi tepat guna bagi penyelesaian PPD		X	X			Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan anggaran bagi pembangunan infrastruktur bagi kelompok rentan			X	X	X	X	X	Bapperida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Riset perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan				X				Bapperida, Perguruan Tinggi, Dinas Sosial
Pemeliharaan saluran komunikasi digital bagi peningkatan kualitas hidup kelompok rentan			X	X	X	X	X	Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemberdayaan komunitas kelompok rentan				X	X	X	X	Bapperida, Dinas Sosial

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	PPD	Sasaran	Waktu pelaksanaan sesuai peta jalan					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan basis data bagi pelaksanaan pemerintahan	Perlunya pengembangan organisasi pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis teknologi	Adanya strategi pengembangan dan variasi teknologi tepat guna bagi penyelesaian PPD	X	X	X	X	X	Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan basis data bagi pelayanan publik			X	X	X	X	X	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sosialisasi pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat				X		X		

Sumber: Rencana, 2025

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dengan potensi unggulan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen ini disusun sebagai pedoman teknis dalam perumusan kebijakan daerah berbasis bukti, dengan memetakan kondisi eksisting, kesenjangan, serta arah pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang ideal. Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta jalan Pemajuan Iptek di Daerah Kabupaten Mojokerto 2025-2029 digunakan untuk memberikan pedoman dokumen strategis pelaksanaan riset dan inovasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Dengan melalui pendekatan sistematis mulai dari identifikasi permasalahan, analisis kesenjangan, penentuan strategi, hingga penyusunan peta jalan dan program indikatif tematik lintas sektor, diharapkan dokumen ini mampu mendorong kolaborasi multipihak serta mempercepat tercapainya kemandirian dan daya saing daerah. Dokumen ini bukan hanya menjadi landasan formal, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk mengakselerasi pemajuan IPTEK demi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.

